

Relevansi Kualitas Manajerial Pelaku Usaha Terhadap Produktivitas Usaha Agroindustri Perikanan Laut Di Kabupaten Jember

Dewi Prihatini¹

¹Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

Abstrak

Indonesia berkali-kali terbukti cukup handal keluar dari jerat krisis global. Krisis Eropa yang membayangi negara-negara di dunia saat inipun diyakini tidak akan membawa dampak yang parah bagi Indonesia karena kekuatan pasar domestik yang dimiliki. Sektor agroindustri perikanan laut menjadi salah satu tumpuan pembangunan di Indonesia yang berdampak positif pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja, tidak hanya dalam jumlah tetapi juga kualitas manajerial. Kualitas manajerial seseorang berhubungan dengan kualitas SDM yang diukur dari pengalaman, kemampuan, dan pendidikan yang dimiliki serta berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi kualitas manajerial pengusaha terhadap produktivitas usaha agroindustri perikanan laut di Kabupaten Jember. Populasi penelitian adalah seluruh pengusaha agroindustri perikanan laut di Kabupaten Jember. Teknik snowball sampling digunakan dalam penentuan sampel sedangkan untuk metode analisis digunakan analisis deskriptif dan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengalaman dan kemampuan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha sedangkan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha agroindustri perikanan laut di Kabupaten Jember.

Kata kunci: kualitas manajerial, produktivitas, agroindustri perikanan laut

Abstract

Indonesia has frequently found the way out from global crisis. Nowadays, Indonesia is also confident to overcome the effects of crisis in Europe because of its existing big domestic market. Fishery agro-industry sector is one of the Indonesia's development focuses which has positive impacts towards the increasing number of worker to be employed not only in terms of quantity but also managerial quality. Managerial quality refers to human resource performance measured by business experiences, capability, and academic background that influence productivity of company. This study aimed to analyze the influence of managerial quality towards productivity of the fishery agro-industry in Jember district. The population of the study was all businessmen of fishery agro-industry of the selected areas. The respondents were determined by snowball sampling method in every coastal area and method of analysis using descriptive analysis and multiple regression method. It reveals that business experiences and capability had significant influence while academic background did not have significant influence toward productivity of the fishery agro-industries in Jember district.

Key words: managerial quality, productivity, fishery agro-industry

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan di masa lalu yaitu keberpihakan yang lebih kepada perusahaan-perusahaan besar dirasakan kurang menguntungkan dan berakibat terjadinya krisis ekonomi. Hal ini menimbulkan kesadaran semua pihak, khususnya pemerintah, untuk lebih berpihak pada pemberdayaan UKM. Pemerintah kemudian mengubah paradigma pembangunan dengan memberikan perhatian pada pemberdayaan ekonomi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas berdasarkan semangat kerakyatan, kemartabatan, dan kemandirian dalam rangka penciptaan azas pemerataan tanpa meninggalkan aspek pertumbuhan usahanya. Fakta menunjukkan saat terjadi krisis, banyak usaha besar dan konglomerat yang gulung tikar sebagai akibat melambungannya tanggungan hutang karena nilai tukar rupiah terdepresiasi dan merosot sangat tajam. Dilain pihak UKM justru dapat tetap bertahan. Sektor ini terbukti telah dapat menopang dampak yang ditimbulkan krisis dengan menampung para pengangguran disektor informal.

Kata kunci perubahan paradigma pemberdayaan UKM adalah peran serta masyarakat, sedangkan fungsi pemerintah hanyalah sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Dengan demikian keberhasilan dari pemberdayaan UKM sangat ditentukan oleh kualitas masyarakatnya. Selama tiga dekade terakhir, Indonesia mencatat berbagai kemajuan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Berbagai upaya perbaikan indikator tersebut antara lain ditunjukkan dengan usia harapan hidup rata-rata meningkat dari 41,0 tahun menjadi 66,2 tahun. Selain itu, angka kematian bayi turun dari 159 menjadi 48 per 1.000 kelahiran hidup, serta angka buta huruf dewasa turun dari 61% menjadi 12%. Namun demikian, dibandingkan dengan prestasi negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia, kemajuan Indonesia ini masih jauh tertinggal. Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi melambatnya pencapaian indikator-indikator di bidang pembangunan SDM, antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi dan sosial politik serta ketahanan dan keamanan yang kurang terjamin. Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,617 dan menempatkannya pada ranking 124 dari 187 negara, lebih rendah dari rata-rata regional.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai kurang lebih 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas 3,1 juta km², yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara. Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terbesar di dunia, yang tercermin pada keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan berjenis-jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Di wilayah pesisir, salah satu sektor kegiatan ekonomi yang berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan wilayah adalah usaha ekonomi (industri) yang mengolah bahan baku sumber daya perikanan atau perikanan hasil tangkapan nelayan. Sifat usaha ini adalah berbasis pada potensi sumber daya lokal (*local resources based industry*) dan sebagian besar didominasi oleh usaha berskala kecil-menengah atau UKM (Dahuri, 2004: 14).

Namun demikian berbagai permasalahan sering muncul terkait dengan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir diantaranya adalah lemahnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kelautan dan wilayah pesisir. Munculnya masalah tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem dan tata cara koordinasi antar *stakeholder* karena belum didukung dengan adanya sistem hukum yang mengatur kegiatan tersebut. Selain itu, lemahnya kualitas sumber daya manusia telah menyebabkan proses partisipatif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Jember merupakan kabupaten pantai dengan potensi perikanan laut yang cukup melimpah. Secara geografis wilayah laut yang dimiliki Jember membentang di sepanjang Pantai Selatan Jawa atau Samudra Indonesia dengan panjang pantai kurang lebih 170 km. Sedang luas perairan Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)

kurang lebih 8.338,5 km², dengan potensi lestari sebesar 40.000 ton per tahun. Potensi yang sangat besar baru sekitar 20% yang telah dimanfaatkan. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya pengelolaan perikanan di wilayah Jember khususnya di Kecamatan Puger sebagai penghasil ikan tangkap laut terbesar di wilayah Jember. Dari sisi kemampuan produksi, masih banyak pengusaha ikan tangkap yang menjual langsung dalam bentuk ikan segar tanpa di olah terlebih dahulu sehingga nilai jual ikan rendah. Sebagian pengusaha ada yang sudah melakukan pengolahan lebih lanjut namun masih dalam bentuk yang sederhana antara lain pemindangan, ikan kering, dan tepung ikan. Pengolahan ikan tangkap menjadi terasi dan kerupuk ikan yang nilai jualnya agak tinggi masih terkendala oleh bahan baku yang sulit dan tidak setiap waktu ada. Wilayah pemasaran mereka masih terbatas di wilayah Jember dan sekitarnya seperti Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang dengan cara dititipkan ke penjual di pasar-pasar di wilayah tersebut. Transaksi seringkali dilakukan dengan hutang dan di bayar setelah terjual semua sehingga perputaran keuangan untuk produksi mereka menjadi kurang lancar. Masalah lain adalah tidak adanya pencatatan akuntansi menyebabkan kesulitan untuk melihat untung rugi dari usaha tersebut dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya.

Kualitas manajerial merupakan kualitas sumber daya manusia didalam mengelola manajemen. Manajemen merupakan seperangkat aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dengan kualitas manajerial yang baik diharapkan akan meningkatkan produktivitas. Kualitas manajerial pengusaha dapat diukur dari kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan latar belakang pendidikan.

Dari sisi latar belakang pendidikan, pemilik dan pekerja masih banyak yang berpendidikan rendah sehingga daya serap mereka terhadap perkembangan teknologi sangat kurang. Hal ini menyebabkan unit pengolahan yang ada kebanyakan masih merupakan pengolahan sederhana (*minimally processed*). Latar belakang pendidikan erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Faktor penentu kualitas sumber daya manusia yang lain adalah pengetahuan, kemampuan, dan tanggungjawab (Supardi, 2008). Faktor-faktor tersebut berperan dalam membentuk kualitas manajerial seseorang yang sangat menentukan tingkat produktivitas usaha. Pengetahuan berhubungan dengan pemahaman terhadap pekerjaan, peraturan, serta perubahan yang terjadi. Kemampuan mengarah pada penilaian persepsi kesesuaian antara kemampuan dan jenis pekerjaan pengusaha didalam menjalankan usaha, sedangkan keterampilan (*skill*) berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar (*basic ability*). Tanpa kualitas manajerial yang memadai, potensi hasil laut yang sangat besar tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dampak nyatanya adalah pengusaha perikanan laut di wilayah tersebut masih terbelenggu dalam kemiskinan karena industri kecil pengolahan hasil ikan tangkap yang mereka tekuni masih belum mampu meningkatkan kemandirian mereka secara ekonomi.

Fokus tujuan artikel ini untuk menguji pengaruh kualitas manajerial terhadap produktivitas usaha agroindustri perikanan laut di Kabupaten Jember. Hipotesis yang diajukan dalam studi ini yaitu semakin baik kualitas manajerial pengusaha dalam mengelola usaha, semakin tinggi pula produktivitas usaha yang dihasilkan.

METODA

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory* untuk menguji keterkaitan antara beberapa variabel yaitu kualitas manajerial dan produktivitas usaha melalui pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 1995:256). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit usaha agroindustri perikanan laut di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Secara kewilayahan, daerah Puger Wetan dan Puger Kulon di Kecamatan Puger merupakan daerah yang memiliki keragaman jenis usaha agroindustri yang lebih banyak

dibandingkan daerah lainnya sehingga lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Puger karena wilayah tersebut memiliki pengusaha agroindustri perikanan laut paling banyak. Sampel penelitian sebanyak 79 responden diperoleh dari penelitian Hadi (2009) yang ditentukan dengan teknik *snowball sampling* karena jumlah populasi unit usaha agroindustri perikanan laut di wilayah tersebut tidak diketahui secara pasti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu yang berupa instrumen penelitian. Instrumen tersebut mencakup seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) kemampuan, (2) pengetahuan, (3) ketrampilan, (4) pendidikan, dan produktivitas usaha. Instrumen tersebut terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Skala yang digunakan dalam instrumen penelitian ini adalah skala Likert (Sekaran, 2006) dan *level of significant* ditetapkan sebesar 10% ($\alpha = 0,10$).

PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Secara umum, agroindustri perikanan laut di Kabupaten Jember tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Puger, Kecamatan Gumuk Mas, Kecamatan Kencong, dan Kecamatan Ambulu. Keberadaan agroindustri perikanan laut di wilayah kecamatan-kecamatan tersebut karena wilayah tersebut merupakan daerah pesisir potensial dalam bidang kelautan dan perikanan. Karakteristik produk perikanan yang secara tradisional tidak tahan lama juga mendorong sebaran agroindustri perikanan berada di sekitar wilayah pesisir tersebut.

Jenis usaha yang mendominasi adalah agroindustri pemindangan, ikan kering, dan terasi. Ketiga jenis usaha agroindustri ini menghasilkan produk yang memiliki potensi permintaan yang relatif besar, terutama di kalangan rumah tangga konsumsi. Sementara, jenis usaha yang lainnya, yaitu agroindustri kerupuk ikan, tepung ikan, dan minyak ikan, merupakan agroindustri menggunakan teknik pengolahan yang lebih kompleks sehingga jenis usaha ini tidak banyak dijalankan masyarakat.

Profil dari agroindustri perikanan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, secara umum untuk latar belakang pendidikan pengusaha agroindustri perikanan masih sangat rendah. 72,15% dari responden memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah. Sementara itu, 27% dari responden pernah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat. Hanya satu responden yang pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Rata-rata jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam suatu usaha agroindustri perikanan di Kabupaten Jember bervariasi menurut jenis usaha. Secara umum, setiap usaha agroindustri perikanan melibatkan sedikitnya 3 orang tenaga kerja hingga 30 orang. Keterlibatan tenaga kerja yang relatif sedikit mengindikasikan bahwa sebagian besar dari usaha agroindustri perikanan merupakan usaha kecil.

Usaha pengolahan ikan laut kebanyakan sudah dijalankan secara turun temurun, bisa dikatakan merupakan usaha keluarga yang diteruskan oleh putra-putrinya. 75% pengusaha sudah menggeluti usaha perikanan laut lebih dari 15 tahun. Sekitar 19,44% sudah dijalankan antara 11 sampai 15 tahun. Dan sisanya sebesar 5,56% menjalankan usaha ini antara 6 sampai 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini telah menjadi tulang punggung perekonomian di Kecamatan Puger sejak lama. Selain itu data ini juga membuktikan bahwa usaha ini prospektif untuk dijalankan.

Hasil uji validitas menunjukkan semua pernyataan valid sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh instrumen memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Uji normalitas dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* dan hasilnya nilai $p > 0,05$ yang berarti data terdistribusi normal. Perumusan model yang telah dikembangkan dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Hasil uji regresi linear berganda untuk penelitian ini seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	2,314	.572	5.143	.000
Kemampuan	.157	.105	-.574	.018
Pengetahuan	.107	.117	.914	.064
Ketrampilan	.254	.107	.332	.041
Pendidikan	-.041	.143	-.290	.673

a. Dependent Variable: Produktivitas

Hasil uji masing-masing pengaruh kualitas manajerial terhadap produktivitas usaha menunjukkan bahwa variabel kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan berdasarkan perhitungan diperoleh nilai signifikansi t sebesar 0,018, 0,064, dan 0,041. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 10% maka disimpulkan bahwa ketiga variabel pembentuk kualitas manajerial tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas usaha pada taraf signifikansi 10%. Satu variabel yaitu latar belakang pendidikan berdasarkan perhitungan diperoleh nilai signifikansi t ($\text{sig.t} = 0.673$) yang lebih besar dari taraf signifikansi 10% ($\text{sig.t} = 0.673 > 0.10$) maka disimpulkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan faktor-faktor kualitas manajerial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha tidak seluruhnya diterima karena hanya variabel kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan yang berpengaruh signifikan sedangkan pendidikan tidak berpengaruh terhadap produktivitas usaha pada agroindustri perikanan laut di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Sedangkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terjadi kolinearitas ganda antar variabel bebas karena semua variabel bebas memiliki nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 atau nilai *tolerance* (TOL) mendekati 1 (Gujarati 2003: 362-363). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser. Hasilnya menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap absolut residualnya ($p > 0,05$) dengan demikian tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas dalam persamaan regresi.

PEMBAHASAN

Menjadi pengusaha perikanan laut bukanlah hal yang alamiah, akan tetapi seorang pengusaha harus memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan tinggi mengenai ikan dan pengolahannya. Kemampuan adalah suatu kondisi yang menunjuk unsur kematangan dalam mengelola suatu usaha. Kemampuan teori maupun praktek seperti halnya bagaimana memilih bahan baku ikan yang bagus wajib dimiliki, karena kemampuan ini menjadi awal menghasilkan produk yang enak dan berkualitas. Dengan ikan yang bagus akan memudahkan dari proses produksi itu sendiri dan menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan adanya peningkatan nilai dari waktu ke waktu, jumlah produksi, pangsa pasar, dan kesejahteraan karyawan.

Gordon (1994:50) menyatakan pengetahuan (*knowledge*) yang diartikan sebagai dasar kebenaran atau fakta harus diketahui dan diterapkan dalam pekerjaan. Pengetahuan yang dimiliki pengusaha ditujukan untuk memahami bagaimana dan kapan bersikap dan bertindak dalam menghadapi berbagai masalah dan penerapan prosedur kerja berdasarkan dari pengetahuan secara teori maupun dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Dengan

demikian semakin tinggi pengetahuan seseorang akan pekerjaannya akan meningkatkan produktivitas yang bisa dihasilkan.

Keterampilan oleh Robbin (2002: 494-495) didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan cepat. Keterampilan dapat dikategorikan menjadi empat yaitu *basic literacy skill*, *technical skill*, *interpersonal skill*, dan *problem solving*. Pada prinsipnya seorang pengusaha khususnya di bidang agroindustri perikanan laut perlu memiliki keahlian dasar (membaca, menulis dan mendengar), keahlian teknik yaitu keahlian seseorang dalam pengembangan teknik yang dimiliki (menghitung secara tepat dan mengoperasikan komputer), keterampilan interpersonal sebagai kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, serta keahlian dalam menyelesaikan masalah yang merupakan proses aktivitas untuk menajamkan logika, berargumentasi dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternative dan menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik. Produktivitas usaha terbukti dipengaruhi oleh tingkat keterampilan pelaku usaha, dimana semakin terampil seorang pengusaha akan mampu membawa perusahaannya memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha agroindustri perikanan laut di Kecamatan Puger. Dengan demikian, latar belakang pendidikan pengusaha tidak memiliki dampak penting dalam kaitannya dengan peningkatan produktivitas usaha. Sesuai dengan fakta dilapang, dengan pendidikan formal yang masih rendah atau tidak sekolah mereka tetap dapat bekerja dengan baik, terjadi pertambahan produksi, pendapatan bersih, dan peningkatan pangsa pasar yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan variabel kualitas manajerial meliputi kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan produktivitas usaha agroindustri perikanan laut di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebaliknya, latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha agroindustri perikanan laut di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk lebih memfokuskan pada pemberian pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pengelolaan usaha agroindustri perikanan laut. Walaupun tingkat pendidikan formal tidak berpengaruh signifikan, factor ini harus tetap diperhatikan sebagai antisipasi perkembangan persaingan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- As'ad, M. 2003. *Psikologi Islami: Seri Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Dahuri, R. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Jakarta. Yayasan Adikarya.
- Dunnete, H., 1976. *Management*. Jakarta: Airlangga.
- Gordon, S. E. 1994. *Systematic training program*. Prentice Hall
- Gujarati, D. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, A. H. 1995. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hadi, P. dkk. 1999. *Model Pengembangan Strategi Pengembangan Strategi Agroindustri Perikanan Berbasis Managerial Clustering Method Di Kabupaten Jember*. Penelitian Stranas. DP2M Kemdiknas

- Husnan, Suad dkk. 1996. *Manajemen Personalia*, Yogyakarta. BPFE
- Iverson, K. M. 2001. *Managing human resources in the hospitality industry: an experiential approach*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Kraiger, K. 1993. *Application of cognitive, skill based and effective theories of learning outcomes to view methods training evaluation*. *Journal of applied psychology*, 28-311.
- Mangkunegara. A.P., 2000. *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Bandung: Rosda.
- Nadler, G. 1986. *Terobosan cara berpikir*. California: Southern University.
- Robbins, S. P., 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Sinungan, M., 2003. *Produktivitas apa dan bagaimana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sumitro. 1998. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta
- Umar, Husein. 2000. *Riset sumber daya manusia dalam organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Pengaruh Kompetensi Kompensasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan

Didik Hadiyatno¹

¹Faculty Of Economics University Balikpapan

E-mail: didikhadiyatno@yahoo.co.Id

Abstrak

Usaha yang dapat dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia adalah bagaimana meningkatkan kemampuan karyawan dengan kompetensi kerja. Begitu juga untuk melaksanakan pekerjaan saling mempengaruhi kepuasan karyawan dapat menentukan hasil kerja. Kedua hal tersebut di atas juga perlu didukung oleh pemberian kompensasi yang memadai sehingga akan menghasilkan kinerja yang optimal. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis pengaruh Kompetensi, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Ciomas Adisatwa di Balikpapan. Pendekatan adalah menggunakan data dari pengedaran survey kuesioner dari karyawan PT Ciomas Adisatwa sebanyak 109 karyawan yang ada di kota Balikpapan yang merupakan karyawan tetap, sedangkan analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk digunakan melihat pengaruh antar variabel dependen dan variabel independen. Temuan- Secara simultan variabel kompetensi, kompensasi, dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, secara parsial kompetensi mempunyai pengaruh terhadap kinerja, kompensasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja, Hal ini sesuai dengan penelitian pendahulunya.

Kata kunci: kompetensi, kompensasi, kepuasan, kinerja

Abstract

Various forms of business can be done to human resource development is how to improve the ability of employees to job competence. So also to carry out the job satisfaction of employees can affect each other to determine the work. Both of these things mentioned above also needs to be supported by adequate compensation so that it will produce optimal performance. The purpose of this paper is to analyze the influence of competency, compensation and employee job satisfaction on the performance of PT Ciomas Adisatwa in Balikpapan. Approach is to use data from the circulation of a questionnaire survey of employees of PT Ciomas Adisatwa in Balikpapan as many as 109 employees which is a permanent employee, while the analysis used by using multiple linear regression analysis to be used to see the influence of inter-dependent variables and independent variables Simultaneously, the findings of variable competence, compensation, job satisfaction dams have an influence on employee performance, competence has partially on performance, compensation have an influence on employee performance and job satisfaction have an effect on performance, This is consistent with its predecessor.

Key words: competence, compensation, satisfaction and performance

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia mempunyai posisi yang sangat penting mengingat kinerja organisasi sangat di pengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. selain itu sumber daya alam yang berkualitas tinggi bermanfaat dalam penyesuaian gerak atas perubahan iklim usaha yang begitu cepat. Bila suatu perusahaan telah mempunyai strategi dan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan sumber daya manusia apa saja yang di perlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kinerja merupakan suatu hasil yang ingin di capai oleh setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Organisasi yang baik ialah organisasi yang telah mampu menciptakan kinerja yang baik. Untuk mencapai kinerja yang baik, diperlukan karyawan yang mempunyai daya kerja yang tinggi untuk mengantisipasi peluang dan tantangan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka pengelolaan sumber daya manusianya harus di arahkan untuk menjadi pemikir dan penentu jalannya perusahaan serta menjadi pelaksana bagi kelangsungan usaha secara berkesinambungan.

Berbagai bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia adalah bagaimana meningkatkan kemampuan karyawan dengan kompetensi kerja. Begitu juga untuk melaksanakan pekerjaan saling mempengaruhi kepuasan karyawan dapat menentukan hasil kerja. Kedua hal tersebut di atas juga perlu didukung oleh pemberian kompensasi yang memadai sehingga akan menghasilkan kinerja yang optimal. Pemberian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman ataupun perubahan sikap individu yang pada akhirnya akan berdampak prestasi kerja karyawan.

Kepuasan kerja merupakan hal yang sangat personal, artinya yang paling dapat merasakan hanyalah yang bersangkutan saja dan sifatnya tidak selalu sama antara orang yang satu dengan orang yang lain, maka dari itu kepuasan kerja perlu diperhatikan oleh organisasi karena kepuasan kerja merupakan kriteria untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Jelas manusia sebagai sumber daya mempunyai peranan yang sangat penting dalam merealisasikan kesuksesan suatu organisasi sebab meskipun sumber daya lainnya seperti modal sistem kerja yang bagus, peralatan yang canggih dan sebagainya, tanpa adanya tenaga kerja yang handal, mekanisme kerja tidak akan berjalan dengan baik. Namun dilain pihak individu-individu itu mempunyai tujuan tertentu pula yaitu untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya.

Kebutuhan manusia banyak jenisnya dan masing-masing manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda dan selalu berubah. Suatu organisasi akan berjalan lancar bila semua jasa yang disumbangkan para individu kepada organisasi mendapat perhatian dan imbalan yang seimbang. Betapapun sempurnanya rencana-rencana, organisasi dan pengawasan, bila mereka tidak dapat menjalankan tugasnya dengan minat dan gembira maka suatu perusahaan tidak akan mencapai hasil sebanyak yang sebenarnya dapat dicapai. Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa manusia beserta kepuasan kerja berperan dalam mencapai prestasi yang diharapkan. Ketidakpuasan atau tingkat kepuasan yang rendah pada karyawan bisa mengakibatkan ketidak lancaran organisasi karena tidak termotivasinya mereka untuk berbuat yang terbaik untuk organisasi, sebaliknya karyawan yang memperoleh kepuasan dalam bekerja akan menimbulkan motivasi diri untuk bertindak mencapai prestasi individu yang juga akan berakibat pada kemajuan organisasi.

METODA

Penelitian ini termasuk jenis penelitian penjelasan (*explanatory research*), yang akan menjelaskan hubungan kausal antara ketiga variabel kompetensi, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja.

Tujuannya untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel kompetensi, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan yang terdiri dari:

1. Data atau informasi yang dibutuhkan dapat didefinisikan dengan jelas.
2. Proses penelitian secara formal dan terstruktur.
3. Sampel yang digunakan cukup besar. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 109 (Seratus sembilan) menggunakan teknik sloving
4. Teknik analisis datanya menggunakan teknik kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan teknik Regresi berganda

1. Populasi

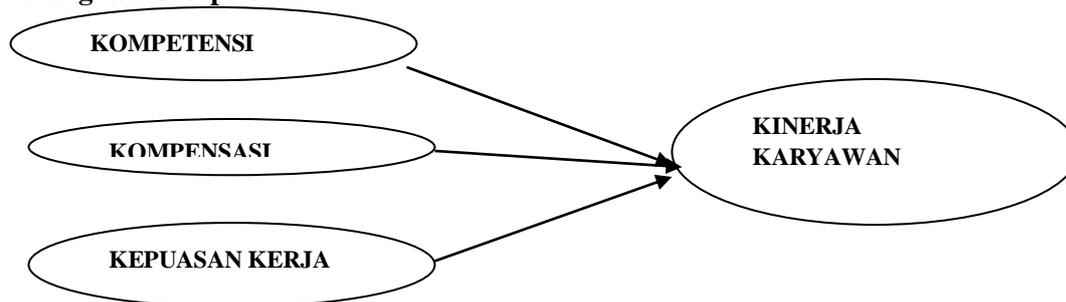
Populasi dalam penelitian ini menurut jenisnya merupakan populasi yang terbatas dan menurut sifatnya merupakan populasi yang homogen. Dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan, yang berjumlah sebanyak 150 orang karyawan.

2. Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang diambil diharapkan dapat menggambarkan hasil yang sesungguhnya dari populasi. Dan penulis menggunakan pendapat Slovin dalam menentukan jumlah sampel dalam bukunya Husein (2000:146) sebanyak 109 orang responden.

Dari perhitungan tersebut diketahui sampel yang diambil sebanyak 109 karyawan yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

1. Diduga variabel Kompetensi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan?
2. Diduga variabel Kompensasi mempunyai pengaruh terhadap Kinerja karyawan PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan?
3. Diduga variabel Kepuasan Kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan?
4. Diduga variabel, kompetensi, kompensasi dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan?

Alat Analisis Dan Pengujian Hipotesis

Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk regresi linier berganda (*Multiple Regression Linier*). Model analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya, dalam hal ini meliputi kompetensi, kompensasi, dan kepuasan kerja, dengan kinerja karyawan PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan.

Dan spesifikasi dari model regresi linier berganda menurut Sugiarto dan Harijono (2000:57), sebagai berikut : $Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e_i$.

Dimana :

Y = Kinerja Karyawan

b_0	=	Konstanta
X_1	=	Kompetensi
X_2	=	Kompensasi
X_3	=	Kepuasan Kerja
b_1, b_2, b_3	=	Koefisien arah regresi
e_i	=	Variabel pengganggu diluar model

Hasil Penelitian

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini digunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan *Metode Regresi Linier Berganda* akan dilakukan Uji simultan atau uji F dan uji parsial atau Uji t. Adapun pada proses pengolahan data dan perhitungan-perhitungan yang ada dilaksanakan dengan program computer dengan menggunakan SPSS versi 17,0 dari Santoso (2009) dan printout dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel : 5.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig	r ²
	B	Std. Error			
(Constant)	1,606	1,500	1,071	0,287	
Kompetensi (X ₁)	0,199	0,069	2,864	0,005	0,569
Kompensasi (X ₂)	0,144	0,068	2,653	0,015	0,564
Kepuasan kerja (X ₃)	0,677	0,060	11,377	0,000	0,743
R = 0,833		F hit = 79,575			
R Square = 0,695		F tab. = 3,9412			
Adjusted R Square = 0,686		t tab. = 1,96			

Sumber : Lampiran 5

Perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan program *computer SPSS for Windows* versi 17,0 terhadap data yang telah ditentukan dalam penelitian dengan model persamaan :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i.$$

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis output SPSS, didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,606 + 0,199 X_1 + 0,144 X_2 + 0,677 X_3.$$

Koefisien constanta (b_0) sebesar 1,606 mengidentifikasi bahwa bila tidak ada variabel kompetensi (X_1), kompensasi (X_2), dan kepuasan kerja yang mempengaruhi, maka kinerja karyawan yang dapat dicapai adalah sebesar 1,606.

Hubungan variabel kompetensi (X_1) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan di lihat dari nilai koefisien b_1 sebesar 0,199 menunjukkan adanya hubungan yang searah, artinya peningkatan variabel kompetensi (X_1) sebesar satu-satuan akan meningkatkan kinerja karyawan (Y) pada PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan sebesar 0,199 satuan dengan asumsi kompensasi (X_2), dan kepuasan kerja dalam keadaan konstan.

Hubungan variabel kompensasi (X_2) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan di lihat dari nilai koefisien b_2 sebesar 0,144 menunjukkan adanya hubungan yang searah, artinya peningkatan variabel kompensasi (X_2) sebesar satu-satuan

akan meningkatkan kinerja karyawan (Y) pada PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan sebesar 0,144 satuan dengan asumsi kompetensi (X_1), dan kepuasan kerja dalam keadaan konstan. Hubungan variabel kepuasan kerja (X_3) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan di lihat dari nilai koefisien b_3 sebesar 0,677 menunjukkan adanya hubungan yang searah, artinya peningkatan variabel kepuasan kerja (X_3) sebesar satu-satuan, maka pada rata-ratanya akan meningkatkan kinerja karyawan (Y) pada PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan sebesar 0,677 satu-satuan dengan asumsi kompetensi (X_1) dan kompensasi (X_2) dalam keadaan konstan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis 1 Pengaruh Variabel Kompetensi (X1) terhadap Kinerja Karyawan PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan.

Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel kompetensi (X_1) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan, dilihat dari nilai koefisien korelasi parsial (r^2) sebesar 0,569 atau 56,9%, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara variabel kompetensi (X_1) dengan kinerja karyawan. Dengan nilai t hitung sebesar 2,864 > t tabel 1,96 dan nilai Sig t sebesar 0,005 < 0,05, yang berarti terbukti adanya hubungan yang signifikan bahwa variabel kompetensi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis ini senada dengan temuan Widyatmini(2008), Desler (2004) PFeffer (2003)

Pengujian Hipotesis 2 Pengaruh Variabel Kompensasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan

Hasil temuan menunjukkan pengaruh variabel kompensasi (X_2) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan, dilihat dari nilai koefisien korelasi parsial (r^2) sebesar 0,564 atau 56,4%, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara variabel kompensasi (X_2) dengan kinerja karyawan. Dengan nilai t hitung sebesar 2,653 > t tabel 1,96 dan nilai Sig t sebesar 0,015 < 0,05, yang berarti terbukti adanya hubungan yang signifikan, bahwa variabel kompensasi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Senada dengan hasil penelitian Wahyudin (2002) Mathis & Jackson (2002) Desler (2004)

Pengujian Hipotesis 3 Pengaruh Variabel Kepuasan kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan PT Ciomas Adisatwa Balikpapan

Hasil temuan menunjukkan pengaruh variabel kepuasan kerja (X_3) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan, dilihat dari nilai koefisien korelasi parsial (r^2) sebesar 0,743 atau 74,3%, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel kepuasan kerja (X_3) dengan kinerja karyawan. Dengan nilai t hitung sebesar 11,377 > t tabel 1,96 dan nilai Sig t sebesar 0,000 < 0,05, yang berarti terbukti adanya hubungan yang signifikan, bahwa variabel kepuasan kerja (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Senada dengan hasil penelitian Keke (2005) Siagian (2003) Steers (1995)

Berdasarkan hasil perbandingan uji t, secara parsial variabel kepuasan kerja (X_3) yang mempunyai nilai t hitung terbesar dibanding t hitung variabel lainnya (11,377 > t tabel 1,96 dan nilai Sig t sebesar 0,000 < 0,05). Berarti variabel bebas kepuasan kerja (X_3) mempunyai pengaruh yang *dominan* terhadap kinerja karyawan pada taraf signifikansi 5%, pada karyawan PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan.

Pengujian Hipotesis 4 Pengaruh Simultan variabel, Kompetensi, Kompensasi dan Kepuasan Kerja karyawan PT, Ciomas Adisatwa Balikpapan.

Hasil temuan berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh nilai R sebesar 0,833, R Square sebesar 0,695, dan Adjusted R Square sebesar 0,686. Nilai R sebesar 0,833, hal ini berarti bahwa hubungan dari berbagai variabel bebas (X) terhadap variabel terikat

(Y) adalah erat sebesar 0,833 (mendekati 1). Dan nilai R Square sebesar 0,695 atau 69,5% artinya variasi naik turunnya variabel Y (kinerja karyawan) sebesar 69,5% merupakan pengaruh dari variasi turun-naiknya variabel kompetensi (X_1), kompensasi (X_2), dan kepuasan kerja (X_3) secara bersama-sama. Sedangkan sisanya 30,5% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui, atau belum dimasukkan dalam persamaan regresi linier.

Dilihat dari tabel Anova diperoleh nilai F hitung sebesar 79,575 lebih besar daripada F tabel sebesar 3,9412 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil daripada taraf signifikansi = 0,05. Berarti hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh (H_0) ditolak, menolak H_0 berarti menerima H_a . Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi, kompensasi, dan kepuasan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y (kinerja karyawan) pada PT. Ciomas Adisatwa. Dengan kata lain, model regresi linier berganda dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan.

KESIMPULAN

Temuan secara Teoritis

Temuan ini membawa implikasi secara teoritik bahwa kompetensi, kompensasi dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan dapat dijadikan sebagai alat motivator bagi karyawan PT Ciomas Adisatwa Balikpapan, demikian hal dengan peningkatan kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang akan dalam meningkatkan kinerja karyawan yang lebih baik sesuai dengan tujuan individu dan tujuan organisasi. Dengan demikian studi ini mendukung teori/ temuan Robbin (1996), Rue dan Byras (1989), Kirl L Rongga (2001) Robbin (2003) Gitosudarsono (2001), Kinichi (2003) Porter and Lower (dalam kinichi 2003)

Temuan Empiris

1. Variabel Kompetensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Ciomas Adisatwa Balikpapan, dengan demikian maka hipotesis pertama (H_1) terbukti kebenarannya.
2. Variabel Kompensasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan, dengan demikian hipotesis kedua (H_2) terbukti kebenarannya.
3. Variabel Kepuasan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Ciomas Adisatwa Balikpapan, maka hipotesis ketiga (H_3) terbukti kebenarannya.
4. Variabel Kompetensi, kompensasi, dan kepuasan kerja secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan maka hipotesis keempat (H_4) terbukti kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Nur, Dan Masyhuri, 2009, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Penerbit UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), Malang.
- Arbain, 2008, *Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser*, Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Hadi, Sutrisno, 2004, *Statistik*, Jilid 2, Penerbitan Andi, Yogyakarta.
- Mariani, Madjid, 2004, *Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Laboratorium Produksi PT. PERTAMINA (Persero) Unit Pengolahan V Balikpapan*, Mahasiswa Pasca Sarjana (S-2) Universitas DR. Soetomo Surabaya.

- Muslim, Khairul, 2008, *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, USU*, <http://responsitory.usu.ac.id/handle/123456789/4285>.
- Ruky, Achmad S., 2004, *Sistem Manajemen Kinerja*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Santoso, Singgih, 2009, *Statiscal Package for Social Sciences (SPSS) 17,0 for Windows*, Penerbit PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2004, *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Wisnu, Wardhana, 2008, *Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan*, Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas 17 Agustus Surabaya.

Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok

Fitri Amalia¹

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: y3amalia@gmail.com

Abstrak

Konsep pasar seperti pada zaman Nabi Muhammad saw diterapkan pada Pasar Madinah. Pasar Madinah lebih dikenal dengan nama Bazaar Madinah merupakan jenis pasar yang menjalankan kegiatan perdagangan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan etika bisnis Islam selalu dipantau oleh badan pengawas, sehingga hal-hal yang melanggar nilai, prinsip maupun etika Islam oleh para pedagang dapat dihindari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam bagi para pedagang di Bazaar Madinah Depok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan metode survei. Penelitian yang dilakukan berupa deskriptif menggunakan studi literatur serta mengambil data primer dalam bentuk pengisian kuesioner dan wawancara. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur etika bisnis Islam, yaitu meliputi empat aspek: prinsip, manajemen, marketing/iklan dan produk/harga. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang di Bazaar Madinah Depok.

Kata kunci: etika bisnis Islam, Bazaar Madinah, prinsip-prinsip syariah

Abstract

Market concept as in the time of Prophet Muhammad applied to the Pasar Madinah. Pasar Madinah or which currently known as the Bazaar Madina, is running a trading activity based on Shariah principles. Implementation of islamic business ethics is always monitored by a supervisory agency, so that things that violate value , principle and ethics islamic by traders can be avoided .The purpose of this research is to know how the implementation of Islamic business ethics for the seller/ trader in the Bazaar Madinah Depok. This research is the kind of case study research by the method of survey. Research conducted in the form of a descriptive study using literature as well as take primary data in the form of filling the questionnaires and interviews. There are some indicators that can be used to measure the islamic business ethics, which includes four aspects: principles, management, marketing/advertising and product/price. The respondents had to be in this research is all seller/ traders in the Bazaar Madinah Depok .

Keyword: Islamic business ethics, bazaar madinah, shariah principles

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian Islam., pasar memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah sangat menghargai harga yang adil yang terbentuk di pasar. Karena ini dalam islam, nilai-nilai moralitas yang meliputi kejujuran, keadilan dan keterbukaan sangat diperlukan dan menjadi tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan dari keimanan seorang muslim kepada Allah. Bahkan Rasulullahpun tidak menyukai transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas. Implementasi nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar, artinya setiap pedagang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam bukan sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga keberkahan.

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Prilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka/ ruang lingkup bisnis.

Bersama dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam bisnis. Sesungguhnya dalam hal seluruh pelaksanaan kehidupan telah di atur dalam pandangan ajaran Agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan). Islam di segala aspek kehidupan termasuk didalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat.

Penerapan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar. Dalam Islam, pasar merupakan tempat transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoretis maupun praktis Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah. Hal inilah yang dicoba untuk diterapkan di Bazar Madinah. Bazar (pasar) Madinah merupakan suatu konsep pasar Islam yang didalamnya ditumbuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim namun juga non muslim. Disini setiap pedagang yang ingin berjualan tidak dihadapkan pada syarat-syarat yang memberatkan seperti contohnya bayar sewa, tetapi diberi kemudahan asalkan mereka menyetujui aturan atau nilai-nilai Islam yang berlaku di pasar tersebut. Dalam menjalankan kegiatannya, para pedagang juga diawasi oleh badan pengawas dan tentunya kegiatan yang dilakukan tidak melupakan aturan, norma dan nilai yang tertuang sebagai etika bisnis Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah konsep pasar secara Islam dan etika bisnis Islam. Serta sejauh mana implementasi etika bisnis Islam pada pedagang di Bazar Madinah Depok.

METODA

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode survei pada seluruh pedagang di Bazar Madinah Depok. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah etika bisnis Islam yang diprosikan dengan beberapa indikator seperti: Prinsip, Manajemen, Produk dan Harga. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari pemilik usaha (owner) dan karyawan.

Penelitian yang dilakukan berupa deskriptif dengan menggunakan studi literatur serta mengambil data primer dalam bentuk pengisian kuesioner sebanyak 35 butir pertanyaan dan wawancara. Beberapa hal pertanyaan yang diajukan terkait dengan penerapan etika bisnis Islam di tempat yang menjadi objek penelitian. Pertanyaan tersebut meliputi empat aspek yaitu: Prinsip (10 butir), Manajemen (15 butir), Produksi (5 butir) dan Harga (5 butir). Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data diolah secara tabulasi untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN

Islam menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang sah, halal dan ideal. Meskipun terdapat persaingan, pasar dalam Islam tetap ditumbuhi dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan sehat, dimana persaingan sehat tersebut tetap menempatkan nilai dan moralitas Islam. Ibn Taymiyyah menyebutkan bahwa ada beberapa karakteristik atau ciri pasar yang Islami, antara lain: adanya kebebasan bagi setiap orang untuk keluar masuk pasar, tidak ada monopoli, adanya informasi yang cukup, tidak ada sumpah palsu, kecurangan dalam takaran dan tidak adanya penjualan barang yang diharamkan. Ajaran Islam menjunjung tinggi kebebasan individu, tetapi yang dibatasi oleh nilai syariah dan mengarah pada kerjasama dan bukan pada persaingan yang mematikan.

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlak al islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnaturnasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.

Istilah bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijarah*, berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajran wa tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus al-munawwir). Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al-mufradat fi gharib al-Qur'an*, *at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, *fulanun tajirun bi kadza*, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.

Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas (Ijtihad) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Ada beberapa ayat di dalam Al Qur'an yang berbicara mengenai bisnis, diantaranya: Al-Baqarah (282); An-Nisaa (29); At-Taubah (24); An-Nur (37); Fatir (29); As-Shaff (10) dan Al-Jum'ah (11).

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalankan usaha, diantaranya:

1. Proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib.
2. Rezeki yang dicari haruslah rizki yang halal.

3. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha.
4. Semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
5. Bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
6. Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara fair dan sehat (*fastabikul al-khayrat*).
7. Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan.
8. Menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang, sekalipun keluarga sendiri.

Dan dalam bertransaksi secara syari'ah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni: saling ridha (*'An Taradhin*), bebas manipulasi (*Ghoror*), aman/tidak membahayakan (*Mudharat*), tidak spekulasi (*Maysir*), tidak ada monopoli & menimbun (*ihthikar*), bebas riba, dan halalan thayyiban.

Para pelaku bisnis atau disebut juga sebagai pelaku usaha ataupun wirausaha merupakan orang ataupun sekelompok orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Cara berpikir seorang wirausaha adalah selalu berusaha mencari, memanfaatkan peluang usaha yang dapat memberi keuntungan.

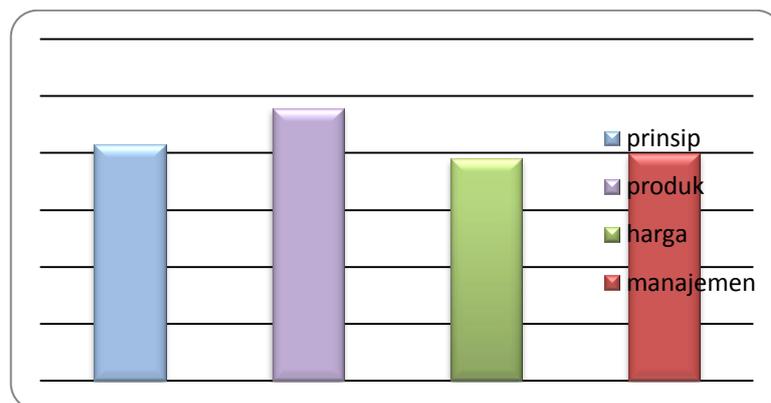
Dalam Al Qur'an, semangat kewirausahaan ada dalam QS. Hud: 61, QS. Al-Mulk: 15, dan QS. Al-Jumu'ah: 10, QS. Al-Anbiya: 125, QS. Ar-Ra'du:11) dimana manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik serta diperintahkan berusaha untuk mencari rizki. Sedangkan dalam Hadits semangat kewirausahaan juga tercermin sebagai berikut: HR.Bukhari; HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah; HR.Ahmad; HR.Al-Bazzar.

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 11 orang pedagang sebagai responden, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 83% para pedagang di Bazar Madinah sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya. Beberapa prinsip Islam yang dimaksud seperti: prinsip amal ma'ruf nahi munkar, prinsip halal-haram, kejujuran, keterbukaan, keadilan, saling percaya dan kekeluargaan. Sementara hanya sebagian kecil, sekitar 17% dari responden yang masih belum menerapkan etika bisnis Islam ini.
2. Hampir seluruh pedagang di Bazar Madinah, yakni sebesar 96% didalam kegiatan produksi sudah menjalankan sesuai syariat Islam, seperti dalam hal menjual barang sesuai syariah Islam yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Dan tentunya dalam kegiatan produksi tidak mengenyampingkan aspek lingkungan. Setiap individu memiliki kewajiban untuk ikut mensejahterakan lingkungan sosialnya yang dimulai dari lingkungan terdekat mulai dari kerabat, tetangga sampai masyarakat. Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat menurut Satyanugraha (2003) yang dikutip dalam Sofyan adalah: tidak merusak lingkungan, menjamkin keselamatan masyarakat yang ada disekitarnya serta harus berdampak positif kepada masyarakat.
3. Untuk sistem harga, sebanyak 78% pedagang di Bazar Madinah sudah menerapkan sistem harga sesuai yang disyariatkan. Hal ini tampak pada harga yang diberikan pada konsumen yang tidak berlebihan, tidak mengambil untung berlebihan (riba) dan tidak memonopoli harga maupun monopoli barang sehingga persaingan yang tidak sehat antar pedagang tidak ditemukan, sebab di sini pedagang menjual makanan yang berbeda dengan pedagang lainnya.
Dalam Islam rekayasa harga adalah suatu hal yang dilarang. Rasulullah saw menyatakan bahwa harga di pasar ditentukan oleh Allah. Ketentuan harga diserahkan pada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal. Namun ketika pasar dalam keadaan tidak sehat,

seperti adanya kasus penimbunan, riba, penipuan dan praktek kezaliman, maka pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan harga. Teori harga menurut pendekatan Islam seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah (661-728 H/ 1263-1328 M) serta Ibnu Khaldun (732-806 H/ 1332-1404 M) bahwa harga ditentukan oleh mekanisme pasar, mulai dari *needs, distribution, demand and supply*, bukan hasil dari *intervention* dan *involvement* pihak lain, pemilik modal (produsen) dan pemerintah.

- Manajemen secara syariah Islam sudah diimplementasikan oleh sekitar 80% dari para pedagang di bazar madinah. Ada tiga aspek manajemen yang dinilai, yakni manajemen sumber daya manusia (SDM), manajemen keuangan serta pemasaran. Dalam perusahaan, pihak yang bertanggung jawab adalah manajemen, sehingga sulit untuk memisahkan antara manajemen dan perusahaan. Dalam Islam, manusia diciptakan oleh Allah swt untuk memakmurkan bumi sehingga disebut sebagai khalifah. Menurut Effendy ada beberapa prinsip manajemen Islami: prinsip amal makruf nahi munkar, kewajiban menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan dan menyampaikan amanat. Sementara masih menurut sumber yang sama, yang menjadi ciri-ciri manajemen Islam, antara lain: manajemen berdasarkan akhlak luhur (akhlakul karimah), terbuka, demokratis, berdasarkan ilmu, tolong menolong (ta'awun) dan berdasarkan perdamaian.



Gambar 1. Hasil Kuesioner (diolah)

KESIMPULAN

Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karenanya, segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal baik dan buruk, yang halal dan yang haram. Etika bisnis Islam juga diterapkan pada para pedagang sehingga apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan (profit) sebagai tujuan duniawi saja, melainkan juga untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah swt atas apa yang diusahakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji kepada Allah swt, karena dengan rahmat dan izinNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan paper ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian paper ini, terutama bagi para pedagang Bazar Madinah yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya untuk mengisi angket

dan bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis terkait dengan paper ini. Semoga paper ini bisa memberikan manfaat bagi diri penulis sendiri maupun bagi pihak yang berkepentingan terutama pelaku bisnis untuk bisa menerapkan sisi etika dalam kegiatan yang dijalankannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Haidar. 2010. *Etika Bisnis: Antara Spiritualitas, Moralitas dan Hukum Ekonomi; Sebuah Pointer*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Etika Bisnis Islam. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ermawati, Tuti. 2006. *Kewirausahaan dalam Islam*. LIPI. Jakarta
- Harahap, Sofyan S. 2010. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Salemba Empat, Jakarta
- Jalil, Abdul, et al. *Implementation Mechanism of Ethics in Business Organizations*. International Business Research. Vol. 3, No. 4; October 2010. www.ccsenet.org/ibr
- Mujahidin, Akhmad. 2005. Etika Bisnis dalam Islam (Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis). *Hukum Islam*. Vol. IV No.2 Desember 2005
- Mustaq, Ahmad. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta.
- Rice, Gillian. 1999. *Islamic Ethics and the Implications for Business*. *Journal of Business Ethics* 18: 345-358. Kluwer Academic Publisher: Netherlands.
- Yahya, Nilzam. *Sistem Ekonomi Islam (Studi Atas Pemikiran Imam Al Ghazali)*. LIPI. Edisi 7. Vol IV, April 2008.

Pembelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia Menggunakan Teknologi Open Source

Helmi Buyung Aulia Safrizal¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Email : helmi.safrizal@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pihak manajemen perusahaan berusaha mengikuti perubahan ini jika ingin perusahaannya tetap dapat bertahan dan semakin meningkat kinerjanya. Salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam bentuk sistem informasi sumber daya manusia. Dewasa ini banyak bermunculan software sistem informasi sumber daya manusia yang bersifat open source. Salah satunya adalah orangeHRM. Penggunaan software orangeHRM dalam pembelajaran manajemen sumber daya manusia akan lebih meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang aktivitas yang terjadi dalam manajemen sumber daya manusia serta bagaimana keterkaitannya antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Sedangkan manfaat lainnya adalah adanya tambahan pengalaman praktis melalui studi kasus yang diberikan membuat mahasiswa lebih mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi pada pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan.

Kata kunci : sistem informasi sumber daya manusia, open source, orangeHRM

Abstract

The development of information technology bring major changes in people's lives. The management of the company tried to follow these changes if they want their company can survive and increase its performance. One is the use of information technology in the human resources management in the form of human resources information systems. Today many emerging software human resource information system that is open source. One is OrangeHRM. The use of OrangeHRM software in the learning of human resource management will enhance students' understanding of the activities that occur in human resource management and how the linkages between the activities with other activities. Another benefit is additional practical experience through case studies provided and make students more aware of the actual conditions that occur in human resource management within the organization

Keywords: human resource information system, open source, orangeHRM

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan tidak lepas dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran membutuhkan media untuk menyalurkan materi pembelajaran. Media berasal dari bahasa latin “medium” yang berarti perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Media juga merupakan saluran komunikasi. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran (Schramm, 1977:22). Sementara itu, Briggs (1977:87) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Sedangkan, *National Education Assocation* (1969) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun *audio-visual* dan termasuk teknologi perangkat keras. Terdapat berbagai jenis media pembelajaran, diantaranya:

1. *Media Visual* : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik
2. *Media Audio* : radio, tape recorder, laboratorium bahasa dan sejenisnya
3. *Projected still media* : *slide*; *over head proyektor (OHP)*, *in focus* dan sejenisnya
4. *Projected motion media* : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), komputer dan sejenisnya.

Schramm (1977) mengemukakan beberapa fungsi media pembelajaran sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan belajar yang lebih luas sampai kepada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang mungkin dapat dicapai dengan tanpa media.
2. Membantu guru/tutor dalam menyusun program pembelajaran agar menjadi lebih efektif.
3. Sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses pembelajaran.
4. Memberikan pengalaman tanpa wahana abstrak

Salah satu Teori penggunaan media dalam proses pembelajaran adalah *Dale's Cone of Experience* (Dale, 1969). Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung (konkrit) yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak). Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media untuk menyampaikan pesan informasi.



Gambar 1. *Dale's Cone of Experience* (1969)

Levie & Levie (1975) yang mereview hasil-hasil penelitian tentang belajar melalui stimulus gambar dan stimulus kata atau visual dan verbal menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali dan menghubungkan fakta dengan konsep. Perbandingan perolehan hasil belajar melalui indera pandang dan indera dengar sangat menonjol perbedaannya. 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang dan hanya 5% diperoleh melalui indera dengar serta 5% lagi dengan indera lainnya (Baugh dalam

Achsin, 1986). Sementara itu Dale (1969) memperkirakan bahwa hasil belajar yang diperoleh melalui indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengar sekitar 13% dan melalui indera lainnya sekitar 12%.

Media pembelajaran saat ini semakin banyak yang menggunakan teknologi komputer. Media pembelajaran yang dioperasikan melalui komputer memiliki kelebihan : memungkinkan terjadinya interaksi mahasiswa dengan materi pelajaran, proses belajar secara individual sesuai dengan kemampuan mahasiswa, menampilkan unsur *audio-visual*, dapat langsung memberikan umpan balik dan menciptakan proses belajar yang berkesinambungan. Sedangkan kelemahannya adalah seringkali peralatan untuk memanfaatkannya masih mahal dan perlu keterampilan khusus untuk mengoperasikannya. Salah satu cara untuk mengurangi biaya dalam pemanfaatan media komputer dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan teknologi *software Open Source*.

Free software (perangkat lunak bebas) atau *open source software* (perangkat lunak sumber terbuka) adalah program yang lisensinya memberi kebebasan kepada pengguna menjalankan program untuk apa saja, mempelajari dan memodifikasi program, dan mendistribusikan penggandaan program asli atau yang sudah dimodifikasi tanpa harus membayar royalti kepada pengembang sebelumnya (Wheeler, 2007). Ada dua filosofi pokok *free open source software* (FOSS) yaitu filosofi dari FSF (*Free Software Foundation*) atau Yayasan Perangkat Lunak Bebas dan filosofi dari OSI (*Open Source Initiative*) atau Inisiatif Sumber Terbuka. FSF merupakan pendahulu dalam gerakan FOSS ini. Menurut FSF perangkat lunak bebas mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarkan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Lebih jauh hal ini mengacu pada empat jenis kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak, yaitu:

1. Kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja (kebebasan 0).
2. Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna (kebebasan 1). Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat.
3. Kebebasan untuk menyebarkan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama pengguna (kebebasan 2).
4. Kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkannya ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya (kebebasan 3). Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat.

Filosofi OSI agak berbeda. Ide dasar *open source* sangat sederhana. Jika para pemrogram dapat mempelajari, mendistribusikan ulang, dan mengubah kode sumber sebagian perangkat lunak maka perangkat lunak itu akan lebih berkembang. Masyarakat dapat mengembangkannya, mengaplikasikannya dan memperbaiki kelemahannya. OSI difokuskan pada nilai-nilai teknis dalam pembuatan perangkat lunak yang berdaya guna dan dapat diandalkan. Pendekatan istilah OSI ini lebih sesuai kebutuhan bisnis daripada filosofi FSF. OSI tidak terlalu fokus pada isu moral seperti yang ditegaskan FSF dan lebih fokus pada manfaat praktis dari metoda pengembangan terdistribusi dari FOSS. Meskipun filosofi dasar kedua gerakan ini berbeda, FSF dan OSI berbagi area yang sama dan bekerja sama dalam hal hal praktis, seperti pengembangan perangkat lunak, usaha melawan perangkat lunak *proprietary*, paten perangkat lunak, dan sejenisnya.

METODA

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik

fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72).

PEMBAHASAN

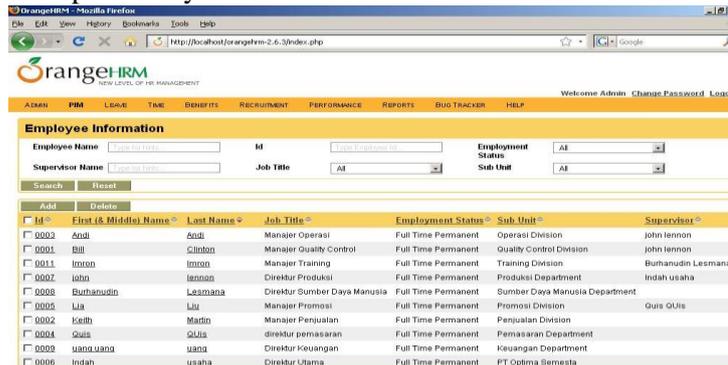
Dalam rangka mendapatkan suatu media pembelajaran komputer yang hemat biaya maka digunakan media pembelajaran komputer dengan berbasis teknologi *open source* dengan dukungan *hardware* yang minimum. Dewasa ini banyak bermunculan software sistem informasi sumber daya manusia yang bersifat *open source*. Salah satunya adalah orangeHRM. OrangeHRM merupakan sistem informasi pengelolaan sumber daya manusia berbasis *Web. Script* yang dibuat dengan menggunakan PHP sehingga menghasilkan halaman Web yang dinamis. Sedangkan jenis database yang digunakannya adalah MySQL. Selain itu dibutuhkan Apache HTTP *Server* agar software dapat dijalankan di *web*. PHP, MySQL dan Apache juga merupakan *software open source*. Ketiga software open source ini dapat dijalankan pada satu komputer secara bersamaan sehingga meminimalkan kebutuhan *hardware* komputer.

OrangeHRM tersusun atas modul-modul sebagai berikut:

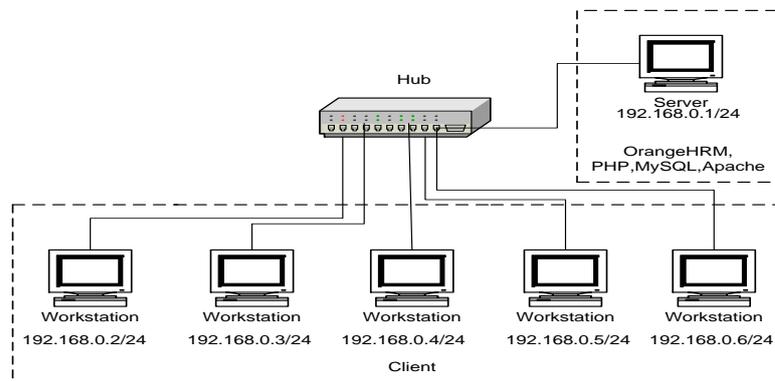
1. Modul *Admin*. Modul ini merupakan salah satu bagian dari sistem dimana manajer sumber daya manusia atau personil yang ditunjuk menjalankan semua tugas administrasi sistem. Modul ini meliputi pendefinisian stuktur perusahaan, golongan gaji, proyek yang dijalankan dan informasi lain sebagai tulang punggung dari seluruh sistem. Keamanan sistem dapat diatur melalui modul ini dalam bentuk penetapan otorisasi pengguna.
2. Modul *PIM (personal information module)*. Modul ini mengelola semua informasi terkait karyawan yang relevan termasuk didalamnya berbagai jenis informasi pribadi, rincian kualifikasi dan pengalaman kerja, informasi yang terkait dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Informasi yang ditampung dalam modul ini dimanfaatkan oleh modul-modul lainnya.
3. Modul *Leave*. Sebuah modul pengelolaan cuti yang komprehensif dengan kemungkinan yang luas untuk mendefinisikan berbagai jenis cuti, libur perusahaan dan lain-lain. Modul ini menyediakan semua proses pengajuan cuti dan proses persetujuannya. Selain itu, modul ini dapat menampilkan informasi tentang hak cuti, sisa cuti, riwayat cuti dan lain sebagainya. Konsep berbasis web dan pelayanan mandiri (*self-service*) ini menyederhanakan berbagai prosedur cuti yang saling berhubungan, mengurangi pekerjaan administratif, menghemat kertas dan biaya
4. Modul *Time*. Modul ini mengotomatisasi proses yang terkait dengan penelusuran waktu kerja. Modul ini membantu mencapai efisiensi dalam mengelola data tenaga kerja dan meningkatkan pengelolaan angkatan kerja. Modul ini memberikan kemudahan bagi karyawan untuk mendefinisikan dan mengisi jadwal kerja mereka sendiri yang dapat diterima/ditolak dan dimodifikasi oleh atasan mereka. Modul ini memiliki fungsionalitas untuk menelusuri kehadiran karyawan, dimana karyawan dapat memasukkan waktu hadir kerja (*punch in*) dan waktu pulang kerja (*punch out*). Melalui modul waktu kerja ini karyawan dapat jam kegiatan (*time events*) yang terkait dengan proyek tertentu dimana mereka bekerja dan administrator proyek dapat mengelola proyek dengan mudah melalui fungsionalitas yang ditawarkan melalui item laporan proyek.
5. Modul *Benefit*. Modul ini digunakan untuk mengelola tunjangan karyawan. Terutama tunjangan kesehatan.
6. Modul *Recruitment*. Modul ini digunakan untuk pengelolaan rekrutmen.

Pemasang iklan dapat melakukan posting iklan dengan mudah, melacak progres pemrosesan pelamar hingga proses wawancara sampai proses penerimaannya.

7. Modul *Performance*. Modul ini digunakan untuk mengelola kinerja karyawan. Kinerja karyawan pada modul ini diukur dengan *key performance indicator (KPI)*. Administrator perlu memasukkan kriteria dari KPI setiap posisi jabatan sebelum proses penilaian dapat dilakukan.
8. Modul *Report*. Modul ini menghasilkan bermacam-macam laporan yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan.
9. Modul *Bug Tracker*. Modul ini digunakan untuk melaporkan secara *online* ditemukannya *Bug* (kelemahan sistem) sehingga *developer* memperoleh masukan untuk memperbaikinya.



Gambar 2. Tampilan OrangeHRM



Gambar 3. Jaringan Komputer *Client-Server* OrangeHRM

Proses pembelajaran dapat menggunakan 2 jenis konfigurasi jaringan komputer yaitu konfigurasi *stand-alone* dan konfigurasi *client-server*. Pada konfigurasi *stand-alone* aplikasi OrangeHRM perlu di install pada seluruh komputer yang akan digunakan untuk pembelajaran. Sedangkan pada konfigurasi *client-server* hanya 1 buah komputer saja yang diaktifkan *software OrangeHRM* sebagai *server* dan komputer lainnya sebagai *client* dengan hanya menjalankan aplikasi *web browser* untuk mengakses komputer *server*. Pada konfigurasi *stand-alone* masing-masing mahasiswa dapat berlatih untuk menjadi seorang *administrator* OrangeHRM yang mengelola seluruh data karyawan dan melakukan proses administrasi yang berkaitan dengan tugas departemen sumber daya manusia seperti membuat laporan. Sedangkan pada konfigurasi *client-server* mahasiswa dapat melakukan simulasi kondisi riil seperti yang terdapat pada internal perusahaan dengan memposisikan setiap mahasiswa menjadi karyawan perusahaan dengan berbagai

macam posisi jabatan dan melakukan proses yang berhubungan dengan departemen sumber daya manusia seperti mengajukan cuti, penilaian kinerja dan sebagainya.

Proses pembelajaran manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan OrangeHRM dapat dilakukan dengan metode simulasi, praktikum dan studi kasus. Lebih lanjut pembelajaran dengan metode ini dapat diintegrasikan dengan berbagai tugas mata kuliah yang lain seperti teori organisasi, analisa jabatan, manajemen kinerja, manajemen kompensasi dan sebagainya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan :

1. Penggunaan *software* orangeHRM dalam pembelajaran manajemen sumber daya manusia akan lebih meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang aktivitas yang terjadi dalam manajemen sumber daya manusia serta bagaimana keterkaitannya antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya.
2. Proses pembelajaran manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan OrangeHRM dapat dilakukan dengan metode simulasi, praktikum dan studi kasus
3. Adanya tambahan pengalaman praktis melalui studi kasus yang diberikan membuat mahasiswa lebih mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi pada pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, A. 1986. *Media Pendidikan dalam Kegiatan Belajar-Mengajar*. Ujung Pandang : IKIP Ujung Pandang
- Briggs, Leslie J. 1977. *Instructional Design, Educational Technology Publications Inc.* New Jersey : Englewood Cliffs
- Dale, E. 1969. *Audiovisual Method in Teaching*. Third Edition. New York : The Dryden Press, Holt, Rinehart and Winston, Inc
- Heinich, R., Molenda, M., dan Russell, J.D. 1982. *Instructional Media and The New Technologies of Instruction*. New York : Macmillan
- Levie, W. Howard dan Levie, Diane. 1975. Pictorial Memory Processes. *AVCR* Vol. 23 No. 1 *Spring* 1975. pp. 81-97
- National Education Association .1969. *Audiovisual Instruction Department, New Media and College Teaching*. Washington, D.C. : NEA
- Schramm, W. 1977. *Big Media Little Media*. London : Sage Public-Baverly Hills
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosdakarya
- Wheeler, David.2007. *Why Open Source Software / Free Software (OSS/FS, FLOSS, or FOSS)? Look at the Numbers!.* http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html, diakses tanggal 2 Juni 2012
- _____. 2009. *User Manual OrangeHRM 2.5*. [http://www.orangehrm.com/quickstart /User_Guide_2.5.pdf](http://www.orangehrm.com/quickstart/User_Guide_2.5.pdf). diakses tanggal 2 Juni 2012

Solusi Dampak Instabilitas Ekspor Di Indonesia: Intra-Industry Trade Pattern Saja

Lilis Yuliati¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Jember

E-mail: lilis_yuliati@yahoo.co.id

Abstrak

Secara empiris, konsep pola PII mulai dikembangkan tahun 1980-an di negara-negara industri modern yang notabene memiliki faktor endowment relatif sama, yaitu cenderung padat modal. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh gambaran intensitas PII antara Indonesia ASEAN-4, serta untuk memperoleh bukti empirik, menguji dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas PII Indonesia dengan ASEAN-4. Penelitian ini menggunakan metode Indeks Grubel-Lloyd dan analisis panel data. Hasil analisis data pertama, PII manufaktur Indonesia ke pasar ASEAN-4 periode 1985 - 2009 berdasarkan kode SITC cenderung mengalami pergeseran. Komoditi yang sebelumnya indeksinya tinggi pada tahun berikutnya menurun. Share intensitas PII antara Indonesia dengan ASEAN-4 masuk dalam kategori non-PII karena indeksinya < 40%; kedua, intensitas PII manufaktur didasarkan kode ISIC sudah masuk dalam kategori PII karena indeksinya sudah $\geq 40\%$, tepatnya 47,65% dan sisanya 52,35% berkategori non-PII, serta ketiga, estimasi model ekonometrik dengan metode FEM diperoleh hasil, yaitu intensitas tenaga kerja menunjukkan positif tidak signifikan, struktur pasar positif signifikan, skala ekonomi positif tidak signifikan, diferensiasi produk positif signifikan, dan dummy integrasi ekonomi positif signifikan.

Kata kunci: **perdagangan intra-industri, struktur pasar, skala ekonomi**

Abstract

Empirically, the concept of IIT pattern was developed in the 1980s in modern industrialized countries which incidentally has the same endowment of factors, which tend to be capital intensive. The intensity of IIT is believed to be higher if the countries involved are a group of countries that trade to economic integration (ASEAN). Research objectives to be achieved is to obtain a picture of the intensity of IIT between Indonesia and ASEAN-4. This study used Grubel-Lloyd Index and panel data analysis. The results concluded the first manufacturing IIT of Indonesia to ASEAN market-4 during the period 1985 to 2009 according to SITC categories tend to experience a shift in which commodities are higher earlier in the year following the index declined. Share intensity of IIT between Indonesia with four ASEAN member countries are included non IIT category because it was < 40%; the second, the intensity of IIT in manufacturing based on ISIC category is included in the category of IIT because it was $\geq 40\%$, exactly 47.65% and 52.35% for the remaining non-IIT category, and third, the estimation in the model econometric conclusions obtained by FEM method, the intensity of labor showed no significant positive number. Market structure showed a significant positive number. Economies of scale showed no significant positive number. Product differentiation showed a significant positive number. Economic integration dummy showed a significant positive.

*Key words: **intra-industry trade, market structure, economies of scale***

PENDAHULUAN

Motif dagang suatu negara didorong oleh faktor-faktor: tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi di dalam negeri, serta untuk mencapai skala ekonomi (*economies of scale*) dalam produksi (Krugman & Obstfeld, 1997; Appleyard, 2000). Hal ini bertujuan dagang adalah membangun strategi perdagangan dalam menghadapi persaingan global. Globalisasi menuntut kemampuan daya saing dan keunggulan suatu produk (Karseno, 1995; Karseno & Widodo, 1997). Persaingan global dan integrasi ekonomi akan menghasilkan spesialisasi industri, sehingga menyebabkan perdagangan inter-industri yang didasarkan Teori H-O tidak dapat menjelaskan perdagangan antar negara yang memiliki faktor *endowment* relatif sama (Ramasamy, 1993; Bergstrand, 1990). Konsep semacam ini disebut perdagangan intra-industri (*intra-industry trade, IIT*) (Grimwade, 1989 dalam Zamroni, 2003:2).

Kondisi tersebut didukung oleh kenyataan bahwa: 1) negara-negara industri menghasilkan $\pm 3/4$ dari total ekspor dunia; 2) $2/3$ ekspor terjadi antara negara-negara industri sendiri, dan didominasi perdagangan antara sesama barang manufaktur; 3) $>1/2$ perdagangan antar manufaktur merupakan IIT; 4) sebagian besar IIT merupakan perdagangan *intra-firm* antara perusahaan-perusahaan multinasional dengan cabangnya di luar negeri (Root, 1994 dalam Hermanto, 2001:29). Kesimpulannya adalah bahwa IIT pertama-tama terjadi di negara-negara industri maju yang memiliki faktor *endowment* relatif sama (*capital intensive*). Konsep ini kemudian diadopsi negara sedang berkembang yang memiliki faktor *endowment* relatif sama pula (*labor intensive*) (Kierzkowski, 1985; Kim, 1992).

Indonesia berdagang dengan negara anggota ASEAN: Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand. Dalam rangka merangsang perdagangan intra-ASEAN, mereka sepakat melakukan integrasi ekonomi (AFTA) mulai 1 Januari 1993, dengan instrumen kebijakan berupa penghapusan tarif impor secara bertahap selama sepuluh tahun (Amir, 2000:223). Kerangka AFTA tersebut kemudian ditingkatkan menjadi *ASEAN Community*, yang akan diberlakukan tahun 2015.

Tujuan penelitian: 1) melihat intensitas IIT manufaktur Indonesia dengan ASEAN-4, komoditas yang memiliki dominasi tinggi terhadap IIT manufaktur secara keseluruhan, serta kategori perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan ASEAN-4; dan 2) menganalisis pengaruh intensitas tenaga kerja, struktur pasar, skala ekonomi, diferensiasi produk, dan *dummy* integrasi ekonomi terhadap tingkat IIT manufaktur Indonesia ke ASEAN-4.

Penelitian tentang IIT sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil-hasil pengujian hipotesis dari banyak ahli ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, pertama, *industry-specific*, yaitu intensitas IIT dipengaruhi oleh permintaan spesifik dari komoditi atau industri dan karakteristik penawaran; kedua, *country-specific*, yaitu intensitas IIT untuk industri tertentu ditentukan oleh karakteristik mitra dagangnya; ketiga, *policy-based*, yaitu intensitas IIT dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan atau kebijakan pemerintah (Greenaway & Milner, 1994; Greenaway, *et al.*, 1999).

METODA

Penelitian ini menggunakan kombinasi data *time series* dan *cross section* atau dikenal dengan istilah *Pooled data*. Data utama yang digunakan adalah data industri manufaktur berdasarkan klasifikasi SITC (SITC 5-8 kecuali divisi 68) dan ISIC (ISIC 321-390).

Intensitas IIT diukur dengan menggunakan indeks **Grubel & Lloyd (Loertscher & Wolter, 1980; Krugman, 1981, Brander, 1981:1-14; Brander & Krugman, 1983:313-321; Krugman, 1994:133-134)**, seperti rumus berikut:

$$IIT_i = \frac{(X_i + M_i) - |X_i - M_i|}{(X_i + M_i)} \times 100$$

IIT_i = indeks IIT pada industri i
 X_i = nilai ekspor industri i
 M_i = nilai impor industri i

di mana

Indeks **G-L** nilainya 0 – 1. Jika IIT = 0, maka yang terjadi hanya perdagangan inter-industri. Apabila mendekati nol, teori perdagangan yang cocok adalah didasarkan pada pasar persaingan sempurna, dan perdagangan terjadi karena perbedaan faktor *endowment* (perdagangan didasarkan atas keunggulan komparatif). Jika IIT = 1, yang terjadi hanya IIT. Bila ekspor dan impor industri i seimbang, maka perdagangan lebih didasarkan pada pasar persaingan tidak sempurna yang didorong adanya *increasing returns to scale* (Caves, 1980; Khalifah, 1994 & 1996; Durkin, 2000; Murshed, 2001).

Untuk menentukan tinggi rendahnya indeks IIT digunakan kriteria **Krugman (1992)**. Indeks G-L dikatakan tinggi apabila nilainya ≥ 40%, artinya perdagangan yang terjadi adalah IIT (derajat monopoli sedang), kalau <40%, perdagangan yang terjadi adalah perdagangan inter-industri (derajat monopoli rendah) (Koch, 1980).

Dalam menganalisis permasalahan kedua digunakan metode *estimated feasible generalized least square* (Cincera, 1997; Baltagi, 2001; Carmen, 2002; Papke & Wooldridge, 2008). Model yang digunakan adalah (Aturupane, *et al.*, 1997; Aturupane, *et al.*, 1999)

$$IIT_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 LABIN_{j,t} + \beta_2 CR_{j,t} + \beta_3 LnES_{j,t} + \beta_4 LnPD_{j,t} + \beta_5 DEI_{j,t} + e_t$$

- IIT_t : Indeks IIT pada industri j dari Indonesia ke ASEAN pada tahun ke t
- LABIN_j : Intensitas tenaga kerja pada industri j
- CR_j : Ukuran persaingan struktur pasar pada industri j
- ES_j : Variabel *proxy* untuk skala ekonomi pada industri j
- PD_j : Variabel *proxy* untuk diferensiasi produk pada industri j
- DEI_j : *Dummy variable* untuk integrasi ekonomi pada industri j
 0 = sebelum melakukan integrasi ekonomi (sebelum 1993)
 1 = setelah melakukan integrasi ekonomi (1993 dan seterusnya)
- e : *Error term*
- β_z : Parameter (z = 1, 2, ..., 6)

Tabel 1: Definisi Operasional

No	Definisi	Deskripsi	Formulasi	Satuan
1.	<i>Intra-industry trade (IIT)</i>	Nilai ekspor suatu industri dari suatu negara tepat diimbangi impor industri yang sama dari negara lain. IIT ditunjukkan sebagai persentase dari total perdagangan (ekspor plus impor) dari suatu industri.	$AIIT_j = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k (X_{ij} + M_{ij}) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k X_{ij} - M_{ij} }{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k (X_{ij} + M_{ij})}$	0 – 1 atau 0% - 100%
2.	Intensitas tenaga kerja (LABIN)	Rasio antara tenaga kerja terhadap output yang dihasilkan oleh tenaga kerja pada suatu perusahaan atau industri tertentu	$LABIN_j = \frac{LAB_j}{Q_j}$	Rb Jiwa / Rp
3.	Rasio konsentrasi (CR)	Persaingan struktur pasar pada industri tertentu, diukur dengan rasio antara nilai tambah 4 perusahaan terbesar terhadap total nilai tambah pada industri tertentu	$CR_j = \frac{VA4BC_j}{VATC_j}$	Rupiah
4.	Skala ekonomi (ES)	Nilai tambah 4 perusahaan terbesar dibagi jumlah tenaga kerja 4 perusahaan terbesar terhadap nilai tambah perusahaan sisanya dibagi jumlah tenaga kerja perusahaan sisanya dalam industri tertentu.	$LnES_j = \frac{VA4BC_j}{LAB4BC_j} \bigg/ \frac{VATC_j}{LABTC_j}$	$\frac{Rp}{Rb Jiwa}$ / $\frac{Rp}{Rb Jiwa}$
5.	Diferensiasi produk (PD)	Berapa banyak ragam kategori SITC 5 digit dalam tiap ISIC 3 digit pada industri tertentu.	$SITC5 Digit \in ISIC3 Digit$	Unit
6.	<i>Dummy</i> integrasi ekonomi (DEI)	Integrasi ekonomi mulai tahun 1993, saat ASEAN membentuk kawasan perdagangan bebas AFTA dengan instrumen penurunan tarif, yaitu CEPT	0 = sbl integrasi ekonomi (1985-1992) atau 1 = stl integrasi ekonomi (1993-2002)	0 atau 1

Sumber: (Balassa, 1979; Balassa & Bauwens, 1987, 1988; Lancaster, 1980; Helpman, 1981)

PEMBAHASAN

IIT Manufaktur Indonesia ke ASEAN-4 Berdasarkan Kategori SITC Tiga Digit

Intensitas IIT komoditi SITC 522 (industri unsur kimia, halda, oksida & garam-garamnya), 642 (industri barang-barang kertas lainnya) adalah terlama, yaitu 25 tahun. Peringkat kedua, 24 tahun diraih SITC 514 (industri persenyawaan berfungsi nitrogen), 541 (industri bahan obat-obatan & kesehatan), 663 (industri hasil industri dari bahan mineral); ketiga, 23 tahun diraih SITC 531 (industri bahan pewarna sintesis), 554 (industri sabun & bahan pembersih lainnya), 848 (industri perlengkapan pakaian dari kain tekstil).

Selama 25 tahun komoditi yang semuanya berkategori non-IIT adalah SITC 571 (industri polimer dari etilena bentuk awal), 641 (industri kertas & kertas karton), 727 (industri mesin untuk industri pengolahan makanan), 747 (industri keran, klep, katup & sejenisnya), 774 (industri alat listrik keperluan pengobatan), 841 (industri pakaian lelaki & anak lelaki bukan rajutan), 842 (industri pakaian wanita & anak wanita bukan rajutan). Dari 3950 unit analisis, 43,22% komoditi berkategori IIT, 56,78% berkategori non-IIT.

IIT komoditi industri unsur kimia, halda, oksida & garam-garamnya, serta industri barang-barang kertas lainnya antara Indonesia vs ASEAN-4 mendominasi. Komoditi ini dilihat dari intensitas faktor, termasuk kategori *physical capital intensive (PCI)*, artinya industri lebih mengandalkan tenaga kerja ahli di bidangnya, perpaduan dengan *human capital intensive (HCI)*, artinya komoditi diproduksi menggunakan SDM yang mempunyai *skill* tinggi. Secara keseluruhan 43,22% komoditi berkategori IIT, dan 56,78% non-IIT, artinya transaksi dagang yang terjadi antara Indonesia vs ASEAN-4 sudah berkategori IIT.

Dominasi IIT antara Indonesia vs ASEAN-4 yang bersumber dari statistik perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) yang diolah dari berbagai terbitan menunjukkan ; berturut-turut: Singapura sebanyak 1.482 komoditi (31%), Malaysia 1.400 komoditi (29%), Thailand 1.254 komoditi (26%), dan Philipina 662 komoditi (14%)

IIT Manufaktur Indonesia ke ASEAN-4 Berdasarkan Kategori ISIC Tiga Digit

Komoditi ISIC 381 (industri barang dari logam, kecuali mesin & peralatannya) meraih posisi terlama, 21 tahun berkategori IIT, dengan *share* sebesar 7,66%. Peringkat kedua selama 19 tahun, ISIC 356 (industri barang dari plastik) dengan *share* sebesar 6,93%. Ketiga selama 17 tahun, ISIC 351 (industri bahan kimia industri), 361 (industri porselen), dan ISIC 364 (industri pengolahan tanah liat dengan *share* sebesar 6,20%. ISIC 322 (industri pakaian jadi kecuali alas kaki), hanya sekali berkategori IIT dengan *share* sebesar 0,36%.

Intensitas IIT Manufaktur antara Indonesia dengan masing-masing negara ASEAN-4 secara parsial maupun keseluruhan sudah berkategori intra-industri karena indeks IIT-nya sebesar 47,65%. Hal ini terjadi karena Indonesia telah memanfaatkan secara optimal kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam instrumen kerjasama ASEAN, sehingga akan menjadi alternatif negara tujuan ekspor. Artinya, Indonesia dapat mengurangi

ketergantungan ekspornya dengan negara mitra dagang utama, sehingga apabila terjadi gejolak perekonomian di negara mereka, Indonesia bisa terhindar dari instabilitas ekspor.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi IIT Manufaktur Indonesia ke ASEAN-4

Permasalahan kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IIT manufaktur Indonesia ke ASEAN-4 digunakan data panel. Jumlah *cross section*-nya 23 unit industri, dan *time series*-nya 25 tahun, sehingga jumlah keseluruhan adalah 575 unit observasi penelitian.

Metode yang digunakan untuk mengestimasi model adalah *fix effect model (FEM)*. Kriterianya adalah dengan membandingkan jumlah *time series (T)* dengan *cross section*-nya (N). Apabila $T > N$, maka pilihannya adalah metode FEM, sebaliknya apabila $T < N$, maka menggunakan metode *random effect model (REM)*. Hasilnya adalah intensitas tenaga kerja dan skala ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan, struktur pasar, diferensiasi produk, dan *dummy* integrasi ekonomi berpengaruh positif signifikan (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil Estimasi Model IIT Manufaktur Indonesia ke ASEAN-4 dengan Metode FEM

Variabel	Koefisien Estimasi
C	21.94784*** (0.0000)
LABIN?	19.99866 ^{NS} (0.2225)
CR?	7.413073* (0.0601)
SE?	0.378235 ^{NS} (0.2051)
PD?	0.018869*** (0.0002)
D?	6.478406*** (0.0006)
R-squared	0.357060
Adjusted R-squared	0.322685

Sumber: data diolah

Keterangan: * *significance at $\alpha = 10\%$* ; ** *significance at $\alpha = 5\%$* ; *** *significance at $\alpha = 1\%$*

^{NS} = *not significance*

Hasil estimasi diperoleh koefisien *intercept* sebesar 21,94784 atau positif signifikan, artinya pada saat semua variabel bebas bernilai 0%, maka intensitas IIT sebesar 21,94784, maksudnya bahwa tanpa ada pengaruh variabel independen, maka Indonesia tetap melakukan transaksi dagang. Estimasi terhadap *intensitas tenaga kerja* hasilnya positif tidak signifikan terhadap intensitas IIT manufaktur Indonesia-ASEAN-4. Koefisiennya sebesar 19,99866 pada tingkat signifikansi 22,25%, artinya intensitas tenaga kerja tidak cukup memberikan pengaruh positif terhadap intensitas IIT. Koefisien ini berbeda dengan hipotesis yang disusun. Hal ini karena peneliti sebelumnya melakukan penelitian di negara-negara maju. Estimasi variabel *struktur pasar* hasilnya positif signifikan. Koefisien sebesar 7,413073 pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, setiap terjadi kenaikan penguasaan pasar 5% dari variabel independen yang lain, akan meningkatkan intensitas IIT manufaktur Indonesia-ASEAN-4 7,413073% lebih tinggi dibanding variabel independen lain. Hasil ini sesuai dengan teori. Estimasi *skala ekonomi* menunjukkan positif tidak signifikan. Koefisien sebesar 0,378235 dan tingkat signifikansinya sebesar 20,51%. artinya, variabel skala ekonomi tidak cukup memberikan pengaruh positif terhadap intensitas IIT. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi, walaupun output yang

dihasilkannya tidak signifikan. Estimasi diferensiasi produk hasilnya positif signifikan. Koefisien estimasi sebesar 0,018869 pada tingkat signifikansi 1%. Artinya, setiap terjadi kenaikan diferensiasi produk 1% dari variabel independen lain, maka akan meningkatkan intensitas IIT manufaktur Indonesia-ASEAN-4 1,8869% lebih tinggi dari variabel independen lain. Walaupun Indonesia dinilai ketinggalan dalam masalah desain produk yang diperdagangkan ke luar negeri, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa IIT antara Indonesia dengan ASEAN-4 membuktikan ada peningkatan ragam desain produk yang dihasilkan dan mampu dijual oleh industri tertentu antara Indonesia dengan ASEAN-4, menyebabkan terjadinya peningkatan intensitas IIT. Estimasi terhadap dummy integrasi ekonomi hasilnya positif signifikan dengan koefisien sebesar 6,478406, serta tingkat signifikansi 1%. Artinya bahwa peningkatan pemberlakuan integrasi ekonomi berupa penurunan tarif dari variabel independen yang lain, maka akan menaikkan intensitas IIT manufaktur Indonesia-ASEAN-4 647,8406% lebih tinggi dibanding dari variabel independen yang lain. Dengan demikian pemberlakuan integrasi ekonomi di negara ASEAN-4 memberi pengaruh positif terhadap intensitas IIT Manufaktur Indonesia-ASEAN-4.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data yang dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: 1) perkembangan indeks dan nilai IIT manufaktur Indonesia ke pasar ASEAN-4 tahun 1985 - 2009 berdasarkan kategori SITC terlihat berfluktuasi, di mana komoditi-komoditi yang sebelumnya indeksnya tinggi pada tahun berikutnya menurun. Secara parsial perdagangan Indonesia dengan masing-masing negara anggota ASEAN-4 masih berkategori inter-industri, akan tetapi secara keseluruhan sudah berkategori intra-industri. Berdasarkan kategori ISIC, perdagangan Indonesia ke ASEAN-4 juga sudah berkategori IIT; 2), estimasi terhadap variabel-variabel independen yaitu intensitas tenaga kerja menunjukkan angka positif tidak signifikan, struktur pasar positif signifikan, skala ekonomi positif tidak signifikan, diferensiasi produk positif signifikan, serta *dummy* integrasi ekonomi menunjukkan angka positif signifikan terhadap intensitas IIT manufaktur Indonesia dengan ASEAN-4.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. S. 2000. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Appleyard, D. R. & A. J. Field Jr. 2000. *International Economics* (4th edition). McGraw-Hill. New York.
- Aturupane, C., S. Djankov & B. Hoekman. 1997. Determinant of Intra-Industry Trade between East and West Europe”, *JEL Clasiffication*. F.13: 423-458.
- Balassa, B. 1979. Intra-Industry Trade and the Integration of Developing Countries in the World Economy. *In Giersch Edition*. 245-270.
- Balassa, B. & L. Bauwens. 1987. Intra-Industry Specialization in a Multi-Country and Multi-Industry Framework. *Economics Journal*. V. 97-#388: 923-239.
- Bergstrand, J. H. 1990. The Heckscher-Ohlin-Samuelson Model’s, the Linder Hypothesis and the Determinants of Bilateral Intra-Industry Trade. *Economic Journal*. 100: 1216-1229.

- Caves, R. E. 1980. Intra-Industry Trade and Market Structure in the Industrial Countries. *Oxford Economic Paper*. 32: 203-223.
- Cincera, M. 1997. Patents, R & D and Technological Spillovers at the Firm Level: Some Evidence from Econometric Count Models for Panel Data. *Journal of Applied Econometrics*. 12: 265-280.
- Durkin, J. T. & M. Krygier. 2000. Differentiated in GDP per Capita and Share of Intra-Industry Trade: The Role of Vertically Differentiated Trade. *Review of International Economics*. 8, 4: 760-774.
- Greenaway, D. & C. Milner. 1994. Country-Specific Factors and the Pattern of Horizontal and Vertikal Intra-Industry Trade in UK. *Weltwirtschaftliches Archiv*. 130: 77-100.
- Greenaway, D., C. Milner, C. & R. Elliott. 1999. UK Intra-Industry Trade with The EU North and South. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*. 61: 365-384.
- Grimwade, N. 1989. *International Trade: New Pattern of Trade, Production and Investment*. London: Routledge.
- Grubel, H. G. & P. J. Lloyd. 1975. *Intra-Industry Trade: the Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products*. Macmillan Press. London.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometrics* (4th edition). McGraw-Hill Companies, Inc. New York.
- Karseno, A. R. 1995. Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara ASEAN dan APEC. *Jurnal Kelola Gadjah Mada University Business Review*. 7, 3: 139-164.
- Karseno, A. R. dan T. Widodo, T. 1997. Efisiensi Teknik, Alokasi dan Skala pada Golongan Produk Unggulan Industri. *Jurnal Kelola, Gadjah Mada University Business Review*. 36-57.
- Khalifah, N. A. 1996. AFTA and Intra-Industry Trade, *ASEAN Economic Bulletin*. 12, 3: 351-368.
- Kierzkowski, H. 1985. Models of International Trade in Differentiated Goods. *Current Issues in International Trade, Theory, and Policy*. MacMillan Publisher LTD. London.
- Krugman, P. R., & M. Obstfeld. 1997. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Buku I: Perdagangan*, terjemahan Faisal Basri. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Lancaster, K. 1980. Intra-Industry Trade under Perfect Monopolistic Competition. *Journal of International Economics*. 10: 151-175.
- Loertscher, R. and F. Wolter. 1980. Determinant of Intra-Industry Trade: among Countries and Across Industries, *Weltwirtschaftliches Archiv*, V.116-#2, 934-957.
- Murshed, S. M. 2001. Patterns of East Asian Trade and Intra-Industry Trade in Manufactures. *Journal of the Asia Pacific Economy*. 6, 1: 582-601.
- Papke, L. E. & J. M. Wooldridge. 2008. Panel Data Methods for Fractional Response Variables with an Application to Test Pass Rates. *Journal of Econometrics*. 145: 121-133.
- Ramasamy, B. 1993. Intra-Industry Intra-ASEAN Trade: The Case of Malaysia. *Malaysian Journal of Economic Studies*. 30 No. 1: 40-49
- Root, F. R. 1994. *International Trade and Investment* (7th edition). South-Western Publishing. Ohio.
- Zamroni. 2003. The Intra-Industry Trade of the ASEAN and ANZCERTA Countries in Agricultural Products. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP)*. XI (1): 1-13.

Tinjauan Investor Dalam Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pembangunan Komponen Transportasi Terminal Giwang Di Kota Yogyakarta

Poegoeh Soedjito¹

¹Jurusan Teknik Sipil, UNIBA - Balikpapan - KALTIM

E-mail : poearum@yahoo.com

Abstrak

Terminal Umbulharjo Yogyakarta pada tahun 2003 sudah kurang memenuhi kegunaan pelayanan sarana transportasi, sehingga dibangun terminal baru di lokasi Gimawang Yogyakarta. Permerintah Daerah Kota Yogyakarta bersama investor akan mewujudkannya, hal tersebut untuk memenuhi kepuasan dan kenyamanan dalam pelayanan publik. Metode dalam menganalisa proyek ini dengan menggunakan analisa-analisa harga dasar, pengeluaran proyek, bunga pinjaman, depresiasi dan pembayaran pokok kredit tahun 2004. Hasil dalam menilai kelayakan proyek terminal Giwang Yogyakarta menunjukkan layak dengan nilai $1,400 > 1$ investasi profitabel bagi investor, pendapatan terhadap pengeluaran memiliki nilai $5,096 > 1$ tingkat resiko proyek kecil serta dalam mewujudkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya BEP memberikan presentasi tingkat Break event occupancy factor sebesar $117,47\% > 85\%$.

Kata kunci : **terminal, investor, kelayakan**

Abstract

The terminal Umbulharjo Yogyakarta in 2003 had less to meet the usability of services transportation, so that the new terminal was built at the site Gimawang Yogyakarta. The Government Region of Yogyakarta with investor will make it happen, it is to meet the satisfaction and comfort in public service. Method in analyzing the project using the basic price analyzes, project expenditures, loan interest, depreciation and principal payments in 2004. Results in assessing the feasibility of the project showed terminal Giwang Yogyakarta worth to the value of $1.400 > 1$ profitable investment for investors, income over expenditure has a value of $5.096 > 1$ smaller project and the level of risk in realizing the factors supporting and barrier the achievement of BEP is presenting the event break occupancy factor of $117.47\% > 85\%$.

Keywords: terminal, investor, the feasibility

PENDAHULUAN

Layanan dan fasilitas transportasi seperti salah satu komponennya yang harus memadai adalah terminal, Yogyakarta sebagai kota yang digunakan untuk transit dan penghubung jalur dari Jawa Barat, Jawa Tengah ke Jawa Timur, maka dituntut mempunyai terminal yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasa terminal tersebut.

Terminal Umbulharjo sampai tahun 2003 sudah dapat dianggap kurang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya baik dari segi kapasitas maupun pelayanannya, maka pemerintah bekerja sama dengan investor membangun terminal baru yaitu terminal Giwangan. Terminal Giwangan dibangun dengan kapasitas yang lebih memadai dan menjanjikan suatu pelayanan lebih baik, sehingga memberikan rasa nyaman bagi penumpangnya.

Dalam mewujudkan sasaran pada investor terminal Gimawang dapat mempunyai tujuan dan berfungsi sebagai parameter kelayakan pada penanaman modal yang menghasilkan fisibel, profitibel dan resiko pada analisa ekonomi teknik suatu bangun bangunan teknik sipil.

Pembelajaran kerja sama penanaman modal sebagai investor dengan pemerintahan sebagai pemilik bangun bangunan terminal akan bermanfaat bagi Pengelola Terminal dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, mempelancar dan memberikan tingkat pelayanan yang memuaskan bagi pengguna terminal.

Kegunaan bagi Akademisi dapat mengembangkan terapan ekonomi teknik untuk dijadikan sasaran olah pikir kelayakan suatu bangun bangunan ketekniksipilan dan bagi Investor dapat memprediksi serta memperhitungkan keuntungan nilai investasi pada terminal yang akan diperoleh kemudian hari.

TINJAUAN PUSTAKA

Morlok (1985) menyatakan bahwa terminal merupakan salah satu komponen penting bagi transportasi. Terminal merupakan tempat penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistim. Fungsi utama dari terminal adalah untuk menyediakan fasilitas masuk dan keluar dari objek-objek yang akan diangkut (penumpang dan barang) menuju dan dari sistim transportasi serta fungsi lain dari terminal adalah :

1. Memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi serta membongkarnya.
2. Memindahkan penumpang atau barang dari satu kendaraan ke kendaraan lain.
3. Menyediakan kenyamanan penumpang (misal: warung makan, kamar mandi, tempat ibadah, tempat istirahat, alat komunikasi, dsb).
4. Penyimpanan kendaraan, pemeliharaan dan penentuan tugas selanjutnya.
5. Menyiapkan dokumen perjalanan.
6. Menampung barang tiba hingga berangkat lagi.

Pendapatan terminal yang berasal dari luar redistribusi yaitu antara lain : Pendapatan penyewaan kios ; Redistribusi parker ; Peron para penumpang pengguna terminal

Klasifikasi terminal penumpang menurut Peraturan Pemerintah no 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan adalah :

- a. Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Pedesaan (ADES).
- b. Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKAP), Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Pedesaan (ADES).
- c. Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Pedesaan (ADES).

Fungsi terminal menurut Ditjen Perhubungan Darat (1995) antara lain : Fungsi terminal pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga unsur yang terkait dengan terminal, yaitu penumpang, pemerintah dan operator bis dan Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu kendaraan yang satu ke kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (peralatan, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko, loket dan lain-lain).

Sarwaji B (2002) ekonomi penghematan, yakni pencapaian tujuan dengan biaya terendah dalam hitungan input sumber daya, telah selalu dikaitkan dengan teknik. Selama sejarahnya yang panjang faktor-faktor yang membatasi itu didominasi oleh fisik. Jadi, inovasi yang menemukan roda, yang merupakan penemuan yang dinantikan, bukan karena tidak berguna atau mahal, tetapi karena manusia tidak dapat mensintesisakan lebih dini.

Sutojo S (2002), mengatakan kriteria kelayakan erat terkait dengan keberhasilan dan hal ini akan berbeda dari satu dan lain sudut pandang dan kepentingan. Bagi pemilik proyek juga tergantung pada macam proyek, berdasarkan dana dan sebagainya. Analisa *break event* adalah suatu tehnik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan, atau sering juga disebut “ *Cost Profit Volume analysis*” (*C.P.V Analysis*) apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak akan muncul masalah *break even* dalam perusahaan tersebut. Masalah *break event* baru muncul apabila disamping mempunyai biaya variabel juga mempunyai biaya tetap.

Menurut poerbo H (1993), seorang investor yang melakukan investasi pasti selalu mengharapkan pengembalian sejumlah dana yang telah tertanam pada proyek bersangkutan. Pengembalian investasi tersebut harus lebih besar dari dana semula yang digunakan untuk investasi, dengan kata lain pemilik modal atau investor harus mendapatkan keuntungan dari sejumlah uang yang dikeluarkan. Dalam pola BOT (*Built, Operate and Transfer*) kontraktor bersama-sama perusahaan lain membentuk konsorsium yang menjadi promotor proyek. Konsorsium mengusahakan dana, mengerjakan pembangunan proyek dan mengoperasikan instalasi hasil proyek (dengan demikian memperoleh pengembalian dana) sampai jangka waktu tertentu, barulah kemudian instalasi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pemilik. Umur ekonomis proyek adalah masa dimana proyek tersebut layak dipergunakan dan dapat memberikan layanan standar yang di isyaratkan sejak proyek itu mulai dipergunakan hingga masa waktu tertentu. Perhitungan umur ekonomis proyek tersebut penting karena dengan mengetahui umur

ekonomisnya bisa memperkirakan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan penggantian, disamping itu juga penting untuk memperhitungkan penghasilan yang akan diterima.

METODA

Data yang digunakan untuk studi kelayakan finansial di sini meliputi dari dua macam, antara lain seperti :

1. Data Primer, data primer diperoleh dari hasil pengamatan di lokasi penelitian.

Harga Pembangunan Terminal	= Rp. 90.004.457.000,00
a. Sarana penunjang lainnya	
b. Mekanikal dan elektrikal	
c. Furniture dan peralatan kantor	
Harga Tanah	= Rp. 29.392.455.917,00
Jadi Investasi Total	= Rp. 119.396.912.917,00
Luas Tanah	= 58.850 m ² ; Umur Ekonomis = 32 tahun
Depresiasi	= 5 % ; Jumlah Armada Bis = 1719
Bunga	= 16 % ; Masa Pelunasan = 28 tahun
Masa Konstruksi	= 2 tahun
Perubahan Nilai Mata Uang Terhadap Waktu	= 7 %
Modal Sendiri (PT Perwita Karya)	= Rp. 90.004.457.000,00
Modal Dari Pemkot	= Rp. 29.392.455.917,00
Jumlah Kios Yang Dibangun	= 524 Kios
2. Data Sekunder, data sekunder diperoleh dari studi pustaka beberapa buku-buku, data dan referensi / rujukan yang memiliki spesifikasi sama.

Titik impas dapat tercapai bila pendapatan dapat menutup pengeluaran pokok gedung. Pendapatan max = Jumlah operasional x 12 bln x (faktor pendapatan diluar dari operasional) x R. Pengeluaran-pengeluaran pokok : Biaya operasional dan pemeliharaan, Pembayaran kembali pokok kredit, Pembayaran bunga.

PEMBAHASAN

Pengembalian keputusan investasi perlu didukung oleh data-data akurat, data-data tersebut digunakan sebagai analisa dan perhitungan yang hasilnya digunakan sebagai dasar dalam pengembalian keputusan investasi :

Jumlah Kios Yang Tersewa = 75%

Jumlah Kios yang Tersewa :

= jumlah kios yang tersewa 75% dari 524 kios = 524 x 75% = 393 kios

Pendapatan Proyek :

= 393 x 12 bln x jumlah armada bis x koefisien pendapatan operasional x tingkat operasional rata-rata x pendapatan rata-rata (R)

= 393 x 12 x 1719 x 2,2 x 0,85 x R = Rp.15.159.723,48 R

Pengeluaran Proyek Terdiri Dari :

1. Biaya Operasional dan Pemeliharaan :

= 0,2 x pendapatan kotor terminal = 0,2 x 12 x 0,85 x 1719 x 2,2 x R = Rp.7.174.872 R

2. Perkembangan Kredit Setelah Masa Konstruksi. $Ln = Lo(1 + \frac{i}{2})^{n1}$

Dimana : Ln = jumlah modal setelah masa konstruksi ; Lo = jumlah modal awal

i = perubahan nilai mata uang terhadap waktu ; n1 = masa konstruksi

Penyelesaian : = Rp. 29.392.455.917,00 (1 + 0,07 / 2)²

= Rp. 29.392.455.917,00 x 1,071225 = Rp. 31.485. 933.589,00

3. Bunga : $= \frac{i(1+i)^{n2}}{(1+i)^{n2} - 1} \times Ln - \frac{Ln}{n2}$

Dimana : n2 = Masa pelunasan kredit ; Ln = jumlah modal setelah masa konstruksi

;

i = bunga

Penyelesaian : $= \frac{0,16(1+0,16)^{28}}{(1+0,16)^{28} - 1} \times Rp\ 31.485.933.589,00 - \frac{Rp\ 31.485.933.589,00}{28}$

= 0,162547752 x Rp. 31.485. 933.589 ,00 – Rp.1.124.497.628,00

= Rp.3.993.470.095,00

4. Depresiasi : = 5% x biaya bangunan lengkap

= 0,05 x Rp. 90.004.457.000,00 = Rp. 4.500.222.850,00

5. Pembayaran Pokok Kredit : $= \frac{Ln}{n2}$;

Dimana : Ln = jumlah modal setelah masa konstruksi ; n2 = Masa pelunasan

Penyelesaian : $= \frac{Rp\ 31.485.933.589,00}{28} = Rp.1.124.497.628,00$

6. Jumlah Pengeluaran proyek :

= (biaya operasional dan pemeliharaan + bunga + depresiasi + pembayaran pokok kredit)

= (Rp.7.714.872 R + Rp.3.993.470.095,00 + Rp.4.500.222.850,00 +

Rp.1.124.497.628,00) = (Rp.7.714.872 R + Rp.9.618.190.573,00)

Pendapatan rata-rata minimum didapat apabila pendapatan sama dengan pengeluaran.

Pendapatan = Pengeluaran

Rp.15.159.723,48 R = Rp.7.714.872 R + Rp. 9.618.190.573,00

Rp.7.444.851,48 R = Rp. 9.618.190.573,00

R = Rp.1.291,92 → R = Rp.1.200,00

Tingkat Pengembalian Modal Sendiri (Tpms)

Tingkat pengembalian modal sendiri adalah perbandingan jumlah nilai sekarang dari laba dikurangi kembali pokok kredit, terhadap nilai sekarang modal sendiri.

1. Sebelum Kredit Lunas

Laba dikurangi pokok kredit

$Y_1 = (\text{pendapatan} - \text{bunga} - \text{biaya operasional dan pemeliharaan} - \text{pembayaran pokok kredit})$

= (Rp.15.159.723,48 R - Rp.3.993.470.095,00 - Rp.7.714.872 R -

Rp.1.124.497.628,00) = Rp.7.444.851,48 R -

Rp.2.868.972.467,00

Nilai Sekarang Sebelum Kredit Lunas : $Y_1 \times \frac{(1+i)^{n2} - 1}{i(1+i)^{n2}}$

Dimana :

Y_1 = (pendapatan – bunga - biaya operasional dan pemeliharaan pembayaran pokok kredit) ; n_2 = masa pelunasan kredit

i = perubahan nilai uang terhadap waktu

Penyelesaian :

$$= \frac{(1+0,07)^{28}-1}{0,07(1+0,07)^{28}} \times (Rp.7.444.851,48 R - Rp.4.2.868.972.467,00)$$

$$= (12,13711125) \times (Rp. 7.444.851,48 R - Rp.2.868.972.467,00)$$

$$= Rp.90.358.990,65 R - Rp.34.821.038.010,00$$

2. Sesudah Kredit Lunas

Sesudah kredit lunas tidak membayar bunga dan pokok kredit.

Y_2 = (Pendapatan – biaya operasional dan pemeliharaan)

$$= (Rp.15.159.723,48 R - Rp. 7.714.872 R) = Rp.7.444.851,48R$$

Nilai Sekarang Sesudah Kredit Lunas

$$= Y_2 \times \left[\frac{(1+i)^{n_3}-1}{i(1+i)^{n_3}} - \frac{(1+i)^{n_2}-1}{i(1+i)^{n_2}} \right]$$

$$= Rp.7.444.851,48 R \times \left[\frac{(1+0,07)^{32}-1}{0,07(1+0,07)^{32}} - \frac{(1+0,07)^{28}-1}{0,07(1+0,07)^{28}} \right]$$

$$= Rp.7.444.851,48 R \times (12,6455532 - 12,13711125)$$

$$= Rp.7.444.851,48 R \times 0,50844195$$

3. Menjumlahkan Hasil Nilai Sekarang Sebelum dan Sesudah Kredit Lunas

$$= (Rp.90.358.990,65 R - Rp.34.821.038.010,00) + (Rp.7.444.851,48 R \times 0,50844195)$$

$$= Rp.97.803.841,96 R + Rp. 17.704.476.470,00$$

4. Nilai Sekarang Dari Modal Sendiri

$$= (1 + i/2)^n \times (\text{modal sendiri PT. Perwita Karya})$$

$$= (1 + 0,07/2)^2 \times (Rp.90.004.457.000,00)$$

$$= 1,071225 \times Rp.90.004.457.000,00 = Rp.96.415.024.449,00$$

5. Jadi Tingkat Pengembalian Modal Sendiri (TPMS)

$$\text{Rumus TPMS} = \frac{c}{d}$$

$$= \frac{(Rp.97.803.841,96 R) + Rp.17.704.476.470,00}{Rp.96.415.024.449,00}$$

Untuk R = Rp.1.200,00

$$= \frac{(Rp.97.803.841,96 \times Rp.1.200,00) + Rp.17.704.476.470,00}{Rp.96.415.024.449,00}$$

$$= \frac{Rp.117.364.610.400 + Rp.17.704.476.470,00}{Rp.96.415.024.449,00}$$

$$= \frac{Rp.135.069.086.900,00}{Rp.96.415.024.449,00} = 1,4009 > 1$$

Ternyata tingkat pengembalian modal sendiri sebesar 1,4009 lebih besar daripada 1 maka investasi tersebut cukup profitabel / menguntungkan bagi investor.

Analisa Break Event Point

Pendapatan penuh terminal :

$$= (\text{jumlah armada bis} \times 12 \text{ bln} \times 100\% \times \text{koefisien pendapatan total} \times R)$$

$$= (1719 \times 12 \times 1 \times 2,2 \times R) = 45.381,6 R$$

Pengeluaran – pengeluaran pokok :

1. Biaya operasional dan pengeluaran = $12 \times 1719 \times 0,2 \times 2,2 \times R = 9.076,32 R$
2. Pembayaran pokok kredit = Rp.1.124.497.628,00
3. Pembayaran bunga = Rp.3.993.470.095,00

$$\text{Jumlah} = 9.076,32 R + \text{Rp. } 5.117.967.723,00$$

Break event occupancy factor = V %

$$\text{Pendapatan proyek} = 45.381,6 RV$$

Pengeluaran – pengeluaran pokok :

- Biaya operasional dan pemeliharaan = 9.076,32 RV
- Pembayaran pokok kredit = Rp.1.124.497.628,00
- Bunga = Rp.3.993.470.095,00

$$\text{Jumlah pengeluaran pokok} = 9.076,32 RV + \text{Rp. } 5.117.967.723,00$$

Persamaan : Pendapatan = Pengeluaran

$$45.381,6 RV = 9.076,32 RV + \text{Rp. } 5.117.967.723,00$$

$$36.305,28 RV = \text{Rp. } 5.117.967.723,00$$

$$V = \frac{\text{Rp. } 5.117.967.723,00}{36.305,28 R}$$

$$\text{Untuk } R = \text{Rp. } 1.200,00$$

$$V = \text{Rp. } 5.117.967.723,00$$

$$\frac{36.305,28 \times \text{Rp. } 1.200,00}{}$$

$$V = 1,17,47 > 0,85$$

Break event occupancy factor adalah 1,1747 > 0,85 berarti tingkat pengoperasional armada bis melebihi 0,85, dan untuk nilai investasi akan kembali sebelum pada tahun ke 28.

KESIMPULAN

Hasil analisis perhitungan ekonomi terhadap nilai investor biaya pembangunan terminal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan dan analisa dalam menilai kelayakan proyek terminal Giwangan Yogyakarta ditinjau dari ekonomi teknik menunjukkan proyek tersebut layak dengan ditunjukkan besaran – besaran :
 - a. Perhitungan tingkat pengembalian modal sendiri menunjukkan nilai sebesar $1,400 > 1$, berarti investasi tersebut cukup profitabel / menguntungkan bagi investor.
 - b. Perhitungan pendapatan terhadap pengeluaran menunjukkan nilai sebesar $5,096 > 1$, berarti tingkat resiko proyek / investasinya kecil.
2. Dalam mewujudkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya BEP dapat diberikan nilai Presentasi tingkat *Break event occupancy factor* sebesar 117,47 % > 85 %, berarti tingkat pengoperasional armada bis melebihi 85 % dan nilai investasi kembali sebelum tahun ke 28.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1993, *Peraturan Pemerintah no 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*, Jakarta
- Anonim, 1995, *Fungsi Terminal, Ditjen Perhubungan Darat*, Jakarta
- Morlok, 1985, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta
- Paulus, 2005, *Analisa Ekonomi Teknik Terhadap Pengaruh Investasi Biaya Pembangunan Terminal Yogyakarta*, Tugas Akhir Strata 1 Universitas Kristen Emanuel Yogyakarta, Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan)
- Poerbo H, 1993, *Tekno Ekonomi Bangunan Bertingkat Banyak*, Djambatan, Jakarta
- Sarwaji B, 2002, *Ekonomi Teknik (alih bahasa : Thuesen G.J)*, Carley T Ed. 9, Jakarta
- Soeharto I, 1999, *Manajemen Proyek*, Erlangga, Jakarta
- Sutojo S, 2002, *Study Kelayakan Proyek*, Sari Manajemen no 66, Damar Mulia Pustaka, Jakarta

Analisis *Capital Mobility* Di Indonesia Dalam Perspektif *Saving –Investment Correlation Puzzle*

Regina Niken Wilantari¹, Ririn Wulan Purnamasari²

¹Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan IESP Universitas Jember

²Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan IESP Universitas Jember

E-mail : regina_nw@yahoo.com

Abstrak

Hubungan tabungan dan investasi domestik dalam perspektif saving-investment correlation puzzle merupakan indikator penting dalam pengukuran capital mobility. Dengan adanya kebebasan pergerakan kapital akibat keterbukaan perekonomian dalam integrasi ekonomi dan globalisasi ekonomi, mengakibatkan perspektif yang disampaikan oleh Feldstein dan Horioka pada tahun 1980 tersebut, terus menimbulkan perdebatan diantara peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capital mobility di Indonesia dalam perspektif saving-investment correlation puzzle. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif berdasarkan analisis Error Correction Model (ECM) untuk melihat fenomena saving-investment correlation puzzle dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi fenomena saving-investment correlation puzzle, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hal tersebut mengindikasikan adanya capital mobility yang rendah di Indonesia.

Kata kunci : saving-investment correlation puzzle, capital mobility, Error Correction Model

Abstract

Domestic savings and investment relations in the perspective of saving-investment correlation puzzle is an important indicator in the measurement of capital mobility. With the freedom of capital movements due to openness of the economy in economic integration and globalization of the economy, resulting in the perspective presented by Feldstein and Horioka in 1980 continues to generate debate among researchers. The purpose of this study was to determine the mobility of capital in the perspective of saving-investment correlation puzzle. The method used is descriptive and qualitative analysis based Error Correction Model (ECM) to see the phenomenon of saving-investment correlation puzzle in the short term and long term. These results indicate that the phenomenon of saving-investment correlation puzzle in the short and long term happens in Indonesia. Thus, it indicates a low capital mobility in Indonesia.

Key words : saving-investment correlation puzzle, capital mobility, Error Correction Model

PENDAHULUAN

Investasi dan tabungan merupakan salah satu modal penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Besarnya tabungan dan investasi domestik, akan mempengaruhi besarnya akumulasi kapital yang dibentuk oleh suatu negara, dan dapat menjadi pendorong dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian negara (Pasadilla, 2009). Menurut Adam Smith, akumulasi kapital akan tercipta melalui kemampuan suatu masyarakat untuk menabung dan menanamkan modalnya. Akumulasi kapital suatu negara merupakan syarat utama dalam pembangunan ekonomi, sehingga peran tabungan dan investasi domestik menjadi sangat penting dalam akumulasi kapital suatu negara (Susilowati, 2005:108).

Hubungan antara investasi domestik dan tabungan dapat menjadi suatu indikator penting dalam menjelaskan pergerakan kapital suatu negara (Boon,2000). Korelasi antara investasi dan tabungan diperkenalkan pertama kali oleh Feldstein dan Horioka (1980). Feldstein dan Horioka meneliti tentang pergerakan kapital internasional di negara-negara OECD. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pergerakan investasi dan tabungan dalam perekonomian terbuka dalam *small open economy* dan *large open economy* memberikan pola tersendiri dalam korelasi investasi dan tabungan pada suatu negara. Dalam penelitian tersebut Feldstein dan Horioka juga menyatakan bahwa dengan pergerakan kapital di dunia secara sempurna maka investasi dan tabungan domestik tidak akan berkorelasi atau memiliki korelasi yang rendah antar negara. Sebaliknya jika pergerakan kapital internasional tidak terjadi secara sempurna maka akan terdapat korelasi yang kuat antara tabungan dan investasi domestik pada suatu negara.

Korelasi antara investasi domestik dan tabungan dapat menjadi tolok ukur terhadap pergerakan modal bagi perkembangan ekonomi suatu negara (Hussain *et,al*, 2011). Namun, tolok ukur tersebut bukan sebagai acuan utama untuk menyimpulkan pergerakan kapital dalam suatu negara. Banyak peneliti yang sependapat dengan Feldstein dan Horioka, namun tidak sedikit pula yang mencoba meneliti kebenaran pendapat tersebut. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pergerakan *capital* tidak hanya diukur berdasarkan korelasi investasi dan tabungan domestik saja. Dalam pergerakan *capital* untuk melihat korelasi antara tabungan dan investasi domestik perlu dipertimbangkan adanya pergerakan variabel ekonomi makro yang dapat mempengaruhi investasi domestik, seperti tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi serta faktor lain yang dapat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara seperti kebijakan pemerintah, kondisi keamanan negara dan faktor politik (Belloc dan Gandolfo, 2002:4). Selain itu skala ekonomi, regulasi *International capital mobility*, serta kondisi perekonomian negara juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pola pergerakan kapital suatu negara (Wahid *et al*, 2008). Berdasarkan hal tersebut, hingga saat ini hasil penelitian Feldstein dan horioka masih menimbulkan perdebatan diantara para peneliti. Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, pergerakan investasi akan cenderung lebih bebas dan tidak terbatas dalam batas negara saja.

Tabungan dan investasi domestik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang selaras. Selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009, persentase tabungan domestik dan investasi domestik terhadap PDB cenderung meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini, ingin melihat bagaimana mobilitas kapital Indonesia dalam perspektif *saving-investment correlation puzzle*

METODA

Model yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi berdasarkan model yang digunakan oleh Martin S. Feldstein dan Charles Horioka (1980), yaitu:

$$\left(\frac{I}{Y}\right) = \alpha + \beta \left(\frac{S}{Y}\right) + e \dots\dots\dots(1)$$

$$RGDI_t = \alpha + \beta RGDS_t + \varepsilon_t \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- I = Investasi Domestik (*Current* US\$)
- S = Tabungan Domestik (*Current* US\$)
- Y = *Gross Domestic Produk* (*Current* US\$)
- $RGDI_t$ = Rasio investasi domestik terhadap *Gross Domestic Product* (dalam %)
- $RGDS_t$ = Rasio tabungan domestik terhadap *Gross Domestic Product* (dalam %)
- ε_t = *Error term*

Spesifikasi model tersebut digunakan oleh Feldstein dan Horioka pada (1980) untuk melihat pergerakan kapital internasional melalui analisis terhadap derajat korelasi antara tabungan dan investasi domestik di OECD. Metode yang digunakan adalah analisis Engle Granger *Error Correction Model* untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang antara tabungan dan investasi domestik di Indonesia. Tahapan prosedur yang digunakan adalah (1) pengujian stasioneritas atau *unit root* masing-masing variabel, (2) pengujian keterkaitan kointegrasi jangka panjang antar variabel (3) estimasi ECM (4) uji Asumsi Klasik

Model Engle Granger *Error Correction Model*

Dalam penelitian ini alat analisis yang dipakai adalah *Error Correction Model* (ECM), yang mampu menjawab analisis jangka panjang dan jangka pendek sekaligus. Jika variabel dalam suatu penelitian yang digunakan tidak stasioner pada tingkat level, tetapi stasioner pada tingkat diferensi dan variabel tersebut terkointegrasi. Maka hal tersebut berarti adanya kointegrasi tersebut merupakan indikasi adanya hubungan jangka panjang (*equilibrium*) antar variabel. Namun, dalam jangka pendek terkadang antar variabel tidak mempunyai hubungan (*disequilibrium*). Ketidakseimbangan tersebut yang terkadang terjadi dalam suatu penelitian yaitu terdapat perbedaan antara apa yang menjadi keinginan dalam tujuan penelitian sehingga perlu diadakan suatu penyesuaian (*adjustment*).

Model yang digunakan untuk menyesuaikan penyesuaian adalah melalui koreksi kesalahan / *error correction model* (ECM). Pendekatan model ECM pertama kali diperkenalkan oleh para ahli ekonometrika melalui pembahasan khusus tentang ekonometrika secara *time series* (Widarjono, 2009:330). Model ECM pertama kali diperkenalkan oleh Sargan dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hendry dan akhirnya dipopulerkan oleh Engle-Granger. Model ECM mempunyai beberapa kegunaan yaitu untuk mengatasi permasalahan yang sering muncul pada data *time series* yang tidak stasioner yaitu masalah regresi lancung (*spurious regression*). Model yang digunakan adalah model dua langkah (*two steps*) dari Engle-Granger. Menurut Engle Granger (E-G) jika dua variabel Y dan X tidak stasioner tetapi terkointegrasi maka hubungan antara keduanya dapat dijelaskan dengan model ECM. Berikut merupakan hubungan jangka panjang model ECM atau keseimbangan antara dua variabel RGDI dan RGDS sebagai berikut:

$$RGDI_t = \beta_0 + \beta_1 RGDS_t \dots\dots\dots(3)$$

Jika RGDI berada pada titik keseimbangan terhadap RGDS maka keseimbangan antara dua variabel RGDS dan RGDI pada persamaan tersebut terpenuhi. Namun, dalam sistem ekonomi pada umumnya keseimbangan variabel-variabel ekonomi jarang ditemui. Jika $RGDI_t$ mempunyai nilai yang berbeda dengan nilai keseimbangannya maka perbedaan sisi kiri dan sisi kanan pada persamaan diatas menjadi sebesar:

$$EC_t = RGDI_t - \beta_0 - \beta_1 RGDS_t \dots \dots \dots (4)$$

Nilai perbedaan EC_t ini disebut sebagai kesalahan ketidakseimbangan (*disequilibrium error*). Jika EC_t sama dengan nol tentunya RGDI dan RGDS adalah dalam kondisi keseimbangan. Namun, pada kenyataannya, variabel RGDI dan RGDS jarang berada dalam kondisi keseimbangan. Sehingga, dibentuk suatu model ketidakseimbangan (hubungan jangka pendek) dengan memasukkan unsur kelambanan RGDI dan RGDS. Persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Widarjono, 2009:330):

$$RGDI_t = b_0 + b_1 RGDS_t + b_2 RGDS_{t-1} + \delta RGDI_{t-1} + e_t \dots \dots \dots (5)$$

dimana: $0 < \delta < 1$, Dalam persamaan (5) dimasukkan unsur kelambanan *first-order lags*. Jika data tidak stasioner dalam tingkat *level* dan dilakukan estimasi, maka hal ini akan menimbulkan masalah. Untuk mengatasinya, maka persamaan (5) perlu dimanipulasi dengan cara mengurangi setiap sisi $RGDI_t$ sehingga persamaan yang terbentuk menjadi:

$$RGDI_t - RGDI_{t-1} = b_0 + b_1 RGDS_t + b_2 RGDS_{t-1} + \delta RGDI_{t-1} + e_t \dots \dots \dots (6)$$

$$RGDI_t - RGDI_{t-1} = b_0 + b_1 RGDS_t - (1 - \delta) [RGDI]_{t-1} + e_t \dots \dots \dots (7)$$

Penambahan dan pengurangan dengan β_1 dan $RGDS_{t-1}$ di sebelah kanan pada persamaan (8) akan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$RGDI_t - RGDI_{t-1} = b_0 + b_1 RGDS_t - b_1 RGDS_{t-1} + b_1 RGDS_{t-1} + b_2 RGDS_{t-1} - (1 - \delta) RGDI_{t-1} + e_t \dots \dots \dots (8)$$

$$\Delta RGDI_t = b_0 + b_1 \Delta RGDS_t + (b_1 \beta_1 + b_1 \beta_2) [RGDS]_{t-1} - \varphi [RGDI]_{t-1} + e_t \dots \dots (9)$$

dimana, Δ menunjukkan perbedaan pertama dan $\varphi = 1 - \delta$. Sehingga, parameterisasi ulang persamaan (9) menjadi:

$$\Delta RGDI_t = b_0 \Delta RGDS_{t-1} \varphi ([RGDI]_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 RGDS_{t-1}) + e_t \dots \dots \dots (10)$$

Dimana, $\beta_0 = \frac{b_0}{\varphi}$

Persamaan (10) menjelaskan bahwa, perubahan RGDI pada masa sekarang dipengaruhi oleh perubahan RGDS dan kesalahan ketidakseimbangan (*error correction component*) pada periode sebelumnya. Kesalahan ketidakseimbangan ini merupakan variabel gangguan pada periode sebelumnya. Pada persamaan (10) parameter φ merupakan parameter penyesuaian, parameter b menjelaskan pengaruh hubungan jangka pendek dan parameter β menjelaskan pengaruh jangka panjang. Sehingga, persamaan (10) sebagai persamaan model ECM dalam jangka pendek dapat ditulis sebagai berikut (Widarjono, 2009:332):

$$\Delta RGDI_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta RGDS_t + EC_t + e_t \dots \dots \dots (10)$$

$$DRGDI_t = \alpha_0 + \alpha_1 DRGDS_t + EC_t + e_t \dots \dots \dots (11)$$

Model ECM yang tersebut biasa dikenal dengan nama model dua langkah (*two steps*) oleh Engle-Granger. Menurut Engle Granger, jika terdapat persamaan yang tidak

stasioner namun terkointegrasi maka hubungan antara keduanya dapat dijelaskan melalui model ECM (Widarjono, 2009:334).

PEMBAHASAN

Uji Akar Unit

Tabel 1. Hasil Uji Akar-Akar Unit pada Data *Level* negara Indonesia

Variabel	ADF Statistik	Nilai Kritis ADF			Keterangan
		1%	5%	10%	
RGDI	-2.803120	-3.596616	-2.933158	-2.604867	Tidak Stasioner
RGDS	-3.783618	-3.596616	-2.933158	-2.604867	Stasioner*

ADF statistik > nilai kritis ADF = stasioner; ADF statistik < nilai kritis ADF = tidak stasioner; *signifikan pada $\alpha=1\%$; **signifikansi $\alpha=5\%$;

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa variabel RGDI dan RGDS masih belum menunjukkan data yang stasioner pada tingkat level. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ADF statistik yang kurang dari nilai kritis McKinnon, pada derajat keyakinan 1%, 5% dan 10% untuk variabel RGDI.

Hasil uji stasioner pada tingkat *first difference* dapat disajikan dalam bentuk tabel 2. Dari hasil uji stasioneritas pada tingkat *first difference*, dapat dilihat bahwa nilai variabel RGDI telah stasioner pada tingkat *first difference*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai mutlak ADF Statistik yang lebih besar daripada nilai kritis McKinnon baik pada derajat keyakinan 1%, 5%, dan 10%.

Tabel 2. Hasil Uji Akar-Akar Unit pada Data *First Difference*

Variabel	ADF Statistik	Nilai Kritis ADF			Keterangan
		1%	5%	10%	
D(RGDI)	-5.935077	-3.605593	-2.936942	-2.606857	Stasioner*
D(RGDS)	-5.806601	-3.605593	-2.936942	-2.606857	Stasioner*

*signifikan pada $\alpha=1\%$; **signifikansi $\alpha=5\%$

Uji Kointegrasi

Tabel 3. Hasil Uji Kointegrasi

Variabel	PP	ADF	Probabilitas
D(EC)	-6.911844	-6.930921	0.0000*

*signifikansi $\alpha=1\%$; **signifikansi $\alpha=5\%$

Berdasarkan hasil dari uji kointegrasi yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai ADF (Augmented Dickey-Fuller) dan nilai PP (Phillips-Perron) lebih tinggi daripada nilai kritis MacKinnon dan didukung dengan signifikannya probabilitas ADF dan PP pada derajat keyakinan yang ditunjukkan pada tabel. Hal ini menunjukkan adanya kointegrasi diantara variabel-variabel dalam pengamatan dan dinyatakan pula EC (residual) telah stasioner. Dengan demikian variabel EC dapat digunakan dalam model jangka pendek ECM. Hasil tersebut secara keseluruhan juga dapat dikatakan bahwa terdapat indikasi adanya hubungan jangka panjang antar variabel dalam pengamatan.

Hasil Estimasi ECM

Tabel 3. Hasil Estimasi Jangka Pendek ECM Indonesia

Variable	Coefficient	t-Statistik	Prob.
C	0.000819	0.190838	0.8496
D(RGDS)	0.558307	5.041039*	0.0000
EC(-1)	-0.374221	-3.002741*	0.0047
R-squared	0.455301	F-statistic	16.29958
Durbin-Watson stat	1.810702	Prob(F-statistic)	0.000007

*signifikansi $\alpha:1\% = 2.423$; ** $\alpha:5\% = 1,684$

Berdasarkan tabel 4.20, koefisien kesalahan ketidakseimbangan EC_t di Indonesia secara statistik signifikan, sehingga spesifikasi model ECM yang digunakan untuk Indonesia dapat diaplikasikan untuk mengestimasi kasus di Indonesia. Nilai koefisien EC_t sebesar **0.374221** yang berarti bahwa perbedaan nilai aktual RGDI dengan nilai keseimbangannya sebesar **0.374221**. Variabel RGDS secara statistik juga memiliki nilai yang signifikan dan mempunyai tanda positif sebesar 0.558307. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien t-statistik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan t-tabel pada 1% dan 5%. Sehingga, hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek perubahan RGDS akan berpengaruh positif terhadap perubahan RGDI.

Nilai koefisien RGDS sebesar 0.558307 berarti jika terjadi peningkatan rasio tabungan sebesar satu persen maka hal tersebut juga akan meningkatkan rasio investasi domestik sebesar 0.558307 persen dalam jangka pendek. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan adanya hubungan yang positif antara investasi dan tabungan di Indonesia yang berarti terjadi *saving-investment correlation puzzle* di Indonesia.

Tabel 4. Hasil Estimasi Jangka Panjang ECM Indonesia

Variable	Coefficient	t-Statistik	Prob.
RGDS	0.682677	9.598341*	0.0000*
C	0.057751	2.834055	0.0071
R-squared	0.692026	F-statistic	92.12816
Durbin-Watson stat	0.762159	Prob(F-statistic)	0.000000

*signifikansi $\alpha:1\% = 2.423$; ** $\alpha:5\% = 1,684$

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang ECM di Indonesia, menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel RGDS terhadap variabel RGDI yang ditunjukkan dengan nilai koefisien pada RGDS sebesar **0.682677**. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam jangka panjang terjadi hubungan yang cukup tinggi antara rasio tabungan domestik dan rasio investasi domestik di Indonesia, dimana perilaku investasi domestik di Indonesia dipengaruhi oleh perilaku tabungan domestiknya. Berdasarkan perspektif *saving-investment correlation puzzle*, maka dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Indonesia terjadi fenomena *saving-investment correlation puzzle*. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa terdapat *capital mobility* yang rendah di Indonesia. *Capital mobility* yang rendah menunjukkan bahwa integrasi ekonomi antar negara, belum dimanfaatkan secara optimal, karena dengan *capital mobility* yang rendah maka investasi dan tabungan domestik tidak bergerak bebas untuk mencari laba atau *return* yang memberikan hasil yang lebih tinggi daripada *return* di dalam negeri. Selain itu, *capital mobility* yang rendah akan memperlambat pertumbuhan akumulasi kapital yang dapat dijadikan pendorong bagi pembangunan perekonomian Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kuantitatif dengan model *error correction* dapat disimpulkan bahwa di Indonesia terjadi *saving-investment correlation puzzle* di ASEAN dalam jangka pendek maupun jangka panjang Dimana perilaku investasi domestik di Indonesia dipengaruhi oleh perilaku tabungan domestiknya yang ditunjukkan dengan variabel RGDS sebagai rasio tabungan domestik memiliki nilai positif dan signifikan terhadap variabel RGDI. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *capital mobility* di Indonesia rendah

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami ucapkan terhadap panitia seminar nasional UNIPDU, atas kesempatan yang diberikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ranah intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- International Financial Statistik 2009*, International Monetary Fund
- Boon Tan Hui, 2000, *Saving, investmen and Capital Flows: An Empirical Study on The Asean Economies*. Departement of Economics Faculty of Economics Management
- Martin S. Feldstein dan Charles Horioka 1980, *Domestic Saving and International Capital Flows*, The Economic Journal
- Thomas, R.L, 1997, *Modern Econometrics An Introduction*, Addison-Wesley, England
- Gujarati, 2003, *Basic Econometrics*, McGraw-Hill Higher Education, Singapore
- Hussein et al, 2001, *The Feldstein-Horioka Paradox In The Perspective Of Foreign Direct Investment (FDI): A Pragmatic Validation*, Government College University, Lahore, Paskistan
- Susilowati Dwi, 2005, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*, Univesity Putra Malaysia Serdang, Selanggor Malaysia
- Wahid Abu N.M et al, 2008, *Saving Investment Correlation in South Asia-Panel Approach*, Tennessee State University

Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah

Sanusi Fattah¹, Irman¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat ketergantungan fiskal dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dengan mengukur kinerja / kapasitas keuangan pemerintah daerah menggunakan tingkat kesiapan Desentralisasi Fiskal dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, jika sepenuhnya didanai oleh pendapatan pemerintah daerah dan lokal bagi hasil dana. Data dalam bentuk penelitian laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada 2001-2008. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja / kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih rendah ketika diukur oleh tingkat Indikator Desentralisasi Fiskal, serta kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah, terutama di bidang keuangan, yang diukur dengan seberapa jauh kemampuan urusan ketika pembiayaan yang sepenuhnya didanai oleh pendapatan pemerintah daerah dan dana bagi hasil masih rendah. Hal ini menggambarkan tingkat ketergantungan Pemerintah Fiskal di daerah ini masih tinggi.

Abstract

This study aims to determine the level of fiscal dependence of the South Sulawesi Provincial Government by measure the performance / financial capacity of local governments using the degree of Fiscal Decentralization readiness and local governments in financial management, if fully funded by local government revenue and the local revenue sharing funds.

Data in the form of research reports Local Government Finance Statistics and the population of South Sulawesi province in 2001-2008. While the analysis method used was descriptive statistics.

The results showed that the performance / financial capability of South Sulawesi Provincial Government is still low when measured by the degree of Fiscal Decentralization Indicator, as well as readiness of local government in the face of regional autonomy, especially in finance, as measured by how far the ability of affairs when the financing is fully funded by local government revenue and revenue sharing funds is still low. This illustrates the level of Government Fiscal dependence in this area is still high.

Keywords: *Autonomy, performance / capability of Finance, Regional Readiness, Fiscal dependency.*

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan isu strategis konsep pembangunan ekonomi berbasis Desentralisasi di Indonesia. Tujuan yang paling penting dan kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk memberi wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah terutama dalam mengatur pembangunan daerahnya sendiri. 1 Januari tahun 2001 merupakan awal diberlakukannya kebijakan Otonomi daerah, pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut.

Keseriusan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah diwujudkan dengan dihasilkannya UU No. 22 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan di pemerintah daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 33 mengenai Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai aturan umum dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Kecuali Aceh dan Propinsi Papua yang memperoleh otonomi khusus.

Adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi yang lain, adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah prosentase Pendapatan Asli Daerah, relatif lebih kecil, sekitar 25% dari total penerimaan daerah. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah (Yani, 2002: 3). Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

METODA

Metode analisa yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabulasi dan visualisasi berupa grafik, dengan ukuran-ukuran statistik sederhana seperti jumlah (total), rata-rata, pertumbuhan, persentase (%), proporsi, rasio yang dapat diterapkan sebagai alat analisis (Manurung, 2008).

Untuk melihat tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengukur kinerja/kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (Musgrave & Musgrave, 1980). Berdasarkan Sukanto Reksohadiprojo (2001) dalam bukunya "*Ekonomi Publik*" untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilakukan dengan cara:

$$1) \text{ Proporsi PAD terhadap TPD} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}}$$

$$2) \text{ Proporsi BHPBP terhadap TPD} = \frac{\text{BHPBP}}{\text{TPD}}$$

$$3) \text{ Proporsi SD terhadap TPD} = \frac{\text{SD}}{\text{TPD}}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk daerah

SD = Sumbangan Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Untuk mengukur tingkat Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah, Skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal dilakukan dengan menggunakan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pola Hubungan dan tingkat kemampuan daerah

Kemampuan/Ketergantungan Keuangan	Persentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	<i>instruktif</i>
Rendah	25%-50%	<i>konsultatif</i>
Sedang	50%-75%	<i>partisipatif</i>
Tinggi	75%-100%	<i>delegatif</i>

Sumber ; Nadeak, 2003;21

Tabel 3.2 Skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00-10,00	Sangat Kurang
10,01 -20,00	Kurang
20,01 -30,00	Cukup
30,01 -40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber. Depdagri, 1991: 20

Melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan membiayai belanja daerah bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil. Rasio yang digunakan adalah sebagai berikut (Sumarsono, 2009):

1. Perbandingan PAD dengan Total Belanja
2. Perbandingan PAD dengan Belanja Tidak Langsung
3. Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Total Belanja
4. Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Belanja Tidak Langsung
5. Perbandingan PAD per Kapita dengan Belanja Tidak Langsung per Kapita
6. Perbandingan PAD per Kapita dengan Total Belanja per Kapita
7. Perbandingan PAD + Bagi Hasil per Kapita dengan Total Belanja per Kapita

8. Perbandingan PAD + Bagi Hasil per Kapita dengan Belanja Tidak Langsung per Kapita

Untuk mengukur Skala interval Kemampuan dalam membiayai Belanja Daerah dilakukan dengan menggunakan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Interval Kemampuan dalam membiayai Belanja Daerah

%	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 - 20,00	Sangat Kurang
20,01 -40,00	Kurang
40,10-60,00	Cukup
60,10-80,00	Baik
80,10-100	Sangat Baik

Sumber : Sri Wahyuni, 2008;42

PEMBAHASAN

Hasil analisis dari kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) pada era otonomi daerah dapat dijelaskan dengan uraian berikut ini:

Proporsi PAD terhadap TPD dengan rata-rata per tahunnya yang sebesar 6,78% jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pada pemerintah pusat masih tinggi. Dengan sumbangsuhnya pemerintah pusat pada APBD sebesar 93,22%.

Proporsi BHPBP terhadap TPD Proporsi BHPBP terhadap TPD dengan rata-rata per tahunnya yang sebesar 8,62% jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pada pemerintah pusat masih tinggi. Dengan sumbangsuhnya pemerintah pusat pada APBD sebesar 91,38%.

Proporsi SD terhadap TPD Perbandingan dengan rata-rata per tahunnya yang sebesar 85,27%. Jadi dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal (kemandirian daerah) yang dilihat dari prosentase SD terhadap TPD pada era otonomi daerah menguat. Namun, jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian keuangan daerah yang hanya 14,73% maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif* yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

Untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil dapat disimpulkan dengan uraian sebagai berikut:

Prosentase rata-rata PAD terhadap Pengeluaran Total Daerah sebesar 7,32%. Jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*, tingkat kesiapan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan masih kurang untuk menopang total pengedarannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pada pemerintah pusat masih tinggi yaitu sekitar 92,68%.

Perbandingan PAD terhadap Pengedaran Rutin Daerah dengan rata-rata per tahunnya sebesar 15,31%. Jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif* tingkat kesiapan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan masih kurang dalam menopang pengeluaran rutin pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pada pemerintah pusat masih tinggi yaitu sekitar 84,69%.

Perbandingan PAD+BHPBP terhadap Pengeluaran Total Daerah prosentase rata-rata sebesar 16,56% per tahunnya. Jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*, kesiapan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih tinggi yaitu sekitar 83,44%.

Perbandingan PAD+BHPBP terhadap Pengeluaran Rutin Daerah dengan rata-rata 35,39% tiap tahunnya apabila dilihat dengan rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *konsultatif* pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. Hal ini ditunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih ada yaitu sekitar 64,71%.

Perbandingan PAD per Kapita terhadap Pengeluaran Rutin per Kapita dengan prosentase sebesar 15,32% akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*. Dengan begitu, tingkat kesiapan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang untuk menopang Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sekitar 84,68%.

Perbandingan PAD per Kapita terhadap Pengeluaran Total per Kapita dengan prosentase rata-rata sebesar 7,32% akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*, kesiapan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang untuk menopang Pengeluaran Total per Kapita Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sekitar 92,68%.

Perbandingan PAD+BHPBP terhadap Pengeluaran Total Daerah dengan prosentase sebesar 16,56% akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*, kesiapan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan masih kurang mampu dalam menopang Pengeluaran Total per Kapita. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sekitar 83,44%.

Perbandingan PAD+BHPBP per Kapita terhadap Pengeluaran Rutin Daerah per Kapita yang mencapai 35,39% tiap tahunnya apabila dilihat dengan rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *konsultatif*. Kesiapan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sudah sedikit lebih mampu dalam menopang Pengeluaran Rutin atau pembiayaan pemerintahannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih ada yaitu sekitar 64,71%.

KESIMPULAN

1. Dari hasil analisis derajat desentralisasi fiskal di atas yang menunjukkan hasil yang masih sangat kurang, maka dapat dikatakan bahwa kinerja/kemampuan keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan masih sangat kurang yaitu sekitar 6,78 % sampai 8,62% . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan terhadap Pemerintah Pusat pada era otonomi daerah masih tinggi yaitu berkisar antara 85,27% sampai 93,22%.

2. Dari hasil analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan yang diukur dari seberapa jauh kemampuan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dalam membiayai belanja daerah bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil, maka apabila dilihat prosentase rata-rata perbandingan PAD terhadap Total Belanja daerah yang sebesar 7,32% dan PAD terhadap Belanja Tidak Langsung daerah yang sebesar 15,71%, dan juga prosentase rata-rata PAD+BHPBP terhadap Total Belanja Daerah yang sebesar 16,56% dan PAD+BHPBP terhadap Belanja Tidak Langsung yang sebesar 35,39% maka dapat dikatakan bahwa Kesiapan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dibidang keuangan dalam pembiayaan belanja daerahnya masih sangat kurang. Hal menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan terhadap Pemerintah Pusat pada era otonomi daerah masih tinggi yaitu berkisar antara 64,61% sampai 92,68%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satyawacana Salatiga.
- Bambang Tata S, 2003, *Pola Keuangan Pemerintah Kota (Urban Finance) Kajian Tentang Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Pada Periode Pelaksanaan Otonomi Tahun Pertama*
- Halim, Abdul (2001) *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN, 2002.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Public "Akuntansi Keuangan Daerah"*, Salamba Empat, Jakarta, 2002
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Public "Akuntansi Keuangan Daerah"*, Edisi Revisi, Salamba Empat, Jakarta, 2004
- Haryati, Sri, 2006, "*Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah" Sebelum Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan 2001-2003*.
- Insukirno, dkk, 1994, *Peranan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah"*, Laporan Penelitian, FE-UGM, Yogyakarta.
- LPEM-FEUI, 2000. *Laporan Akhir Kebijakan Desentralisasi Dalam Masa Transisi*.
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2002) *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/Artikel_3.htm
- Manurung, Romulus. 2008. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan. Pusat Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan R.I.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi Perencanaan, Strategi Dan Peluang*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Nadeak, Ruslina. 2003. "*Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah"*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Sanata Dharma.
- Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, 1980, *Public Finance in theory and Practice*, edisi ke-3, McGraw Hill International Book Company, Tokyo, 1980.
- Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan*, Berbagai Edisi, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sulawesi Selatan Dalam Angka*, berbagai Edisi, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Model Pendekatan Modal Sosial Kelompok Peminjam Untuk Optimalisasi *Repayment Rate* Pada Lembaga Keuangan Mikro-Swadaya Masyarakat

Sebastiana viphindrartin¹

¹Fakultas Ekonomi – Universitas Jember

e-mail: pipin_center@yahoo.com

Abstrak

Kredit macet yang tinggi (non performing loan) dan tingkat pengembalian (*repayment rate*) dana bergulir yang rendah pada kelompok peminjam di wilayah tapal Kuda Jawa Timur pada program Lembaga Keuangan Mikro Swadaya Masyarakat (LKM-SM) disebabkan pelaksanaan program pinjaman dana bergulir program Lembaga Keuangan Mikro Swadaya Masyarakat masih berdasarkan pada tataran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang ditunjang dengan data-data kualitatif, model yang dipakai adalah model kausalitas yang menggunakan Model Persamaan Struktural (structural equation modelling-SEM) berbasis component atau variance dengan Partial Least Square (PLS). Sementara, untuk menguatkan analisis penelitian juga dilakukan interpretasi data kualitatif. Disimpulkan bahwa karakteristik budaya dan modal sosial pada masyarakat tertentu berpengaruh positif terhadap perilaku masyarakat penerima manfaat dalam melakukan pengembalian pinjaman dan mencerminkan efektif atau tidaknya sebuah program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat walaupun tidak secara signifikan.

Kata kunci: optimalisasi repayment rate, lkm-sm, kelompok peminjam, modal sosial.

Abstract

High rate of non-performing loans and low rate of return revolving fund (repayment rate) in the lending group in the region of East Java's horse poultrice on Community's Microfinance Institutions program is caused by implementation program of revolving fund loan program. This study uses quantitative methods which are supported by qualitative data, the used model is a causal model using Structural Equation Model (SEM)-based component or variance with Partial Least Square (PLS). Meanwhile, to strengthen the research analysis was also conducted qualitative data interpretation. From the discussion, it can be concluded that by using more specific social capital on the lending group of Arek/coastal and Mataraman culture-based affect the achievement of repayment rate and program effectiveness (sustainability). In contrast to the group of Madurese culture-based lending group, repayment rates do not affect the performance and program effectiveness (sustainability). The role of government, in the Mataraman and Arek culture based lending group does not affect the achievement of repayment rate, contrary to the Madurese culture based lending group, the role of government proved influential on the outcomes of repayment rate. In all three cultural based lending groups, repayment rates proved influence the achievement of the program effectiveness (sustainability), otherwise the role of government in all three cultural based lending groups, does not affect the program effectiveness.

Keywords: repayment rate optimization, MFI, the lending group, social capital.

PENDAHULUAN

Satu strategi yang diyakini mampu memberikan kontribusi pada pengurangan jumlah penduduk miskin adalah dengan mengembangkan keuangan mikro, peranan Lembaga Keuangan Mikro Swadaya Masyarakat (LKM-SM) sangatlah penting, dikarenakan masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh (*undeserved*) dan dinilai tidak layak bank (*not bankable*), sehingga diasumsikan tingkat pengembalian kreditnya rendah dan mahal biaya transaksinya. Akibat asumsi tersebut, maka aksesibilitas dari masyarakat terhadap sumber keuangan formal terhambat. Keberhasilan lembaga keuangan ditentukan oleh kualitas portofolio, khususnya tingkat pengembalian pinjaman (*repayment rate*) yang merupakan prasyarat utama agar sebuah LKM mampu mandiri dan *sustainable* dalam jangka panjang.

Menurut Viphindartin (2010) kelompok peminjam di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur memiliki kecenderungan capaian *repayment rate* yang rendah dalam program LKM-SM. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang dilakukan untuk menjaga capaian *repayment rate* tetap tinggi adalah dengan menerapkan aturan formal yang kaku, dan mengabaikan modal sosial yang ada dalam masyarakat. Karena dalam hal pembentukan kelompok peminjam seringkali didasari kesamaan budaya dan latar belakang masing-masing anggota kelompok.

Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendekatan modal sosial. Modal Sosial dinilai efektif dalam memberikan dorongan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, keyakinan ini bertumpu pada kekuatan yang dimilikinya yaitu *trust*, *norms*, resiprokal dan *network* untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir.

Modal Sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Sumberdaya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Sumberdaya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi Modal Sosial cukup luas dan kompleks. Modal Sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu Modal Manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada Modal Sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Fukuyama (2002) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan, dan terutama bagi kestabilan pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pada masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi yang besar cenderung akan meraskan kemajuan dan akan mampu, secara efisien dan efektif, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat.

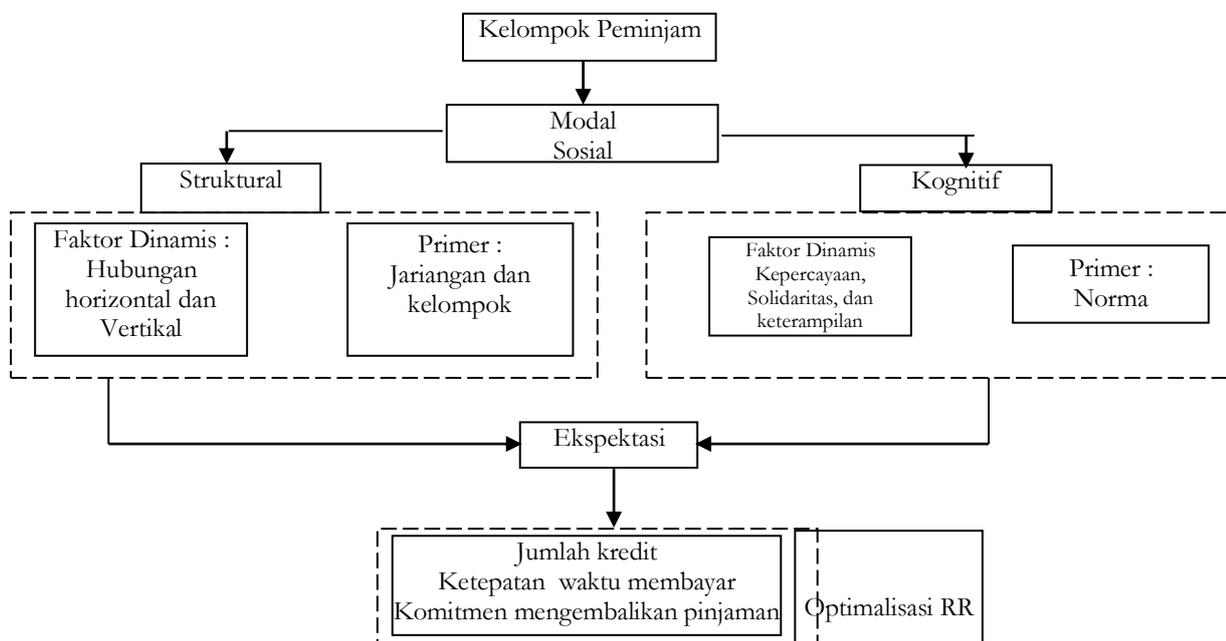
METODA

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif eksplanatori sebagai metode utama untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang ditunjang dengan data-data kualitatif, model yang dipakai adalah model

kausalitas yang menggunakan Model Persamaan Struktural (*structural equation modelling-SEM*) berbasis *component* atau *variance* dengan *Partial Least Square (PLS)*. Sementara, untuk menguatkan analisis penelitian juga dilakukan interpretasi data kualitatif. Penerapan metode ini ditujukan untuk: mengetahui peran modal sosial dalam kelompok peminjam terhadap optimalisasi *repayment rate* pada LKM-SM di wilayah Tapal Kuda. Penelitian ini mencoba melakukan perumusan formula pendekatan dengan menggunakan modal sosial yang lebih spesifik untuk optimalisasi tingkat pengembalian pinjaman kelompok peminjam. Dengan tahapan: identifikasi, menggambarkan dan memahami pendekatan modal sosial dalam kelompok peminjam serta ujicoba pendekatan model modal sosial yang sesuai, evaluasi untuk perbaikan dan pematapan pendekatan model modal sosial.

Penelitian ini dipertimbangkan sebagai penelitian evaluasi dengan metode campuran, yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Menurut Creswell (2007), pendekatan campuran digunakan untuk mendapatkan data yang berbeda namun saling melengkapi tentang topik yang sama sehingga diperoleh pemahaman terbaik mengenai persoalan yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk perbandingan dan pelawanan secara langsung antara hasil statistik pendekatan kuantitatif dengan hasil penemuan dari pendekatan kualitatif disamping juga untuk memvalidkan atau memperluas hasil penemuan kuantitatif dengan data kualitatif.

Lingkup penelitian ini mencakup tahapan penelitian murni dan penelitian partisipatoris, yang masing-masing melibatkan tahap Pengukuran, Identifikasi, Inventarisasi, sosialisasi, uji coba model, monitoring dan evaluasi serta penyusunan model modal sosial dalam rangka pengembangan program keuangan mikro swadaya masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta melibatkan pendekatan holistik.



Gambar 1: Kerangka Pemikiran Penelitian

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis statistik data dan SEM berbasis PLS serta hasil temuan di lapangan, terungkap bahwa pemahaman dan pendekatan modal sosial yang spesifik pada masyarakat tertentu mempengaruhi perilaku kelompok penerima manfaat dalam melakukan pengembalian pinjaman dan efektif atau tidaknya sebuah program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat, maka pembahasan terhadap masing-masing budaya adalah sebagai berikut:

Pertama, pada masyarakat berbasis budaya Mataraman dan Arek/Pesisir cenderung mempengaruhi capaian *repayment rate* (RR) program kredit mikro. budaya diukur dengan menggunakan indikator nilai dan norma, hubungan, imbalan dan pengakuan, proses mental dan pembelajaran, kesadaran waktu, komunikasi, kepercayaan dan sikap dan pribadi dan ruang. diantara delapan indikator budaya tersebut, nilai dan norma menempati posisi tertinggi menurut persepsi responden. Temuan di lapangan menggambarkan bahwa masyarakat budaya Mataraman masih memegang teguh nilai-nilai seperti nilai religius, kejujuran, kekeluargaan dan tolong-menolong serta mematuhi norma-norma adat maupun agama yang ada. Begitu pula halnya dengan masyarakat budaya Arek/Pesisir yang masih memegang teguh nilai-nilai, seperti nilai kesetiakawanan, soliditas, kejujuran dan tanggung jawab. Nilai-nilai budaya tersebut tercermin dalam aktivitas kelompok peminjam dan pada tahapan program dana bergulir kredit mikro. Namun, hasil yang berbeda terjadi pada masyarakat berbudaya Madura, hasil penelitian menyatakan bahwa budaya cenderung tidak mempengaruhi capaian *repayment rate* pada kelompok peminjam yang berbasis budaya Madura. Kelompok peminjam berbasis budaya Madura sebenarnya masih mengakui pentingnya aspek budaya dalam mendukung aktivitas ekonomi mereka. Tetapi dalam realitas dilapangan masyarakat Madura cenderung mengabaikan nilai-nilai budaya tersebut, seperti pengabaian terhadap norma-norma agama, padahal selama ini, stigma orang Madura adalah orang yang religius dan patuh terhadap aturan agama. Sehingga untuk *mengemplang* dana pinjaman mereka tidak takut akan sanksi agama. Rasa tanggung jawab pada kelompok peminjam yang berbasis budaya Madura rendah hal ini terlihat dari pemaknaan dana pinjaman yang merupakan hadiah dari pemerintah dan tidak perlu dikembalikan, hal inilah yang menyebabkan adanya asimetris informasi antara tujuan program perguliran dengan persepsi masyarakat berbasis budaya Madura.

Kedua, Dari ketiga budaya yang diteliti, kelompok peminjam yang berbasis budaya Mataraman mempunyai kecenderungan capaian RR yang tinggi, kemudian diikuti oleh budaya Arek/Pesisir dan terakhir adalah kelompok yang berbasis budaya Madura.

Ketiga, peran pemerintah pada kelompok peminjam berbasis budaya Mataraman dan Arek/Pesisir cenderung tidak mempengaruhi dalam capaian *repayment rate* (RR). Hal ini dijelaskan bahwa peran pemerintah yaitu dalam pembuatan kebijakan, penyedia fasilitas dan monitoring bukan menjadi ukuran kelompok peminjam untuk meningkatkan *repayment rate*. Temuan di lapangan menggambarkan bahwa peran pemerintah, dalam hal ini melalui Badan Keswadayaan Masyarakat, dalam hal pendampingan melalui fasilitator kelurahan belum mampu bersinergi kebutuhan kelompok peminjam. Peran pendamping masih seperti juru tagih, belum pada tataran membantu kelompok dalam memberdayakan dirinya serta meningkatkan kemampuan usahanya. Disamping itu sosialisasi yang dilakukan terkesan formalitas, dengan demikian masih banyak kelompok peminjam yang belum memahami pentingnya program perguliran dana melalui program kredit mikro tersebut. Namun hal ini berbeda dengan hasil pada kelompok peminjam yang berbasis budaya Madura, bahwa peran pemerintah cenderung mempengaruhi capaian RR. Hal ini

disebabkan adanya peningkatan intervensi UPK/BKM dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap kelompok peminjam.

Keempat, pemahaman dan pendekatan modal sosial yang spesifik pada kelompok peminjam berbasis budaya Mataraman dan Arek/Pesisir cenderung mempengaruhi tingkat efektivitas program kredit mikro. Hal ini disebabkan penerapan pendekatan budaya terhadap aktivitas program, terutama dalam partisipasi masyarakat dalam aktivitas program, kemudian lahirnya kepercayaan antara kelompok peminjam terhadap pengelola program, dalam hal ini UPK dan BKM sehingga munculnya sinergi dalam upaya mencapai keberhasilan program. seperti sering dilakukannya rembug bersama antara kelompok peminjam dengan BKM. Berbeda dengan kelompok peminjam berbasis budaya Madura, hasil penelitian menggambarkan bahwa pendekatan dan pemahaman modal sosial tidak mempengaruhi tingkat efektivitas program kredit mikro. Karakter masyarakat yang antipati terhadap program P2KP menyebabkan komunikasi dan sinergi dalam mencapai keberhasilan program tidak terjalin. Hal ini karena adanya ketakutan dari masyarakat, terutama yang pernah mendapatkan pinjaman dana bergulir pada awal pelaksanaan program yang tidak mengembalikan hingga saat ini. Sehingga apapun yang berkaitan dengan program tersebut, bagi masyarakat dianggap mencari masalah dengan mereka.

Kelima, peran pemerintah pada kelompok peminjam berbasis budaya Mataraman, Arek/Pesisir dan Madura cenderung tidak mempengaruhi dalam tingkat efektivitas program. peran pemerintah dalam program kredit mikro belum mengoptimalkan pendekatan melalui nilai-nilai modal sosial, sehingga terkesan aktivitas program yang dilakukan hanya untuk memenuhi target program tanpa meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk terlepas dari jerat kemiskinan. Seperti pembentukan kelompok peminjam hanyalah manipulatif, dengan memasukkan individu-individu yang sebelumnya tidak tergabung dalam satu kelompok dijadikan dalam satu kelompok, hal ini hanya untuk memenuhi syarat agar dapat melakukan pinjaman. Sehingga soliditas dan kebersamaan dalam kelompok tidak terjalin, akibatnya tanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman juga tidak dijalankan dengan tanggung renteng namun menjadi tanggung jawab pribadi. Hal ini, menyebabkan rentannya tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir. Selanjutnya hal tersebut juga menyebabkan partisipasi masyarakat terhadap aktivitas program tidak terjadi.

Keenam, *repayment rate* pada kelompok peminjam berbasis budaya Mataraman, Arek/Pesisir dan Mataraman mempengaruhi tingkat efektivitas program. Hal ini dijelaskan dengan penjelasan bahwa *repayment rate* merupakan salah satu indikator pengukur dari efektivitas program. Hal ini dijelaskan dengan penjelasan bahwa *repayment rate* merupakan salah satu indikator pengukur dari efektivitas program.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa karakteristik budaya, modal sosial dan hubungan sosial dalam lingkup kelompok peminjam dapat mempengaruhi interaksi para anggota dalam kelompok berpengaruh positif terhadap perilaku masyarakat penerima manfaat dalam melakukan pengembalian pinjaman dan mencerminkan efektif atau tidaknya sebuah program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat walaupun tidak secara signifikan.

Jika dilihat dari kecenderungannya, maka secara umum ketiga basis budaya masyarakat yaitu Mataraman, Arek dan Madura hubungan sosialnya dapat terbangun karena kekerabatan, kesamaan kepercayaan, kesamaan wilayah dan kesamaan aktivitas keseharian. Masyarakat berbasis budaya Mataraman lebih mudah melakukan hubungan sosialnya atas dasar kekerabatan dan kesamaan kepercayaan. Sedangkan masyarakat berbudaya Arek berkecenderungan hubungan sosialnya terbangun karena kesamaan wilayah, kekerabatan dan kesamaan aktivitas keseharian. Sementara itu, masyarakat berbudaya Madura secara prinsip hubungan sosialnya terbangun atas dasar kekerabatan, kesamaan kepercayaan dan aktivitas keseharian. Namun, kecocokan perilaku, pendapat, pandangan dan pendirian juga menjadi dasar yang kuat dalam membangun relasi sosialnya. Hal itu tergambar dari ungkapan budaya *oreng dhaddhi taretan, taretan dhaddhi oreng*, (orang lain bisa menjadi/dianggap sebagai saudara sendiri, sedangkan saudara sendiri bisa menjadi/dianggap sebagai orang lain). Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana relasi sosial yang tercermin dari masing-masing kelompok budaya tersebut menjadi dasar pembentukan KSM, memperkuat interaksi di dalam kelompok serta dapat menstimulus peningkatan *repayment rate* dan efektivitas program.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999. Jakarta, 1999,.
- Buss, Terry F. "Microenterprise in International Perspective: An Overview of the Issues". *International Journal of Economic Development*. , 1999, p. 1-28
- Departemen Kelautan dan Perikanan, Pedoman Umum, Sekretariat DKP, 2006.
- Djojomartono. "Adat-istiadat sekitar kelahiran pada masyarakat Nelayan di Madura", dalam Ritus Peralihan di Indonesia (Koentjaraningrat). Blai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Gema PKM. "Kemiskinan dan Keuangan Mikro", KPK, 2003.
- Ismail, Munawar, Sumbangan Institusi Lokal dalam Pembangunan Ekonomi, dalam Iwan Triuwono dan Erani Yustika (editor), Emansipasi Nilai Lokal, Bayu Media, Malang, 2003.
- O'Malley, William J., budaya dan Masalah Industrialisasi, dalam Helen Hughes (editor), Keberhasilan Industrialisasi di asia Timur, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- P2KP, Pedoman Umum P2KP, manual Proyek, Jakarta, Sekretariat P2KP Pusat, 1999.
- Patten, Richard H, Jay K. Rosengar, The Development of Rural Banking in Indonesia, San Fransisco: ICS Press, 1991.
- Robinson, MS. The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for the Poor. The World Bank, 2001.
- Rozi, MF, Peran Local Genius dalam Arsitektur Perekonomian Indonesia, Seminar Prosiding Konferensi Ekonomi Nasional Universitas Widya Mandala, Surabaya, 2006.
- Sebstad, J. Toward Guidelines for Lower-Cost Impact Assessment Methodologies for Microenterprise Program. Discussion Paper for The Second Virtual Meeting of The CGAP Working Group on Impact Assessment Methodologies. AIMS. Management System Intemationat Washington D.C. 1998, p. 1-23.
- Sumodiningrat, G. "Poverty Alleviation in Indonesia: An Overview, District and Rural Development National Development Planning Agency" Bappenas, 1998.
- Sutarto, Ayu dan Setya Y Sudikan. "Pemetaan Kebudayaan Di Provinsi Jawa Timur, Sebuah Upaya Pencarian Nilai-Nilai Positif", Jember, Biro Mental Spiritual Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kompyawisda, 2008.

**Pengukuran Kinerja Industri Kecil
(Studi Empirik Pada Industri Kerajinan Tas Dan Koper Di Kabupaten
Sidoarjo)**

Siti Komariyah¹

¹Dosen Fak. Ekonomi Universitas Jember

Email: kokomalamsyah@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap kinerja Industri kecil di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Faktor internal yang diteliti adalah variabel bauran produk, tenaga ahli, kapasitas produksi, dan tingkat upah. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari variabel dukungan pemerintah, pemasok, dan pesaing. Populasi dari penelitian ini adalah kelompok pengrajin tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo yang tergolong dalam kelompok industri kecil formal dan telah terdaftar pada kantor Dinas Perindustrian Sidoarjo. Sampel yang diambil dari populasi dilakukan dengan metode Cluster Random Sampling. Jumlah sampel untuk setiap area (lokasi) ditentukan secara proporsional. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa secara serempak faktor pemerintah, pemasok, pesaing, bauran produk, tenaga ahli, kapasitas produksi, dan tingkat upah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa dari ketujuh faktor yang dianalisis ternyata faktor pemasok mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : Kinerja, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Industri Kecil

Abstract

This study aims to determine impacts of internal and external factors on the performance of small industry in Kabupaten Sidoarjo, East Java. The internal factors observed in the study were product mix, experts, production capacity, and wage levels. The external factors consisted of government supports, suppliers and competitors. The population of this study was a group of handbag and suitcase makers formally registered as members of small handicraft association in Sidoarjo. All members were officially registered at the Dinas Perindustrian Sidoarjo (Sidoarjo Office for Industrial Affairs). Samples were taken with Cluster Random Sampling method. Sample sizes for each area (location) were determined in proportion to the number of handicraft makers. Results of the study indicated that factors of governments, suppliers, competitors, product mix, experts, production capacity, and wage rates simultaneously had a significant influence on the performance of suitcases and bags handicrafts industry in Sidoarjo. Further partial test resulted that among all of the seven factors analyzed, supplier was the most dominant factor that determined the performance of suitcases and bags handicrafts industry in Sidoarjo.

Keywords: performance, internal factors, external factors, small industry

PENDAHULUAN

Pengembangan industri kecil sebagai salah satu strategi dan kebijaksanaan nasional mempunyai peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Potensi yang dimiliki industri kecil cukup besar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, terutama di daerah pedesaan. Namun, kenyataannya industri kecil belum sepenuhnya terlepas dari masalah atau kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diupayakan adanya program untuk membantu industri kecil.

Di Kabupaten Sidoarjo industri tas dan koper merupakan salah satu komoditi kerajinan terbesar di Jawa Timur yang mulai dirintis sejak tahun 1930 telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga terjadinya peristiwa Lapindo yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap merosotnya perkembangan kemajuan industri tas dan koper. Selain itu dengan berkembangnya beberapa industri yang ditandai dengan semakin banyaknya produk-produk berkualitas yang dipasarkan, menyebabkan timbulnya persaingan yang hebat diantara industri-industri yang menghasilkan produk sejenis

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada diluar kendali perusahaan yang mempengaruhi kehidupan dan operasional perusahaan. Karena lingkungan eksternal ini tidak dapat dikendalikan oleh pihak manajemen, maka perusahaan harus memperhatikan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal ini. Di samping analisis faktor lingkungan eksternal, perusahaan juga perlu mengadakan analisis terhadap kondisi lingkungan internalnya. Disebut kekuatan jika variabel internal yang dievaluasi mampu menjadikan perusahaan memiliki keunggulan tertentu. Perusahaan mampu mengerjakan sesuatu dengan lebih baik dan atau lebih murah dibanding dengan pesaingnya. Di sebut kelemahan jika perusahaan tidak mampu mengerjakan sesuatu yang ternyata dapat dikerjakan dengan baik dan atau lebih murah oleh pesaingnya.

Adanya lingkungan eksternal dan faktor keunggulan strategis yang merupakan faktor kekuatan internal perusahaan, maka perlu dilakukan suatu analisis untuk mengetahui faktor eksternal dan internal apa yang mempengaruhi kinerja industri kerajinan tas dan koper di kabupaten Sidoarjo.

Perumusan Masalah

- 1) Apakah faktor lingkungan bisnis yang terdiri dari pemerintah, pemasok, pesaing, bauran produk, tenaga ahli, kapasitas produksi, dan tingkat upah secara serentak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo ?
- 2) Manakah diantara variabel-variabel pemerintah, pemasok, pesaing, bauran produk, tenaga ahli, kapasitas produksi, dan tingkat upah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo ?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh secara serentak faktor lingkungan bisnis yang terdiri dari variabel-variabel pemerintah, pemasok, pesaing, bauran produk, tenaga ahli, kapasitas produksi, dan tingkat upah terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Untuk mengetahui manakah diantara variabel-variabel pemerintah, pemasok, pesaing, bauran produk, tenaga ahli, kapasitas produksi, dan tingkat upah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo.

METODA

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini merupakan rancangan penelitian kausal (*causal studies*) karena bermaksud meneliti secara empirik pengaruh variabel-variabel pemerintah,

pemasok, pesaing, bauran produk, tenaga ahli, kapasitas produksi, dan tingkat upah terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo (Cooper and Emory, 1995:123).

Definisi Operasional

1. **Kinerja (Y)** adalah kemampuan atau keberhasilan kerja perusahaan yang diukur dengan ROI dan dinyatakan dalam persentase dimana skala pengukurannya adalah skala rasio.
2. **Pemerintah (X₁)** adalah peraturan-peraturan pemerintah yang diberlakukan bagi industri kerajinan tas dan koper yang mempengaruhi perusahaan. indikator yang digunakan adalah tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan tentang : peraturan tentang ijin usaha, biaya pengurusan ijin, peraturan mengenai upah minimum, dan besarnya biaya pembuangan sisa bahan serta dukungan pemerintah setempat terhadap keberadaan perusahaan.
3. **Pemasok (X₂)** adalah supplier atau pemasok bahan baku. Indikator yang digunakan adalah tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan : Ketersediaan bahan baku, ketergantungan dengan pemasok, kelancaran pengiriman bahan, hubungan dengan pemasok, dan penentuan harga bahan baku.
4. **Pesaing (X₃)** adalah pesaing yang menghasilkan produk sejenis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Indikator yang digunakan adalah tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan : keluar masuknya pesaing, adanya produk tiruan, perubahan harga pesaing, perubahan kualitas oleh pesaing serta perubahan pelayanan yang diberikan oleh pesaing.
5. **Bauran Produk (X₄)** Adalah seluruh model yang dihasilkan perusahaan. variabel ini diukur dari rata-rata banyaknya macam produk yang dapat dijual perusahaan setiap tahunnya. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio.
6. **Tenaga Ahli (X₅)** Yang dimaksud adalah perancang mode. Variabel ini diukur berdasarkan banyaknya perancang mode yang dimiliki oleh perusahaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio.
7. **Kapasitas Produksi (X₆)** adalah kemampuan maksimum perusahaan dalam menghasilkan produk. Variabel ini diukur berdasarkan rata-rata jumlah pasang produk yang dihasilkan perusahaan dalam satu tahun. Skala pengukurannya adalah rasio.
8. **Tingkat Upah (X₇)** Adalah rata-rata besarnya upah per unit produk yang diterima oleh tenaga kerja langsung. Variabel ini dinyatakan dalam Rupiah per unit produk. Skala pengukurannya adalah rasio.

Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Analisis Linier Berganda.

Adapun model analisis yang dimaksud adalah,

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e_i$$

(Supranto, 1983:190)

Dimana : Y: kinerja Industri yang diukur dengan ROI, X₁: Pemerintah, X₂: Pemasok, X₃: Pesaing, X₄: Bauran produk, X₅: Tenaga ahli, X₆ : Kapasitas produksi, X₇: Tingkat upah, e_i: Variabel Pengganggu di Luar Model, b₀: Interception point dan b₁, b₂, b₃, b₄, b₅, b₆, b₇ adalah koefisien regresi masing-masing variabel

Teknik Analisis

Berdasarkan hasil perhitungan dari model Analisis Regresi Linear Berganda yang akan digunakan dalam penelitian, maka selanjutnya tehnik analisis yang digunakan adalah : Uji Serempak (Uji F), Uji Parsial (Uji t) dan Uji Asumsi Klasik (OLS).

PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Hasil perhitungan estimasi fungsi regresi metode Stepwise dapat diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = -10,9711 + 1,1315X_2 + 0,0171X_4 + 1,3007E-04X_6 - 7,5653E-04X_7$$

Berdasarkan hasil perhitungan uji F terbukti bahwa secara serentak variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo, sehingga hipotesis pertama **diterima**. Berdasarkan hasil analisis parsial (uji t) terbukti bahwa variabel pemasok (X_2), bauran produk (X_4), kapasitas produksi (X_6) dan tingkat upah (X_7) berpengaruh signifikan terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koperasi di kabupaten sidoarjo sedangkan variabel yang lain tidak berpengaruh signifikan. Nilai r^2 terbesar adalah variabel pemasok yaitu sebesar 0,3324 yang berarti variabel pemasok memberikan kontribusi terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper sebesar 33,24%, sehingga hipotesis kedua “ variabel bauran produk mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo,” **ditolak**.

Berdasarkan hasil pengujian ekonometri terbukti bahwa tidak terjadi multikolinieritas, heteroskedastisitas dan otokorelasi.

Pembahasan

Menurut hasil perhitungan statistik, diantara keempat variabel yang mempunyai pengaruh signifikan, ternyata pemasok merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan dan positif terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper. Mengingat sentra industri kerajinan tas dan koper mempunyai segmen pasar tersendiri yang akan selalu memproduksi baik ada maupun tidak ada pesanan, maka peranan pemasok dalam mensuplai bahan baku sangat vital dan tidaklah berlebihan bila variabel tersebut berperan dominan terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper.

Faktor kedua yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper adalah variabel bauran produk., karena bauran produk merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan pengrajin tas dan koper mengingat tas dan koper merupakan produk fashion, semakin banyak bauran produk yang dihasilkan pengrajin maka akan semakin memberi kesempatan yang lebih besar kepada konsumen untuk membeli sehingga akan meningkatkan volume penjualan dan selanjutnya akan meningkatkan laba perusahaan.

Variabel kapasitas produksi memiliki koefisien regresi yang positif atau searah artinya semakin besar kapasitas produksi yang dimiliki oleh para pengrajin akan meningkatkan kinerja industri kerajinan tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo.

Variabel lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper adalah variabel tingkat upah. Produk tas dan koper dalam pembuatannya banyak melibatkan tenaga kerja manusia. Salah satu bentuk motivasi agar para tenaga kerja loyal terhadap perusahaan adalah dengan pemberian upah yang layak, yang dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Koefisien regresi dari variabel tingkat upah bertanda negatif artinya semakin besar tingkat upah yang harus dibayar oleh para pengrajin akan menurunkan keuntungan perusahaan yang selanjutnya menurunkan kinerja industri.

Variabel pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja industri tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan oleh antara lain kebijakan-kebijakan maupun bantuan-bantuan pemerintah terhadap para pengrajin secara riil tidak memberikan dampak langsung bagi perkembangan industri tas dan koper seperti halnya besarnya tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah tidak berlaku bagi industri kerajinan tas dan koper, karena upah yang diterima tenaga kerja kebanyakan

berdasarkan sistem borongan. Pesaing merupakan faktor yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan baik pesaing dari lingkungan sentra industri maupun dari daerah lain. Tetapi karena sentra industri tas dan koper di Kecamatan Tanggulangin ini sudah memiliki segmen pasar tersendiri, maka pengrajin tidak terlalu merasa tersaingi oleh produsen tempat lain, begitu juga untuk persaingan antar pengrajin sebab produk yang dihasilkan sebagian besar memiliki kesamaan model maupun bahan sehingga harga jual untuk produk yang sama hampir tidak berbeda satu sama lain.

Variabel tenaga ahli dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper karena sebagian besar para pengrajin belum menggunakan ahli desainer yang betul-betul menciptakan produk tas dan koper yang memiliki keaslian dan keunikan model. Berdasarkan hasil survey di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga ahli yang dimaksud adalah orang yang mampu menggambar dan membuat ulang model tas dan koper yang sudah ada di pasar.

KESIMPULAN

- 1) Hasil pengujian secara simultan bahwa variabel-variabel pemerintah, pemasok, pesaing, bauran produk, tenaga ahli, kapasitas produksi, dan tingkat upah terhadap kinerja industri kerajinan tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo berpengaruh secara signifikan, sehingga hipotesis pertama diterima.
- 2) Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa pemasok mempunyai pengaruh dominan dengan kontribusi sebesar 33,24%, bauran produk memberi kontribusi 21,08%, kapasitas produksi memberi kontribusi 18,65%, dan tingkat upah memberi kontribusi sebesar 14,17%.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernroider, Edward, 2002, Factors in SWOT Analysis Applied to Micro, Small- to-Medium, and Large Software Enterprises: An Austrian Study, *Journal of European Management Journal* Vol. 20, No. 5, pp. 562–573,
- Cooper, Donald R., and Emory, William. 1995. *Business Research Methods*. Fifth Edition, USA: Irwin R.D., Inc.
- Frijns, Jos and Van Vliet, Bas, 1999, Small-Scale Industry and Cleaner Production Strategies, *Journal of World Development*, Vol. 27, No. 6, pp. 967-983.
- Hitt, Michael A., Et Al., 1997, *Manajemen Strategis : Menyongsong Era Persaingan Dan Globalisasi*, Terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hill, Charles W.L., And Gareth R. Jones, 1998, *Strategic Management : An Integrated Approach*, Fouurt Edition, Houghton Mifflin Company, Usa.
- Jauch, Lawrence R., and William F Glueck, 1988, *Strategic Management And Business Policy*, 5 th Edition, McGraw-Hill, Inc., Singapore.
- Koontz, Harold, and Heinz Weichrich, 1990, *Essential of Management*, Mcgraw-Hill Publishing Company, New York.
- Manteghia, Nikzad and Zohrabib, Abazar, 2011, A proposed comprehensive framework for formulating strategy: a Hybrid of balanced scorecard, SWOT analysis, porter`s generic strategies and Fuzzy quality function deployment, *Procedia Social and Behavioral Sciences* 15, p. 2068–2073
- Wheelen, Thomas L., And J. David Hunger, 2007, *Strategic Management And Business Policy*, 11th Edition, Addison – Wesley Publishing Company, USA.

Analisis Strategi Dan Kelayakan Investasi Pembangunan Paviliun Pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Banyumas

Suliyanto¹, Agus Suroso¹, Ary Yunanto¹, dan Ratno Purnomo¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

E-mail: suli_yanto@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bagi pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyumas, serta untuk menganalisis kelayakan investasi pembangunan paviliun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyumas. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis ketepatan strategi adalah analisis SWOT dan analisis matriks space, sedangkan analisis kelayakan investasi menggunakan analisis Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), Profitabilitas Index (PI), Internal Rate of Return (IRR). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa strategi pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyumas adalah agresif, dan pembangunan paviliun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyumas layak untuk dijalankan.

Katakunci: **strategi, kelayakan investasi, dan paviliun**

Abstract

The aims of this study to analyze strategy for the development of the Regional General Hospital (RSUD) Banyumas, as well as to analyze the feasibility of investment pavilion Regional General Hospital (Hospital) Banyumas. Analysis tools used to analyze the strategy is the SWOT analysis and matrix space analysis, while the investment feasibility analysis using Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), Profitability Index (PI), Internal Rate of Return (IRR). Based on the analysis, the development strategy of the Regional General Hospital (RSUD) Banyumas is aggressive, and the construction of the pavilion Regional General Hospital (RSUD) Banyumas was feasible .

*Keywords: **strategy, feasibility investment, and pavilion***

PENDAHULUAN

Untuk menghadapi situasi persaingan global, mengantisipasi cepatnya perubahan lingkungan dan menjaga kelangsungan usaha rumah sakit maka rumah sakit harus senantiasa merumuskan strategi yang tepat. Persaingan global dan perubahan lingkungan mulai nampak pada pengelolaan rumah sakit swasta multinasional yang terdapat di kota-kota besar. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) perlahan-lahan telah berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang akan dikelola secara semi public enterprise. Hal tersebut membuat RSUD harus berbenah diri menghadapi perubahan tersebut.

Pengembangan fasilitas kesehatan di rumah sakit umum daerah merupakan salah satu cara untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Keputusan investasi pengembangan paviliun RSUD Banyumas adalah langkah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus meningkat khususnya bagi pasien yang menginginkan fasilitas yang nyaman, higienis, dan eksklusif. Namun demikian, keputusan investasi tersebut perlu dikaji kelayakan dari sisi ekonomisnya agar kemanfaatan yang diperoleh tidak hanya dirasakan oleh masyarakat tetapi juga bagi RSUD Banyumas itu sendiri, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

METODA

Menurut Kuncoro, (2006:51) untuk merumuskan strategi pengembangan rumah sakit terlebih dahulu dilakukan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Untuk menentukan besarnya bobot setiap pada faktor eksternal dan internal digunakan matriks Evaluasi Faktor Eksternal dan matriks Evaluasi Faktor Internal (David, 2003:161). Untuk memperlihatkan dengan jelas arah vektor strategi pengembangannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyumas digunakan analisis matriks space (Rangkuti, 2001:46). Sedangkan untuk melakukan analisis kelayakan investasi menurut (Suratman, 2001; Suliyanto, 2010) digunakan analisis Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), Profitabilitas Indeks (PI), dan Internal Rate of Return (IRR).

PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan matriks space analisis dapat diperoleh tabel analisis SWOT-Internal dan Eksternal sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis SWOT – Internal

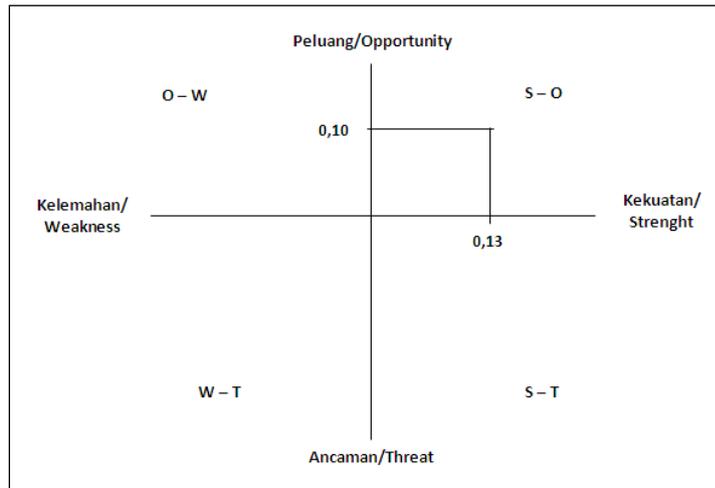
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Skor	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Skor
▪ Kemudahan akses dari jalan raya utama Banyumas - Buntu	3	▪ Dokter melakukan praktek di rumah sakit lain	-3
▪ Peralatan modern dan terbaru	3	▪ Belum memiliki pengalaman dalam hal penanganan dan pengelolaan fasilitas dan pelayanan paviliun	-2
▪ Jumlah kamar 30 tipe paviliun	3	▪ Belum ada rencana pengembangan jangka	-1

		panjang	
▪ Fasilitas kamar yang nyaman	2	▪ Belum melakukan riset atau survey pangsa pasar paviliun	-3
▪ Dokter umum dan spesialis yang memadai	1		
▪ Kinerja RSUD Banyumas yang cenderung baik dari tahun ke tahun	2		
▪ Kredibilitas RSUD Banyumas di mata masyarakat Banyumas dan sekitarnya	2		
▪ Memiliki manajemen sendiri dalam pengelolaan paviliun	3		
Rata-Rata	2,38	Rata-rata	-2,25

Tabel 2 Analisis SWOT – Eksternal

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Skor	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Skor
▪ Penduduk yang relatif padat	2	▪ Persaingan yang ketat di daerah Banyumas karena ada 12 unit rumah sakit umum	-3
▪ Pertumbuhan ekonomi Banyumas dan daerah sekitarnya yang positif	3	▪ Rumah sakit Margono memiliki fasilitas yang sama	-2
▪ Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat	2	▪ Rumah sakit swasta yang juga melakukan program pengembangan (RS. Elisabeth dan RS. Ananda)	-2
▪ Peningkatan jumlah orang kalangan menengah ke atas	3		
▪ Mendapat dukungan pemerintah daerah	3		
▪ Jumlah rumah sakit yang relatif sedikit di daerah sekitarnya seperti Banjarnegara, Cilacap, dan Purbalingga	2		
▪ Jumlah lulusan tenaga kesehatan semakin banyak	2		
Rata-Rata	2,43	Rata-rata	-2,33

Berdasarkan analisis matriks space analisis di atas, hasil perhitungan skornya faktor internal adalah sebagai berikut: Rata-rata skor Kekuatan sebesar 2,38 dan Rata-rata skor Kelemahan sebesar -2,25, sehingga skor akhir faktor internal sebesar 0,13. Sedangkan Rata-rata skor Peluang sebesar 2,43 dan rata-rata skor ancaman sebesar 2,33, sehingga skor akhir faktor eksternal sebesar 0,10. Berdasarkan kedua tabel diatas dapat digambarkan arah vektor strategi sebagai berikut:



Kelayakan Pembangunan Paviliun Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Banyumas

Pembangunan paviliun RSUD Banyumas memerlukan investasi sebesar Rp. 9.803.110.000,00 termasuk didalamnya modal kerja sebesar Rp.342.910.000,00. Dan biaya operasional ini tiap tahun akan mengalami peningkatan sebesar 10 persen sebagai akibat inflasi.

Berdasarkan analisis pada aspek Keuangan dengan melihat analisis kelayakan investasi yaitu *Payback Period* (PP) menunjukkan angka 4 tahun 10 bulan 8 hari lebih pendek dari umur ekonomi yaitu 20 tahun, *Net Present Value* (NPV) yaitu sebesar Rp. 11.146.432.722 bernilai positif, dan *Profitabilitas Indeks* (PI) sebesar 8,26 lebih besar dari 1, dan nilai *Internal Rate of Return* (IRR) sebesar 22 persen yang lebih tinggi dari deposito pada bank yaitu sebesar 14 persen. Oleh karena itu secara finansial pabrikasi gula kelapa di Kecamatan Kutasari layak untuk dilaksanakan.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan matriks space dapat diperoleh strategi yang tepat untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyumas adalah strategi agresif yaitu dengan melaksanakan tindakan-tindakan agresif untuk merebut pasar, dan pembangunan paviliun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyumas layak untuk dijalankan.

B. Rekomendasi

Untuk merebut pasar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyumas sebaiknya memilih strategi agresif dengan cara melakukan investasi baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan maupun untuk menambah berbagai sarana baru dengan didukung usaha-usaha promosi yang agresif. Rencana pembangunan paviliun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyumas sebaiknya terus dijalankan karena berdasarkan hasil analisis dinyatakan layak.

DAFTAR PUSTAKA

- David, Fred R., 2003. *Manajemen Strategis Konsep*. terjemahan. PT Prenhallindo. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat 2006. *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Bersaing*. Erlangga. Jakarta. 2006.
- Rangkuty, Freddy, 2001. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Cetakan Kedua, Penerbit PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Suliyanto. 2010. *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Suratman. 2001. *Studi Kelayakan Proyek Teknik dan Prosedur Penyusunan Laporan*. J & J Learning. Yogyakarta.

Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Entrepreneurship Untuk Mengembangkan Wirausahawan Kecil Menghadapi Persaingan Global

Wiwik Maryati¹

¹Fakultas Ilmu Administrasi Unipdu Jombang

E-mail: wima08@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan kondisi aktual yang dialami oleh wirausahawan kecil saat ini dan berupaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya pengembangan entrepreneurship. Jika melihat kondisi saat ini, masih banyak wirausahawan kecil yang bertahan dengan usaha yang mereka kelola secara konvensional dan belum nampak ada pengembangan usaha. Hal ini menjadikan wirausahawan kecil tersebut sulit beradaptasi dengan lingkungan global yang penuh persaingan. Rendahnya motivasi untuk mengembangkan usaha dikarenakan sulitnya faktor permodalan yang bisa diatasi dengan program pemberdayaan entrepreneurship. Program pemberdayaan entrepreneurship dilakukan dengan memberikan fasilitas tidak hanya berupa pinjaman permodalan namun juga kemudahan akses mendapatkan permodalan. Kemudahan akses inilah yang menjadikan permasalahan besar bagi wirausahawan kecil. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini, perguruan tinggi berperan sebagai lembaga pendukung non-finansial yang menjamin kemudahan akses permodalan. Melalui jalinan kerjasama antara perguruan tinggi dengan perbankan sebagai sumber permodalan akan memudahkan peran perguruan tinggi dalam memediasi akses permodalan tersebut.

Kata kunci: peran perguruan tinggi, entrepreneurship, persaingan global

Abstract

This article aims to describe the actual conditions faced by small entrepreneurs today and seeks to contribute ideas towards entrepreneurship development efforts. If look at current conditions, many small entrepreneurs who survive with businesses that they manage in conventional and yet there appears to enterprise development. It makes small entrepreneurs difficult to adapt in a competitive global environment. Low motivation to develop the business due to the difficulty factor of capital that can be overcome with entrepreneurship empowerment program. Entrepreneurship empowerment program carried out by providing facility is not only capital loan but also the ease of getting access to capital. Ease of access is what makes the big problem for small entrepreneurs. Solution to overcome these problem, the universities acts as a non-financial support institutions that ensure ease of access to capital. Through the fabric of cooperation between university and banks as sources of capital will facilitate the role of universities in mediating the access to capital.

Key words: the role of universities, entrepreneurship, global competition

PENDAHULUAN

Dampak yang bisa dirasakan dari pesatnya laju perkembangan triple T (*technology, trade dan transportation*) adalah fenomena globalisasi yang semakin hari semakin intens tak dapat dihindari. Hal itu tentu saja membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Pengaruh perubahan tersebut membuat pergeseran persaingan dunia menjadi semakin ketat. Negara-negara akan terlibat dalam sebuah persaingan dan berusaha menempatkan diri pada posisi yang terbaik dalam struktur persaingan yang sangat ketat itu. Dengan kata lain berusaha pada posisi “papan atas” dalam berkompetisi. Namun yang perlu kita sadari betapapun kuatnya keinginan untuk menempatkan diri pada “papan atas”, yang perlu diperhatikan untuk negara kita ini adalah adanya kesenjangan dalam pengembangan. Misalnya, pengembangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal maupun pengembangan antara kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi tertinggal dengan kelompok masyarakat ekonomi menengah dan ekonomi atas. Artinya kita akan mampu bersaing dalam lingkungan global ini apabila kondisi perekonomian negara kita juga mendukung. Ini diperlukan karena globalisasi disatu sisi tidak hanya menciptakan banyak kesempatan, tetapi juga menciptakan banyak tantangan yang apabila tidak dihadapi akan menjadi ancaman (Tambunan, 2003:328).

Sejauh ini *entrepreneurship* (kewirausahaan) dipandang sebagai solusi yang dapat membantu perekonomian negara dimana indikator keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya adalah bebasnya negara dari persoalan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat sangat mungkin akan meningkatkan peluang kesempatan kerja yang luas. Oleh karena itu himbauan dari pemerintah untuk menggiatkan kegiatan kewirausahaan semakin hari gaungnya semakin kencang.

Namun sayangnya dalam kenyataannya minat masyarakat terhadap kewirausahaan ternyata masih rendah. Rendahnya minat masyarakat dalam berwirausaha ini muncul dari paradigma yang salah dalam pemahaman masyarakat, dimana berwirausaha diperlukan modal besar dan harus dilakukan dalam skala yang besar pula (Aadesanjaya, 2011). Kalaupun kewirausahaan sudah dilakukan, ada keengganan dari para wirausahawan tersebut khususnya wirausahawan skala kecil untuk mengembangkan usahanya. Mereka cenderung bertahan dengan model usaha konvensional yang mereka kelola selama ini (Tambunan, 2003:329). Mengapa para wirausahawan tersebut cenderung bertahan dengan usaha kecilnya? Faktor utama yang menyebabkan kurang termotivasinya mereka untuk mengembangkan usaha adalah faktor permodalan.

Melihat kenyataan di atas, persoalan tersebut harus disikapi dan direspon oleh berbagai pihak, baik pihak perbankan selaku sumber permodalan maupun pihak institusi non-finansial sebagai pendukung sumber permodalan yang berfungsi untuk memperkuat posisi wirausahawan. Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi non-finansial yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan menghasilkan orang-orang yang berilmu pengetahuan saja, tetapi juga merupakan aset yang dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat misalnya untuk penggiatan ekonomi kerakyatan ataupun pemberdayaan *entrepreneurship* (kewirausahaan) khususnya

pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM). Melalui peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan *entrepreneurship* para wirausahawan khususnya yang mempunyai usaha skala kecil diharapkan bisa bersaing dalam kompetisi global.

Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan perguruan tinggi dalam program pemberdayaan *entrepreneurship* merupakan wujud tugas pengabdian kepada masyarakat yang harus diemban oleh perguruan tinggi.

Tulisan ini berupaya menguraikan permasalahan aktual yang dialami wirausahawan kecil saat ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam upaya mengembangkan wirausahawan kecil menghadapi persaingan global.

METODA

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskripsi, dimana kami mencoba melakukan telaah atau analisis dari fenomena aktual yang sedang terjadi dengan mendasarkannya pada pengkajian literatur.

PEMBAHASAN

Permasalahan Wirausahawan Kecil

Saat ini kewirausahaan kian marak dilakukan karena orientasinya pada bisnis dan profit yang akan didapat. Seorang *entrepreneur* (wirausahawan) adalah orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru. Oleh karena itu wirausahawan dituntut berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka dan mengembangkan usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. (Kasmir, 2007:18).

Wirausahawan yang berhasil menurut Wiratmo, M. (2004) dan Winardi (2003) mempunyai standart potensi kewirausahaan yang dapat dilihat pada ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kemampuan inovatif
2. Toleransi terhadap kemenduaan (*ambiguity*)
3. Keinginan untuk berprestasi
4. Kemampuan perencanaan realistis
5. Kepemimpinan berorientasi pada tujuan
6. Obyektivitas
7. Tanggung jawab pribadi
8. Kemampuan beradaptasi (*Flexibility*)
9. Kemampuan sebagai organisator dan administrator
10. Tingkat komitmen tinggi (*survival*)

Apabila diperhatikan ciri-ciri wirausahawan yang berhasil sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya kembali pada pribadi individu seorang wirausahawan sendiri apakah dia mempunyai minat dan motivasi atau tidak untuk mengembangkan usahanya. Faktor lainnya selain pribadi wirausahawan adalah faktor yang berfungsi sebagai pendukung yang dapat berupa faktor lingkungan maupun faktor regulasi dari pemangku kebijakan. Faktor lingkungan merujuk pada potensi yang ada pada lingkungan di sekitar usaha, misalnya lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam yang bisa dimanfaatkan oleh para wirausahawan. Sedangkan faktor regulasi dari pemangku kebijakan merujuk pada dukungan finansial maupun non-finansial dari pemerintah setempat.

Dari beberapa faktor sebagaimana disebutkan di atas, yang menyebabkan para wirausahawan kurang termotivasi untuk mengembangkan usaha khususnya wirausahawan kecil adalah karena kurang efektifnya faktor pendukung berupa regulasi dukungan finansial dari pemerintah. Selama ini pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi pada tahun 2002 sudah membuka akses pelayanan perbankan untuk UKM (Usaha Kecil Mikro). Melalui paket tersebut para wirausahawan kecil mendapatkan fasilitas pinjaman modal dari perbankan, namun kurang efektif dalam pelaksanaannya. Kurang efektifnya akses pelayanan perbankan ini disebabkan adanya persyaratan berupa jaminan (*borg*) yang tidak mudah dipenuhi oleh para wirausahawan kecil tersebut. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Juwono (2011) dalam artikelnya bahwa model pengembangan kewirausahaan yang sesuai untuk kondisi masyarakat Indonesia adalah dengan mendorong peningkatan kegairahan berwirausaha di antara para calon wirausahawan dan fasilitatornya yang dilakukan bersamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan calon wirausahawan dalam memulai, menjalankan dan membesarkan bisnisnya.

Penyediaan sarana dan prasarana inilah yang kemudian memunculkan apa yang dinamakan dengan program fasilitasi *entrepreneurship* atau dinamakan dengan pemberdayaan *entrepreneurship*. Pemberdayaan *entrepreneurship* ini diarahkan tidak hanya pada penyediaan modal usaha saja yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan perbankan, akan tetapi juga pada kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha tanpa adanya persyaratan rumit yang harus disediakan oleh wirausahawan kecil tersebut.

Pemberdayaan *Entrepreneurship*

Pemberdayaan *entrepreneurship* menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Sebagaimana dikatakan oleh Sijabat (2011) dalam artikelnya tentang UMKM menyatakan bahwa pemberdayaan *entrepreneurship* terutama yang terlihat pada Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya nasional, sesuai amanat pasal (4) dan pasal (5) UU Nomor 20 Tahun 2008. Namun demikian menjadikan UMKM sebagai basis pembangunan daerah yang sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional masih dihadapkan pada banyak masalah antara lain: 1) rendahnya produktifitas UMKM yang berdampak pada timbulnya kesenjangan antara UMKM dengan usaha besar; 2) terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif seperti permodalan, teknologi, informasi dan pasar; 3) tidak

kondusifnya iklim usaha yang dihadapi oleh UMKM, sehingga terjadi marjinalisasi dari kelompok ini.

Untuk itu menurut Kumoro, W. (2008) perlu upaya menggiatkan kewirausahaan berupa penguatan kelembagaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Upaya itu dapat dilaksanakan dengan strategi 1) perluasan akses kepada sumber permodalan, terutama perbankan, 2) memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan, dan 3) memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung non-finansial. Apa yang disampaikan oleh Kumoro tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya lembaga keuangan dan perbankan saja yang harus terlibat dalam pemberdayaan sebagai sumber permodalan, tetapi lembaga-lembaga atau institusi lain sebagai pendukung non-finansial juga harus terlibat dalam penguatan kelembagaan UMKM.

Alasan lainnya mengapa kelembagaan UMKM perlu diperkuat melalui penggiatan kewirausahaan, tidak lain karena sektor UMKM telah terbukti tangguh terhadap krisis ekonomi. Selama tahun 1997-2006, jumlah perusahaan berskala UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sumbangan UKM terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sumbangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir/pedagang perantara, dan hanya 88% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri (Afiah, 2009).

Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan *Entrepreneurship*

Perguruan tinggi adalah lembaga yang paling merasakan tuntutan perubahan global karena bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang memerlukan ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi serta ilmu-ilmu multidisiplin lainnya akan menuntut perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi. Effendi (2003) menyatakan bahwa masyarakat sekarang mempercayakan kepada perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang masih memiliki kekuatan moral untuk menjadi panutan masyarakat dalam transformasi menuju masyarakat global.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa peran perguruan tinggi sangat strategis diperlukan juga dalam pemberdayaan *entrepreneurship*. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasyid (2007) dalam penelitiannya yang merekomendasikan perlunya dilakukan kegiatan pemberdayaan UKM oleh perguruan tinggi yang dibantu oleh pemerintah dan pihak lain yang terkait agar dapat mewujudkan UKM sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi mediator UKM pada pemerintah dan lembaga keuangan dalam rangka peningkatan produktivitas UKM melalui upaya pembentukan keterkaitan (*inter firm linkage*). Melalui model keterkaitan ini diharapkan terjadi kolaborasi antara UKM dengan lembaga terkait yang bisa pemerintah, lembaga keuangan dan perbankan maupun lembaga non finansial lainnya termasuk perguruan tinggi. Model ini membantu memberikan solusi pada permasalahan UKM baik masalah keuangan, pemasaran, pengembangan manajemen maupun pengembangan produk dan teknologi.

Kita semua tahu bahwa saat ini banyak perguruan tinggi yang sudah menjalin kemitraan dengan pihak perbankan sebagai salah satu sarana yang memudahkan aktivitas pendidikan di perguruan tinggi, terutama untuk kelancaran proses administrasi keuangan. Kemitraan yang dijalin antara perguruan tinggi dengan perbankan menjadikan timbulnya kepercayaan antar mitra, sehingga kepercayaan tersebut dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan *entrepreneurship*. Dalam hal ini para wirausahawan kecil yang mempunyai masalah dengan akses permodalan dapat menggunakan jasa perguruan tinggi sebagai pihak penjamin kemudahan akses tersebut. Tentunya perguruan tinggilah yang nantinya akan menetapkan kriteria maupun persyaratan-persyaratan untuk kelayakan dari wirausahawan tersebut mendapatkan permodalan.

Berdasarkan kondisi yang demikian maka sudah sepatutnya perguruan tinggi ikut berperan dalam pemberdayaan *entrepreneurship*, karena peran perguruan tinggi sebagai mediator akses permodalan akan memberikan dampak efektif bagi wirausahawan kecil. Hal ini sekaligus menepis anggapan masyarakat yang selama ini menganggap bahwa perguruan tinggi hanya sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih dari perguruan tinggi ternyata juga mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan para *entrepreneur*.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa sudah semestinya perguruan tinggi ikut berperan aktif dalam pemberdayaan *entrepreneurship*. Ini sejalan dengan tugas Tri Dharma yang harus diemban oleh perguruan tinggi, terutama tugas pengabdian kepada masyarakat agar dapat menjadikan masyarakat (dalam hal ini adalah para wirausahawan kecil) yang mampu berdaya saing di era global ini. Melalui peran perguruan tinggi yang bertindak sebagai mediator akses permodalan pada lembaga keuangan dan perbankan, para wirausahawan kecil dapat mengatasi permasalahannya sehingga mereka akan termotivasi untuk mengembangkan usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Bapak Rektor Unipdu yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Seminar Nasional Competitive Advantage II ini.
2. Ibu Dr. Siti Komariyah, M.Si yang telah membimbing dan mengapresiasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aadesanjaya. 2011. Manajemen Kewirausahaan. www.aadesanjaya.blogspot.com. Diakses tanggal 24 Mei 2012
- Afiah, N.N. 2009. Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global. *Working Paper in Accounting and Finance*. (Oktober): 1-8.
- Effendi, S. 2003. Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global. 1-12. www.sofian.staff.ugm.ac.id diakses tanggal 13 Juli 2010.

- Joewono.H. 2011. Strategi Pengembangan Kewirausahaan Nasional: Sebuah Rekomendasi Operasional. *Jurnal Infokop*. (Vol. 19): 1-23.
- Kasmir. 2007. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Perkasa.
- Kumorotomo, W. 2008. Perubahan Paradigma Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. www.kumoro.staff.ugm.ac.id Diakses tanggal 19 Maret 2012.
- Rasyid, R. 2007. Keterkaitan Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Sumatra Barat. *Jurnal Eksekutif*. (Vol. 4 No. 3): 217-230
- Sijabat, S. 2011. Dampak Penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Terhadap Pengembangan Kewirausahaan Bagi UMKM. *Jurnal Infokop*. (Vol. 19): 86-103.
- Tambunan, T T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Winardi. 2003. *Entrepreneur & Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana.
- Wiratmo, M. 2004. *Kewirausahaan: Seri diktat kuliah Gunadarma*. Jakarta.

Dampak *Foreign Direct Investment* dan Investasi Portofolio Terhadap Stabilitas Makroekonomi di Indonesia: Fenomena *Global Imbalances*

Yulia Indrawati¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Jember

E-mail : y_indrawati02@yahoo.com

Abstrak

Ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global memberikan implikasi pada perekonomian negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia diantaranya masifnya aliran masuk modal asing. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Vector Autoregression melalui penggunaan impulse response dan variance decomposition dengan time series data 2005.Q4 – 2011.Q4. Beberapa variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar terhadap US\$, BI Rate, Foreign Direct Investment (FDI), dan Investasi Portofolio. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dampak positif FDI terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan dengan investasi portofolio. Terhadap stabilitas harga, dampak FDI adalah negatif dan investasi portofolio berdampak positif. Dampak FDI terhadap kurs positif dan investasi portofolio memberikan pengaruh negatif. Sedangkan kebijakan moneter melalui BI Rate merespon negatif perkembangan FDI dan merespon positif investasi portofolio. Hal ini menunjukkan investasi portofolio lebih berpengaruh terhadap instabilitas makroekonomi terutama terhadap stabilitas harga dan nilai tukar.

Kata kunci : **Foreign Direct Investment, Investasi Portofolio, Global Imbalances**

Abstract

The imbalance of global economic recovery has led to a variety of implications on the economies of emerging markets countries, including Indonesia, its massive capital inflows. This study aims to analyze the impact of foreign direct investment and portfolio investment against macroeconomic fundamentals. The method used in this study is the Vector Autoregression through the use of impulse response and variance decomposition with time series data 2005.Q4 - 2011.Q4. Some of the variables used are economic growth, inflation, exchange rate, BI Rate, Foreign Direct Investment (FDI), and Portfolio Investment. The research results indicate that the positive impact of FDI on economic growth is smaller than the portfolio investment. To price stability, the impact of FDI is negative and the positive impact of investment portfolio. Positive impact of FDI on the exchange rate and the investment portfolio of negative influence. While monetary policy through the BI Rate of negative response to the development of FDI and portfolio investments respond positively. This shows more effect on the investment portfolio of macroeconomic instability, especially on the stability of prices and exchange rates.

Keywords: Foreign Direct Investment, Portfolio Investment, Global imbalances

PENDAHULUAN

Pasca krisis keuangan global yang terjadi di akhir tahun 2008, perekonomian dunia terus melakukan serangkaian kebijakan untuk keluar dari krisis. Indikasi pemulihan telah tampak pada medio kedua tahun 2009 dan semakin kuat pada tahun 2010 yang ditandai oleh angka pertumbuhan ekonomi yang kembali positif sebesar 5,0%. Pemulihan ekonomi negara-negara *emerging markets* relatif lebih cepat, dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,1% dibandingkan dengan pemulihan ekonomi negara-negara maju yang hanya tumbuh 3,0% (Bank Indonesia, 2010). Namun dari kondisi domestik, proses pemulihan di negara-negara *emerging markets* yang lebih cepat diikuti oleh tekanan inflasi yang meningkat, sehingga mendorong untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter melalui peningkatan suku bunga kebijakan dibandingkan dengan negara-negara maju. Kondisi perekonomian tersebut berimplikasi pada masifnya aliran masuk modal asing ke negara-negara *emerging markets*, dan mengakibatkan naiknya harga komoditas global.

Aliran masuk modal asing ke negara-negara *emerging markets* di Asia meningkat cukup tinggi, sebesar 85,2 miliar dolar AS, sehingga secara akumulatif sepanjang tahun 2010 mencapai 446,9 miliar dolar AS. Sebagian aliran modal tersebut yaitu 152,6 miliar dolar AS dalam bentuk investasi langsung yang mayoritas diserap oleh China sekitar 90 miliar dolar AS dan India 40 miliar dolar AS. Aliran masuk modal asing ke negara-negara *emerging markets* di kawasan Asia dalam bentuk investasi portofolio juga mengalami peningkatan dan mencapai 127,2 miliar dolar AS. Peningkatan tersebut terjadi secara merata pada seluruh jenis investasi, yaitu investasi langsung, investasi portofolio dan pinjaman. Porsi terbesar dari aliran modal tersebut merupakan investasi langsung 79,7 miliar dolar AS, diikuti oleh pinjaman dari non-bank 60,9 miliar dolar AS, investasi portofolio 52,9 miliar dolar AS dan pinjaman dari bank 26,7 miliar dolar AS (Bank Indonesia, 2010). Di Indonesia, perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) pasca krisis keuangan global yaitu pada tahun 2009 mengalami penurunan dari 9.318 juta dolar AS menjadi 4.877 juta dolar AS, dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 13.771 juta dolar AS. Sementara itu posisi investasi portofolio mengalami trend meningkat dari 1.764 juta dolar AS menjadi 10.336 juta dolar AS pada tahun 2009 dan 13.202 juta dolar AS pada tahun 2010 (<http://bi.go.id>). Kondisi makroekonomi Indonesia dan negara-negara *emerging markets* lainnya di Asia yang semakin baik, menjadi daya tarik bagi investor asing untuk memperoleh keuntungan investasi ditambah dengan pengetatan kebijakan moneter melalui peningkatan suku bunga kebijakan.

Aliran modal masuk bagi negara-negara *emerging markets* seperti Indonesia merupakan sumber pembiayaan pembangunan dan dapat mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Namun, pada saat aliran modal masuk yang cukup masif dan tidak dapat terserap oleh perekonomian secara keseluruhan, maka akan berimplikasi pada melemahnya daya saing ekspor karena kecenderungan terjadinya apresiasi nilai tukar yang melampaui kondisi fundamental dan didukung juga oleh perbedaan suku bunga (*interest differential*) yang positif (Batiz, 1985). Kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya *asset price bubble*, kerentanan pasar keuangan dan meningkatkan tekanan inflasi serta komplikasi dalam pengelolaan moneter. Aliran masuk modal asing yang bersifat jangka pendek seperti *portfolio investment* rentan terhadap sentimen negatif yang memicu pembalikan modal secara besar dan tiba-tiba (*large and sudden reversal capital*) dan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas makro dan menimbulkan kompleksitas kebijakan moneter.

METODA

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian untuk mengamati pengaruh investasi langsung asing (FDI) dan investasi portofolio terhadap stabilitas makroekonomi adalah *Vector Autoregression* (VAR). VAR menjelaskan bahwa setiap variabel yang ada dalam model tergantung pada pergerakan masa lalu variabel tersebut dan juga pergerakan masa lalu seluruh variabel yang ada dalam sistem. VAR kurang menekankan pada asumsi ekonomi, tapi VAR lebih fokus pada perolehan nilai statistik yang lebih baik dari interaksi masa lalu antar variabel ekonomi dan menentukan model berdasarkan data tersebut. Representasi dari model *unrestricted* VAR adalah sebagai berikut (Harris, 2003):

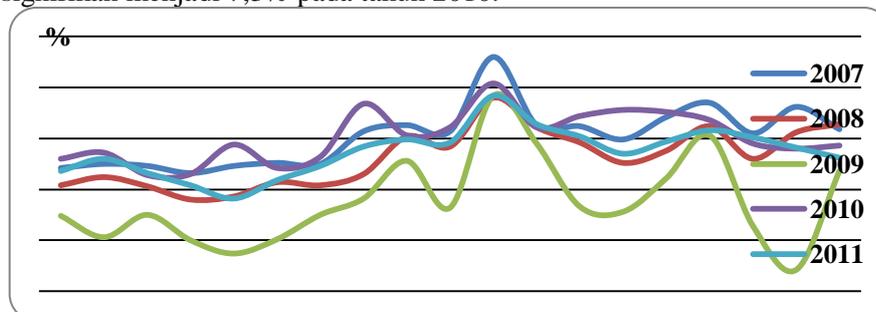
Bila z_t adalah vektor dari n variabel endogen dan model *unrestricted* VAR dengan lag p sebagai berikut: $z_t = A_1 z_{t-1} + \dots + A_p z_{t-p} + u_t$ $u_t \sim IN(0, \Sigma)$

Karena sifat yang *a-theoric*, analisa VAR dilengkapi dengan *impulse response* yaitu respon variabel endogen akibat adanya inovasi (kejutan) dari variabel endogen yang lain dan melacak respon saat ini dan masa depan setiap variabel akibat perubahan atau *shock* suatu variabel tertentu. *Contemporaneous effect* dari kejutan dengan pendekatan standar adalah *Cholesky Decomposition* dari *residual covariance matrix* dari model VAR.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder time series yaitu mulai 2005.Q4 hingga 2011.Q4. Sumber data di peroleh dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia dari Bank Indonesia. Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar nominal Rupiah terhadap US\$, suku bunga kebijakan *BI Rate*, investasi langsung asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI), dan investasi portofolio.

PEMBAHASAN

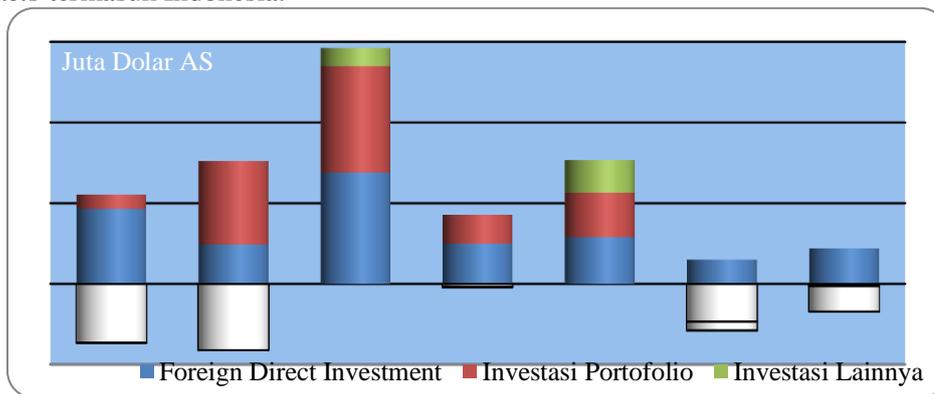
Krisis keuangan global 2008 membawa implikasi terjadinya ketidakseimbangan pemulihan global terutama antara negara maju dengan negara *emerging markets* termasuk Indonesia. Terjadinya *multi speed economic recovery* dimana negara *emerging markets* mengalami pemulihan ekonomi lebih cepat dibandingkan negara-negara maju. Negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, negara kawasan Eropa, Jepang, Inggris, Kanada mengalami pertumbuhan melambat pasca krisis tahun 2008 yaitu dari 1,5% menjadi -3,4% pada tahun 2009 dan tahun 2010 hanya mengalami peningkatan sebesar 3,2%. Bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi relatif cepat yaitu dari 6,9% tahun 2008 menjadi 2,6% tahun 2009 mengalami perlambatan akibat krisis keuangan dan mengalami pemulihan secara signifikan menjadi 7,3% pada tahun 2010.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara
Sumber : Bank Indonesia (2011)

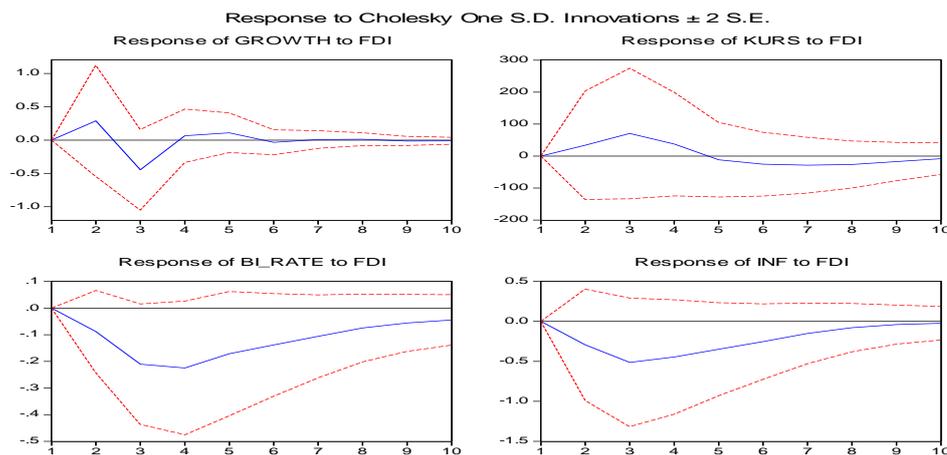
Kondisi *global imbalances* dengan eksekutif likuiditas global dan perlambatan pemulihan ekonomi negara industri maju, sementara negara *emerging markets* mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, perbedaan suku bunga besar dan ekspektasi apresiasi nilai tukar, menyebabkan terjadinya aliran modal ke negara *emerging markets* termasuk Indonesia.

Aliran modal masuk ke negara *emerging markets* di Asia mengalami kenaikan pada tahun 2010, dan menurun 24% pada tahun 2011. Penurunan tersebut terkait dengan proses *deleveraging* yang dilakukan perbankan Eropa akibat krisis utang pemerintah di kawasan tersebut. Aliran modal langsung asing (FDI) mengalami tren peningkatan dibandingkan investasi lainnya yang disebabkan oleh baiknya kinerja makroekonomi negara *emerging markets* termasuk Indonesia.



Gambar 2. Perkembangan Aliran Modal Asing di Indonesia
Sumber : Bank Indonesia (2011)

Analisa pengaruh investasi langsung asing (FDI) dan investasi portofolio (PI) terhadap fundamental makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi (Growth), nilai tukar (Kurs), BI rate dan Inflasi (Inf) menggunakan metode *Vector Autoregression* (VAR). Dengan menggunakan analisa *impulse response*, berikut adalah beberapa hasil analisa respon variabel fundamental makroekonomi terhadap FDI dan investasi portofolio.



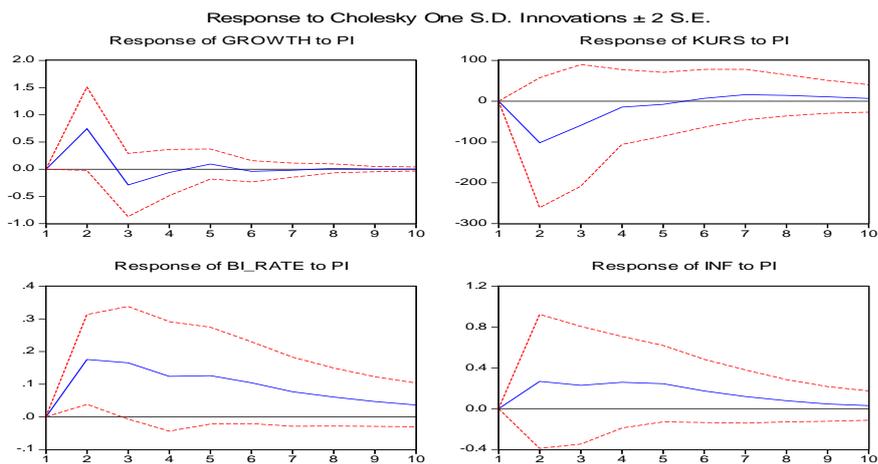
Gambar 3. Respon Variabel Makroekonomi terhadap Investasi Langsung Asing (FDI)

Gambar 3 menunjukkan respon beberapa variabel fundamental makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs dan suku bunga BI rate terhadap *shock* atau kejutan investasi langsung asing (FDI) di Indonesia selama periode pengamatan. Pengaruh FDI direspon positif pada horison ke-2 oleh pertumbuhan ekonomi dengan *Cholesky Decomposition* dengan standar deviasi 0,288 dan direspon positif pada horison ke-3

dengan deviasi 0,445 dan kembali positif pada horison ke-4. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode adanya kenaikan investasi langsung asing (FDI) di Indonesia memberikan dampak positif kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh *shock* kembali pada keseimbangan dalam jangka panjang. Dampak liberalisasi perdagangan melalui penurunan tarif masuk barang impor yang sudah hampir mendekati nol persen mempengaruhi aliran modal langsung asing. Penurunan tarif tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, terutama investasi yang menggunakan bahan baku impor. Menurut Honig (2008) bahwa liberalisasi mobilitas modal memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Rachdi (2011), *Foreign Direct Investment* memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Pola yang sama terjadi pada respon positif nilai tukar pada awal periode hingga horison atau kuartal ke-5, dengan deviasi cukup besar yaitu 33,775 hingga 37,613. Adanya kenaikan aliran modal langsung asing ke Indonesia menyebabkan terjadinya depresiasi nilai tukar. Hal ini disebabkan adanya aliran modal dalam bentuk FDI yang masuk di Indonesia sebagian besar tidak berorientasi ekspor karena Indonesia belum menjadi bagian *supply chain* dari perekonomian global. Pengaruh FDI cukup memberikan iklim yang kondusif bagi stabilitas harga yaitu inflasi yang ditandai dengan respon turunnya inflasi. Begitu halnya dengan respon kebijakan suku bunga BI rate.

Gambar 4 menunjukkan respon beberapa variabel fundamental makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs dan suku bunga BI rate terhadap *shock* atau kejutan investasi portofolio yang masuk di Indonesia selama periode pengamatan. Pengaruh investasi portofolio direspon positif pada horison ke-2 oleh pertumbuhan ekonomi dengan *Cholesky Decomposition* dengan standar deviasi 0,743 dan direspon positif pada horison ke-3 dengan deviasi 0,290 dan kembali positif pada horison ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode adanya kenaikan investasi portofolio di Indonesia memberikan dampak positif kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan investasi langsung asing (FDI) dampak investasi portofolio lebih besar namun tidak berlangsung lama karena pada horison ke-3 hingga ke-4, investasi portofolio direspon negatif oleh pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan sifat dari investasi yang bergerak bebas dan jangka pendek sehingga rentan pada terjadinya pembalikan modal.



Gambar 4. Respon Variabel Makroekonomi terhadap Investasi Portofolio

Pola berbeda ditunjukkan oleh respon negatif nilai tukar pada awal periode hingga horison atau kuartal ke-5, dengan deviasi cukup besar yaitu 101,789 menurun hingga 7,652. Adanya kenaikan investasi portofolio ke Indonesia menyebabkan terjadinya apresiasi nilai tukar. Namun pengaruh investasi portofolio rentan menimbulkan

instabilitas harga yaitu yang ditandai dengan respon semakin meningkatnya inflasi. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi apresiasi nilai tukar yang melampaui kondisi fundamental sehingga menyebabkan terjadinya *asset price bubble*. Respon kebijakan moneter adalah dengan juga menaikkan suku bunga kebijakan BI rate.

Implikasi kebijakan dengan semakin masifnya aliran modal asing terutama investasi portofolio, diperlukan adanya pengelolaan yang baik sehingga memberikan dampak positif bagi pembiayaan domestik dan meminimalkan fluktuasi jangka pendek terutama bila terjadi pembalikan arus modal asing. Kinerja makroekonomi yang semakin membaik mendorong penguatan nilai tukar ditengah pemulihan ketidakseimbangan global.

KESIMPULAN

Aliran modal masuk (*Capital Inflow*) di Indonesia dalam bentuk investasi portofolio lebih rentan menimbulkan resiko instabilitas makroekonomi bila dibandingkan *Foreign Direct Investment* (FDI). Maka diperlukan fundamental ekonomi yang kuat dan respon kebijakan yang tepat untuk menjaga ketahanan perekonomian nasional. Penerapan bauran kebijakan moneter melalui respon kebijakan suku bunga dan nilai tukar dan makroprudensial melalui pengelolaan aliran modal asing dan likuiditas perbankan yang tepat merupakan upaya dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada panitia penyelenggara Seminar Nasional *Competitive Advantage II* Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang dalam mengakomodasi dinamisasi intelektual ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2008-2011. Laporan Perekonomian Indonesia. <http://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. <http://www.bi.go.id>
- Batiz, Francisco L., and Luis Rivera Batiz.1985. *International Finance and Open Economy Macroeconomics*. Macmillan Publishing Company.pp. 349-351
- Bracke, Thierry et al. 2008. A Framework for Assessing Global Imbalance. Occasional Paper Series No.78.January 2008.European Central Bank
- Gujarati, Damodar N.2003. *Basic Econometrics*.the 4th eds..McGraw Hill.pp.275-276
- Harris, Richard and Robert Sollis.2003.*Applied Time Series Modelling and Forecasting*. John Willey & Sons Ltd.
- Honig A. 2008. Addressing causality in the effect of capital account liberalization on growth. *Journal of Macroeconomics* 30.pp 1602-1616
- Rachdi, Housseem PhD, Hichem Saidi. 2011. The Impact of Foreign Direct Investment and Portfolio Investment on Economic Growth in Developing and Developed Economies. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*. Vol. 1.Issue. 6.June

Pendampingan Kemitraan Pengelolaan Limbah Botol Plastik Menjadi Produk Bernilai Ekonomis Pada Masyarakat Desa Girimoyo Karangploso Malang

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra¹, Indah Yuliana¹, Yayuk Sri Rahayu¹

¹ Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: yuniarti_hidayah@yahoo.com

Abstrak

Penelitian dan pendampingan kemitraan ini bertujuan memberdayakan masyarakat Desa Girimoyo Karangploso Malang dengan mengelola limbah botol plastic menjadi produk bernilai ekonomis dan mengurangi dampak sampah plastic terhadap lingkungan. Metode yang digunakan adalah observasi deskriptif, Focus Discussion Group, analisis komponensial terhadap focus dalam bentuk pemetaan, transek, kalender musim, diagram venn, alur sejarah, serta bagan perubahan dan kecenderungan. Hasil nyata dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok masyarakat yang benar-benar mau dan mampu mengolah limbah botol plastik agar bernilai ekonomis yang terdiri dari petugas kebersihan, keluarganya, dan elemen masyarakat lain, mengurangi dampak sampah bagi lingkungan, paham akan adanya peluang ekonomi di balik sampah, prospek meningkatkan penghasilan keluarga, menjadi produk unggulan recycle bottles dan masyarakat termotivasi menerima masukan dan melakukan perbaikan terus menerus.

Kata Kunci: pendampingan, masyarakat, limbah botol plastic, recycle

Abstract

This research and partnership aims to empower the society of Girimoyo Karangploso Malang through managing plastic bottles waste into economically valuable products and reducing the impact of plastic waste on the environment. The methods used descriptive observation, Focus Group Discussion, focus componential anylisis in the form of mapping, transect, seasonal calendars, Venn diagrams, timeline, and trend and changes. The results show that the activities create the groups of people who really are willing and able to process waste plastic bottles that have economic value that consists of a trash collector, his family, and other elements of society, reducing the impact of waste on the environment, aware of the existence of economic opportunities from trash, the prospect of increasing family income, a superior product from recycle bottles and the society are motivated to receive feedback and do continuous improvement.

Keywords: partnership, society, plastic bottles waste, recycle

PENDAHULUAN

Sampah plastik sudah menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama daerah perkotaan. Seringkali masyarakat memilih untuk membuang sampah plastik di berbagai tempat umum seperti jalan, di sungai atau di perkarangan kosong. Mengingat sampah plastik tidak dapat membusuk secara alami maka tumpukan sampah tersebut akan mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apabila pembuangan sampah semakin tidak terkendali akan berakibat menumpuknya sampah di TPA karena tidak ada yang memungut sampah-sampah tersebut untuk dimanfaatkan dan pada akhirnya TPA akan semakin cepat penuh atau masa penggunaannya tidak cukup lama. Di sisi lain, untuk mencari lokasi baru untuk TPA saat ini cukup sulit karena masyarakat cenderung menolak kehadiran TPA di sekitar wilayah tempat tinggal mereka.

Desa Girimoyo yang terletak di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang memiliki masalah yang sama terhadap pemanfaatan limbah plastic. Terbagi atas tiga dusun yaitu Dusun Ngambon, Dusun Karangploso, Dusun Genengan, kondisi umum penanganan sampah di Desa Girimoyo dijabarkan berikut ini. Petugas kebersihan yang menangani kebersihan Desa Girimoyo berjumlah 5 orang. Jumlah tersebut kurang memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang harus ditangani yaitu Luas 349,25 Ha. Rendahnya insentif yang yang diterima oleh petugas kebersihan dan dukungan ekonomi yang lemah dari pihak keluarga, yaitu istri atau keluarga para petugas kebersihan rata-rata adalah ibu rumah tangga, dan ada yang menjadi buruh tani yang bersifat musiman menyebabkan tingkat kesejahteraan para petugas kebersihan dan keluarganya ini masih minim. Tambahan penghasilan umumnya diperoleh dari hasil mengumpulkan sampah yang ada, serta melakukan sortasi secara manual. Untuk sampah botol plastic mereka kumpulkan dan akan mereka jual apabila jumlahnya sudah cukup banyak dan menjual sampah botol-botol tersebut kepada pengepul dengan harga Rp 2000-2500 per kilo.

Permasalahan yang spesifik dan konkret adalah bahwa mitra belum bisa mengolah sampah, yang dilakukan sampai saat ini adalah sortasi sampah saja secara konvensional. Pasca sortasi, sisa sampah dibuang ke tempat penampungan. Padahal jika dikelola dengan lebih baik, masih bisa mendatangkan nilai ekonomi cukup tinggi. Jika sebelumnya barang bekas pakai tersebut kita buang dan menumpuk menjadi sampah, kini pola pikir serta sikap tersebut harus diubah. Tumpukan sampah dapat kita olah menjadi sesuatu benda yang berharga. Konsep *Reuse-Reduce-Recycle* atau disebut 3R merupakan salah satu alternative yang dapat dikembangkan dalam rangka menemukan jawaban atas problematika sampah serta memajukan perekonomian masyarakat. Hal inilah yang akan mendasari dilakukannya program ini. Kegiatan pemberdayaan dan pendampingan akan dimulai dari kelompok petugas kebersihan yang menangani sampah dan dikembangkan kepada keluarga petugas kebersihan di desa Girimoyo Karangploso Malang. Melalui program PAR akan dilakukan pendidikan, pelatihan dan pendampingan bagi seluruh anggota masyarakat termasuk kelompok petugas kebersihan dan keluarganya untuk mengolah limbah botol plastik agar bernilai ekonomis sehingga bisa meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) bukanlah istilah yang baru. Hal ini muncul hampir bersamaan dengan adanya kesadaran akan perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Diasumsikan bahwa kegiatan pembangunan itu mestinya mampu merangsang proses pemandirian masyarakat (*self sustaining process*). Ada hipotesis yang menyatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat niscaya tidak akan diperoleh kemajuan yang berarti dalam proses pemandirian tersebut. Adanya gagasan bahwa partisipasi masyarakat itu seyogyanya merefleksikan pemandirian bukanlah tanpa alasan. Diasumsikan tanpa adanya pemandirian maka suatu bentuk partisipasi masyarakat itu tidak lain adalah proses mobilisasi belaka. Pemberdayaan berkait erat dengan proses transformasi sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Pemberdayaan ialah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin, lemah, pinggir dan tertindas. Melalui proses pemberdayaan diasumsikan bahwa kelompok masyarakat dari strata sosial terendah sekali pun bisa saja terangkat dan mencul menjadi bagian dari lapisan masyarakat menengah dan atas. Ini akan terjadi bila mereka bukan saja diberi kesempatan akan tetapi mendapatkan bantuan atau terfasilitasi pihak lain yang memiliki komitmen untuk itu. Harus ada sekelompok orang atau suatu institusi yang bertindak sebagai pemicu keberdayaan (enabler) bagi mereka.

Pemberdayaan adalah proses dari, oleh dan untuk masyarakat, di mana masyarakat didampingi/difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pengembangan dan peningkatan taraf hidupnya. Masyarakat adalah subyek pembangunan. Pihak luar berperan sebagai fasilitator. Memahami konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menciptakan rakyat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya bukan saja berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi tetapi juga merupakan keniscayaan ideologi dengan semangat meruntuhkan dominasi-dominasi birokrasi dalam mengatur dan menentukan berbagai bidang kehidupan rakyat. Hakikat pemberdayaan adalah upaya melepaskan berbagai bentuk dominasi budaya, tekanan politik, eksploitasi ekonomi, yang menghalangi upaya masyarakat menemukan masalahnya sendiri serta upaya-upaya mengatasinya. Kindervatter (1970) memberikan batasan pemberdayaan sebagai peningkatan pengalaman manusia untuk meningkatkan kedudukannya di masyarakat.

Elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah: partisipasi dan mobilisasi sosial (*social mobilisation*). Lemahnya pendidikan, ekonomi dan segala kekurangan yang dimiliki, penduduk miskin secara umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisir diri mereka tanpa bantuan dari luar. Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya mereka menjadi agen perubahan sosial. Situasi partisipatif akan dapat terjadi bila: 1) Manipulasi dapat dihindari dengan menjauhkan proses indoktrinasi dari yang kuat kepada yang lemah, 2) Stakeholders menginformasikan hak-haknya, tanggung jawabnya serta pandangan-pandangannya, 3) Ada komunikasi timbal balik dimana stakeholder mempunyai kesempatan untuk menyatakan perhatian dan pikirannya sungguhpun tidak mesti pikiran mereka akan digunakan, 4) Stakeholder berinteraksi untuk saling memahami untuk membangun konsensus melalui proses negosiasi, 5) Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, 6) Adanya pemahaman dan pembagian resiko diantara stakeholders, 7) Adanya kerjasama (*Partnership*) untuk mencapai tujuan bersama, 8) Pengelolaan bersama (*Self-management*) diantara stakeholders. (Diadopsi dari UNCDF, 1996).

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, legislatif, pars pelaku ekonomi, rakyat, lembaga-lembaga pendidikan serta organisasi-organisasi non pemerintah. Cook dan Macaulay (1997) memberikan definisi pemberdayaan sebagai "*alat penting untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggungjawab*". Dalam pengembangan masyarakat khususnya, pemberdayaan merupakan cara yang sangat strategis dan praktis sekaligus produktif untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dari berbagai program pembangunan dan pengembangan masyarakat secara luas.

Dalam suatu proses pemberdayaan yang, terpenting adalah proses aksi refleksi yang terus menerus sampai masyarakat menjadi berdaya. Hasil dari refleksi akan menjadi bahan untuk melakukan rencana aksi selanjutnya

begitu seterusnya sehingga membentuk suatu siklus. Ilmu social kritik didasarkan atas prinsip bahwa semua manusia, baik yang laki-laki maupun perempuan, secara potensia dapat menjadi agen aktif dalam pembangunan dunia social dan personal mereka sendiri. Karena itu metode yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan selalu didasarkan pada sebuah bentuk dialog antar subyek, bukan subyek dengan obyek. Dalam metode riset kritis yang di kaji dalam paper ini, peneliti memulai dari masalah-masalah praktis yang berkembang dalam msyarakat yang didominasi oleh ideologi-ideologi tertentu dan dihadapkan pada kondisi social yang menindas. Peneliti kritis berusaha menjelaskan pengamatan dan melakukan analisis dialektik atas ideology-ideologi dan kondisi-kondisi social bersama rakyat dengan tujuan memperkuat posisi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat agar mereka terbebas dari berbagai macam bentuk penindasan (Mahmudi, 2005).

Penelitian kritis jelas harus mendidik rakyat untuk melakukan aksi politik tanpa mengasingkan mereka dari realitas dunia mereka sendiri. Riset kritis adalah metode praktis yang menggabungkan analisis dengan aksi. Fungsi ilmu social kritis adalah meningkatkan kesadaran para pelaku perubahan dari realitas yang diputar balikkan oleh kalangan tertentu dan disembunyikan dari pemahaman sehari-hari. Fungsi ilmu social kritis yang demikian didasarkan pada prinsip bahwa semua manusia, baik laki-laki atau perempuan secara potensial adalah agen aktif dalam pembangunan duana social dan kehidupan personal. Rakyat adalah subyek dalam menciptakan proses sejarah, bukan obyek. teori kritis secara sadar berkeinginan untuk membebaskan manusia dari konsep-konsep yang secara ideologis beku dari kenyataan dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan. Jelas bahwa metode riset yang diperlukan untuk merubah pemahaman terhadap dunia manusia tidak dapat di adopsi dari ilmu-ilmu social positif dan ilmu-ilmu alam metode ilmu social positif melihat bahwa masyarakat adalah informasi netral untuk observasi sistematis. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa dalam ilmu social positif kemudian terjadi monopoli pengetahuan. Metode-metode ini menjadikan manusia sebagai obyek yang diperlakukan sebagai data mentah yang kebenarannya dapat direkayasa oleh penelitiannya. Metode riset ilmu social positif sengaja mengeluarkan proses-prose sejarah dengan menjadikan gejala sebagai gejala alam dan melihat masyarakat berada diluar pemahaman peneliti. Sebagai konsekuensinya adalah memperkuat keterasingan pelaku penelitian social dari lembaga-lembaga social, politik, dan ekonomi mereka sendiri. Tujuan teori kritis bukanlah untuk meramalkan perubahan social, melainkan memahami perkembangan sejarah masyarakat sehingga mereka melakukan perubahan social.

Ilmu social kritis melihat bahwa ilmuwan social adalah harus berpartisipasi dalam proses pembangunan manusia. Karena itu para ilmuwan social harus menentukan keberpihakannya kepada siapa mereka melayani. Ilmu social kritis sama sekali menolak pemisahan antara praktek dan teori, dan bahwa semua praktek dan teori harus didiskusikan, begitu terus tidak berhenti. Kepentingan praktek bagi para ilmuwan sosialkritis adalah bagaimana membebaskan kaum tertindas agar dengan demikian posisi mereka sebagai manusia dapat berubah (juga dilihat sebagai manusia yang pantas hidup dan berkembang, tidak terus ditindas).

Metode ilmu social kritis ini sangat berkaitan erat dengan *Participatory Action Research* (PAR) karena mempunyai tujuan untuk humanisasi. Unsure dasar teori social kritis adalah sistem pemikiran yang tujuan dasarnya memperbaiki kondisi kemanusiaan (hampir semua pemikir adalah aktivis). Ada seorang intelektual menjadi buruh pabrik untuk melibatkan diri dan melakukan tindakan. Focus perhatiannya pada problem teori secara umum termasuk pada model investigasi problem nyata dari organisasi social. Hubermas menulis knowledge dan intrest tetapi juga menulis buku teknologi kerakyatan, anti kemapanan / *status quo* (tidak berpandangan bahwa kehidupan itu sama), berusaha menemukan alternative dari kondisi social yang ada lebih manusia, orientasi riset yang dibangun adalah pembebasan orang dari distorsi pola hubungan kekuasaan dan kontrol.

Bukan politik liberasi (orang miskin diinjak-injak tetapi setelah didatangi pejabat langsung dimaafkan (Mahmudi, 2005).

Dalam proses pemberdayaan masyarakat yang menggunakan metode ilmu social kritis dan PAR maka masyarakat tidak boleh berperan hanya sebagai penerima ide, tetapi mereka semua adalah subyek yang dapat memberikan dan mengelurakan ide, karena mereka adalah orang-orang yang paling paham terhadap realitas social budaya historisnya sehingga mereka juga paham bagaimana relitas tersebut dapat dirubah.

METODA

Pelaksanaan program PAR dilakukan dengan tehnik-tehnik partisipatif seperti *Focus Group Discussion* (FGD), survey dengan pelibatan warga sebagai *interviewer*, diskusi formal dan non formal, rembuk warga serta gotong royong dalam melakukan berbagai program kemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, dapat dikembangkan partisipasi secara optimal. Tahapan dalam observasi partisipatif adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah observasi deskriptif, dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi social sebagai obyek penelitian. Pada tahapan ini peneliti menghasilkan kesimpulan pertama. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data potensi dan permasalahan yang ada serta kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan sampah dan aktivitas pengelolaan serta pemanfaatan sampah plastik. Observasi meliputi kegiatan sistematis yang melibatkan peneliti sebagai pengamat sekaligus partisipan untuk lebih mengenali situasi dengan lebih baik serta melakukan pencatatan hasil observasi lebih detail.

Kedua, adalah observasi terfokus, peneliti melakukan FGD atau diskusi kelompok terfokus. Hal ini dilakukan untuk menggali data dari responden (dalam hal ini peserta diskusi/*stakeholder*) melalui sebuah diskusi berkelompok untuk membahas masalah sampah, khususnya pengelolaan sampah plastik yang ada di pemukiman mereka. FGD ini dilakukan bertujuan untuk (1) memetakan *stakeholder* yang terkait dengan masalah sampah, (2) memetakan masalah pengolahan sampah plastik di desa Girimoyo, (3) memetakan masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing *stakeholder*, yang berkaitan dengan pengolahan sampah plastik di desa Girimoyo, (4) memetakan komposisi, peran dan pola partisipasi pada masing-masing *stakeholder*.

Ketiga, adalah observasi terseleksi dengan melakukan analisis komponensial terhadap focus, peneliti melakukan karakteristik, perbedaan dan kesamaan antara kategori dan menemukan hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Kegiatan dalam proses ini meliputi (1) mengkategorikan dan mengklasifikasikan sikap peserta FGD yang memiliki kesamaan terhadap focus diskusi, yaitu bagaimana sikap dan persepsi masyarakat terhadap pengolahan limbah plastik, (2) mencari hubungan diantara masing-masing kategorisasi yang ada untuk menentukan model pemberdayaan yang dilakukan, (3) menentukan strategi dan program berdasarkan bagan sebab akibat dan hasil diskusi lainnya

Hasilnya kemudian *cross-check*, terhadap jawaban-jawaban masyarakat desa kemudian juga diklarifikasi ke perangkat desa. Metode tersebut kemudian diturunkan ke dalam tehnik sebagai berikut:

1. Pemetaan (Mapping)

Tehnik bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengungkapkan keadaan wilayah desanya sendiri. Hasilnya adalah peta atau sketsa keadaan sumberdaya umum desa. Pemetaan adalah menggambar kondisi wilayah desa bersama masyarakat dan meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi mengenai peta kondisi fisik desa, peruntukan lahan, pemukiman masyarakat termasuk masalah social yang ada di masyarakat. Dalam hal ini mengambil tema pengolahan limbah/sampah botol plastic. Masyarakat diminta untuk memetakan letak desa Girimoyo diantara desa yang lain dan

keadaan kondisi fisik desa, dimana letak rumah, tanah pertanian, tempat penampungan sampah akhir, dll. Di dalam melakukan penelusuran wilayah ada dua kegiatan yang dilakukan yakni, perjalanan dan membuat diagram rekaman data. Pemetaan wilayah desa di lakukan oleh tim . Kegiatan ini dimulai dari balai desa menuju tempat penampungan sampah akhir. Dalam melakukan kegiatan penelusuran wilayah desa, tim mendiskusikan dengan masyarakat yang ditemui tentang pemukiman, bagaimana kondisi penampungan sampah, pembuangan pembuangan akhir dari sampah. Setelah melakukan penelusuran wilayah desa, tim menggambar diagram. Diagram ini dipresentasikan kepada anggota masyarakat lain yang tidak mengikuti penelusuran wilayah desa dalam rangka proses klarifikasi hasil kerja dari tim bersama masyarakat.

2. Transek

Transek merupakan tehnik untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengamatan langsung terhadap lingkungan dan keadaan sumberdaya dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti lintasan tertentu yang disepakati. Dengan tehnik transek, diperoleh gambaran keadaan sumberdaya alam masyarakat beserta masalah-masalah, perubahan keadaan serta potensi-potensi yang ada yang dapat dikembangkan. Tema yang diambil dalam kegiatan transek ini adalah mengenai potensi sumber daya yang dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat desa Girimoyo.

3. Kalender Musim

Kehidupan masyarakat sedikit banyak dipengaruhi oleh pola atau daur kegiatan yang sama dan berulang dalam siklus waktu tertentu. Misalnya pada masyarakat pedesaan kehidupan social ekonomi sangat dipengaruhi oleh musim-musim yang berkaitan dengan aktifitas pertanian, perdagangan dan lain-lain. Dengan mengenali dan mengkaji pola ini maka kita akan dapat memperoleh gambaran yang cukup memadai untuk penyusunan suatu program bagi masyarakat. Tujuan mengetahui pola kehidupan masyarakat pada siklus musim tertentu, yaitu:

- a. Mengidentifikasi siklus waktu sibuk dan waktu luang masyarakat
- b. Mengetahui siklus permasalahan yang dihadapi masyarakat pada musim musim tertentu
- c. Mengetahui siklus peluang dan potensi yang ada pada musim-musim tertentu.

4. Diagram Venn

Tehnik ini digunakan untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa dan lingkungannya. Diagram vena memfasilitasi diskusi masyarakat untuk mengidentifikasi pihak-pihak mana yang berada di desa, serta menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingannya untuk masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat.

5. Alur Sejarah (Timeline)

Tehnik penelusuran alur sejarah masyarakat dengan menggali kejadian penting yang pernah dialami pada waktu tertentu untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi, masalah-masalah dan cara penyelesaiannya, dalam masyarakat secara kronologis yang terjadi pada tahun-tahun tertentu

6. Bagan Perubahan dan Kecenderungan (*Trend and Change*)

Tehnik ini memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai keadaan, kejadian serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Hasilnya digambar dalam suatu matriks. Dari besarnya perubahan hal-hal yang diamati dapat diperoleh gambaran adanya kecenderungan umum dari perubahan yang akan berlanjut dimasa depan. Hasilnya adalah bagan atau matriks perubahan dan kecenderungan yang umum mengenai desa atau yang berkaitan dengan topic tertentu.

PEMBAHASAN

Perubahan dalam masyarakat secara signifikan dapat dilihat dari pelaksanaan program PAR tentang pendampingan pengelolaan limbah botol plastic agar bernilai ekonomis pada petugas kebersihan di Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso Malang. Aktivitas pemberdayaan ini ternyata menarik minat masyarakat desa Girimoyo secara drastis. Awalnya tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk petugas kebersihan, akan tetapi kondisi dilapangan hanya memungkinkan posisi petugas kebersihan sebagai penyedia bahan baku utama yaitu pengumpul botol-botol plastic bekas, maka proses pemberdayaan dikembangkan pada keluarga petugas kebersihan yang memiliki waktu luang lebih banyak. Aktivitas pemberdayaan dan pendampingan difokuskan dalam kegiatan berikut:

1. Pemetaan potensi Desa Girimoyo
2. Sosialisasi pemanfaatan limbah botol plastic bernilai ekonomis
3. Pelatihan membuat ragam kreasi hasil olahan dari botol plastic bekas menjadi produk bernilai ekonomis
4. Pelatihan penentuan harga jual dan titik impas usaha
5. Pemetaan dan pendampingan proses pemasaran produk
6. Konsultasi kewirausahaan

Berdasarkan hasil metode dan teknik PAR yang dilakukan dan aktivitas pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan maka hasil yang diperoleh tampak sebagai berikut melebihi kondisi yang diharapkan, yaitu:

1. Keberlanjutan (*sustainability*) program dalam masyarakat.
2. Sambutan dan keinginan dari masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan pengelolaan limbah plastic bernilai ekonomis terutama pendampingan pasca produksi produk. Masyarakat merasa sangat membutuhkan pendampingan terutama pemantauan pemasaran produk hasil olahan botol plastic bekas dan menginginkan program monitoring ini tetap berlanjut. Bapak Lurah Desa Girimoyo secara langsung meminta program tidak terhenti karena tingginya semangat masyarakat dan menjadikan aktivitas PAR pemberdayaan pengolahan limbah botol plastic agar bernilai ekonomis menjadi *role model* yang sangat bagus bagi pelatihan-pelatihan yang dilakukan di Desa Girimoyo.
3. Adanya perubahan relasi social.
4. Partisipasi aktif dari masyarakat desa tidak hanya petugas kebersihan dan keluarganya saja tetapi peserta bertambah yang berasal dari berbagai elemen masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Girimoyo yaitu komunitas ibu-ibu PKK, kader-kader posyandu, guru-guru dan murid SMK, dan coordinator anak jalanan. Jumlah peserta meningkat dari 25 orang saat awal sosialisasi menjadi 50-60 orang saat pelatihan berlangsung.
5. Masyarakat terus menerus belajar (*continue education*)
6. Tidak terhentinya minat masyarakat untuk belajar ilmu dan keterampilan baru dengan melihat keaktifan permintaan masyarakat untuk pendampingan secara berkesinambungan terhadap produk-produk yang dihasilkannya. Aktivitas tersebut dibuktikan dengan pemantauan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang terbentuk untuk mempermudah pemberdayaan. Satu hal penting yang dipelajari oleh masyarakat adalah belajar menjaga lingkungannya dengan cara tidak mengotorinya dengan sampah-sampah plastic karena bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis.
7. Terciptanya inovasi-inovasi baru hasil dari pengamatan masyarakat atau adanya tema baru yang dikembangkan oleh masyarakat. Peserta pendampingan akan berupaya untuk menghasilkan produk-produk inovasi baru dari botol plastic yang dapat dijual ke pasar atau bernilai ekonomis. Beraneka ragam produk kreasi baru

dari botol plastic bekas dihasilkan dan produk yang dihasilkanpun semakin halus pengerjaannya.

8. Peningkatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Produk-produk hasil olahan botol plastic bekas bisa diterima oleh pasar. Dalam berbagai pameran maupun penjualan secara individu produk olahan dari botol plastic bekas laku dijual dengan kisaran harga paing murah untuk anting-anting Rp 3000-5000 per pasang, Rp 25.000 untuk sebuah kalung kreasi dari botol plastic sampai dengan penjualan dalam bentuk satu set assesoris mulai anting, gelang dan kalung seharga Rp50.000 per set.
10. Terbangunnya organisasi masyarakat sehingga terjadi *self help group*.
11. Pembentukan kelompok-kelompok kecil ini mulai dari memproduksi secara masal hasil olahan limbah botol plastic sampai dengan pemasarannya ternyata mempermudah pengawasan akan kesinambungan usaha dan memotivasi peserta karena diberi tanggungjawab yang besar.

KESIMPULAN

Kesatu kegiatan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak sampah bagi lingkungan terutama plastik yang membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai.

Kedua, masyarakat mulai mengetahui dan paham akan adanya peluang ekonomi di balik sampah, melalui sedikit sentuhan ketrampilan dan ditambah dengan ketekunan ternyata dapat menaikkan nilai limbah botol dan kemasan plastik yang semula tidak berharga menjadi produk yang banyak dicari. Usaha ini selain menambah penghasilan keluarga juga memberikan inspirasi kepada masyarakat yang lain untuk memulai berpartisipasi menangani masalah limbah khususnya plastik dengan baik.

Ketiga, hasil kegiatan pelatihan diketahui bahwa ada potensi besar di kalangan petugas kebersihan, keluarganya, dan elemen masyarakat lain untuk berusaha meningkatkan penghasilan keluarga. Hal terlihat dari semangat dan antusiasme peserta selama pelatihan pengolahan limbah botol dan kemasan plastik menjadi produk yang bernilai ekonomis.

Keempat, Kepala Desa dan perangkatnya sangat mendukung kegiatan ini dengan membantu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dan selalu terbuka untuk berdiskusi dengan tim peneliti mengenai bagaimana baiknya bentuk pelatihan sampai pemasaran produk yang dihasilkan. Kegiatan ini dinilai sejalan dengan misi dan visi Desa Girimoyo yaitu menjadi Desa Wirausaha dan produk dari olahan limbah plastik ini akan menjadi salah satu produk unggulan Desa Girimoyo. Bahkan Ibu Kepala Desa selalu hadir di setiap pertemuan untuk mendampingi dan menyemangati para peserta.

Kelima, semua peserta senang dan mengikuti pelatihan dengan baik walaupun rumah mereka agak jauh dari balai desa atau masih mempunyai balita, mereka tetap berusaha untuk selalu hadir dan tidak mau melewatkan sesi demi sesi pelatihan begitu saja. Mereka telah mampu membuat produk-produk seperti aksesoris (kalung, gelang, anting, bros jilbab, peniti jilbab, jepit rambut) dan wadah-wadah cantik untuk tempat pensil, tempat aksesoris, dan lain-lain.

Keenam, pemberian materi tentang penetapan harga maka peserta telah mampu menetapkan harga jual produk masing-masing. Ketujuh, animo masyarakat terhadap produk yang dihasilkan dari limbah botol plastik ini (aksesoris dan bentuk lain) cukup baik yang terbukti pada dua kegiatan pameran yang diikuti oleh peserta, banyak orang yang mengunjungi stan mereka dan tertarik untuk membeli sehingga banyak produk yang laku seperti anting, bros dan peniti jilbab, kalung, gelang, dan lain-lain. Kedelapan, peserta mulai menikmati hasil dari pelatihan ini yaitu dengan mulai terjualnya produk-produk yang mereka hasilkan sehingga mereka yakin bahwa pelatihan ini banyak memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- L. J. Moleong. 2006. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi, A. 2005. *Metode Penelitian Kritis (Meneliti Dunia Untuk Mengubahnya)*. Solo: LPTP.
- Mahmudi, A. 2005. *Paradigma Sosial Kritis Landasan Filosofis Partisipatory Action Research*. Pacet: Pelatihan TOT PAR Se-Jawa dan NTB.
- Moran, Dermot. 2000. *Introduction Phenomenology*. London: First Published 2000 by Routledge 11 New Fetter.
- Rahardjo, Yulfita. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PPK-LIPL.
- Rahmad Pulung Sudibyo. 2006. Partisipasi masyarakat Sub Urban Dalam Pembangunan Kota Malang, *Humanity, Jurnal Penelitian Social, Volume 1, Nomer 2, Maret 2006*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Reason, Peter & Bradbury, Hilary (eds) 2002. *Handbook of Action Resesarch, Participative Inquiry & Practice*. London: Sage Publications Ltd 6 Bunhill Street London EC2A 4PU.
- Saidi. AM. 2004. *Pokok-pokok Perbedaan Epistemologi Posivistik dan Epistimologi Interpretatif: Sebuah Pengantar*. Surakarta Workshop Pengembangan Penelitian Non posivistik Bagi Dosen PTAI se-Indonesia.
- Strauss, Anselm & Corbin, Yuliet, 2003. *Dasar-Dasar Penelitan Kualitatif, Tata langkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutanto, R. 2002. *Pertanian Organik: Menuju Pertanian Alternative dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Strategi Peningkatan Daya Saing BMT Dalam Menggerakkan Sektor Riil Melalui Pembiayaan Modal Kerja Berbasis Dinar Emas

Zuhairan Yunmi Yunan¹

¹Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: zuhairan@uinjkt.ac.id

Abstrak

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang mampu menghasilkan nilai sosial dan nilai ekonomi. Dengan pandangan tersebut, selayaknya operasional BMT bergerak dalam motif sosial dan motif keuntungan. Motif sosial bermakna upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menggerakkan sektor riil. Motif keuntungan bermakna pengembangan dan peningkatan daya saing BMT. Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan sosial melalui pengelolaan dana baitul maal. Jaminan sosial ini dapat berupa insentif ekonomi ataupun berupa insentif sosial lainnya. Kajian ini merupakan studi literatur mengenai penggunaan Dinar Emas sebagai basis untuk pembiayaan modal kerja. Akad Qard Hasan digunakan dalam pembiayaan ini. Penerapan pembiayaan modal kerja berbasis Dinar Emas dengan Qard Hasan akan mampu mendorong proses transformasi ekonomi sekaligus membuka jalan bagi terwujudnya entrepreneurship di masyarakat.

Kata Kunci: Dinar Emas, Daya Saing, BMT, Entrepreneurship, Qard Hasan

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is one of micro finance that gives the social values and economic values. Based on that perspective, BMT should operate their systems in the social motive and the profit motive. Social motive means the effort to improve the living standard for the society by moving the real sector. Profit motive means develop and improve the competitiveness of BMT. The main concept of BMT is social security through the BMT fund management. Profit motive is to develop and to improve the competitiveness of BMT. It can be economic incentives or other social incentives. This is a literature review on using of Gold Dinars as a basis for the financing of working capital. Qard Hasan contract is used on this financing. The application of working capital based on Gold Dinar with Qard Hasan will be able to encourage the process of economic transformation and open up the realization of entrepreneurship in the community.

Keywords: Gold Dinar, Competitiveness, BMT, Entrepreneurship, Qard Hasan

PENDAHULUAN

Islam memberikan pedoman yang sangat lengkap untuk semua bidang kehidupan, termasuk didalamnya bidang ekonomi. Islam memberikan aturan mengenai hal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hidup bagi manusia untuk menjalani kehidupan adalah Al Qur'an dan As Sunnah. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah (Suhrawardi, 2000).

Agar kehidupan perekonomian dapat berjalan sesuai dengan apa yang diberikan dalam tuntunan hidup manusia, maka diperlukan sebuah lembaga perekonomian yang dapat memberikan aturan main sesuai dengan tuntunan tersebut. Lembaga perekonomian yang dimaksud adalah sebuah lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan akan selalu mengalami perkembangan (baik kuantitas maupun kualitasnya) sesuai dengan urutan obyektif masyarakat, perlu juga diketahui bahwa kemunculan suatu lembaga (yang baku) pada hakikatnya merupakan tuntutan obyektif yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, sebab dalam kehidupan perekonomian, manusia akan selalu berupaya untuk selalu lebih efisien (Hinayati). Dalam kaitan hal tersebut, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dapat memberikan peran dalam kehidupan perekonomian masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT mampu menghasilkan mampu menghasilkan nilai sosial dan nilai ekonomi. Dengan pandangan tersebut, selayaknya operasional BMT bergerak dalam motif sosial dan motif keuntungan. Motif sosial bermakna upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menggerakkan sektor riil. Motif keuntungan bermakna pengembangan dan peningkatan daya saing BMT. Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan sosial melalui pengelolaan dana baitul maal. Jaminan sosial ini dapat berupa insentif ekonomi ataupun berupa insentif sosial lainnya.

Pada umumnya *funding* yang dimiliki BMT mayoritas merupakan dari *chanelling programme*, dimana dana-dana tersebut adalah berasal dari penempatan dana BPRS maupun *chanelling program* dari bank syariah atau dari dana hibah lainnya. Hal inilah yang menyebabkan *cost of fund* dari BMT besar. Padahal BMT merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, karena *cost of fund* yang diberikan besar sehingga berdampak dari penentuan pricing penyaluran dana seperti *rate margin murabahah* dan *rate* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* besar. Pada saat ini praktik riil di BMT dalam penghimpunan dana yang berasal dari anggota belum signifikan, dana BMT masih mengandalkan modal dari *linkage* lembaga keuangan syariah yang lebih besar seperti BPRS maupun Bank Syariah (Wibowo, 2011). Kondisi tersebut ditambah lagi dengan perkembangan sektor keuangan jauh lebih besar dibandingkan sektor riil. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai ekonomi non riil melebihi nilai aset barang dan jasa yang ada. Untuk Indonesia, transaksi keuangan yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia mencapai Rp. 7 T perhari, sedangkan nilai transaksi barang dan jasa sekitar Rp. 3.5 T perhari. Hal inilah yang menjadikan perekonomian menjadi tidak stabil dan mengarah kepada apa yang disebut dengan inflasi.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa terdapat dua permasalahan yang harus dihilangkan atau paling tidak diminimalisasikan. Dalam kajian ini hanya terfokus kepada masalah yang kedua, yaitu masalah inflasi. Hal ini menjadi penting untuk dicari solusinya mengingat *fiat money* yang digunakan mempunyai masalah tersendiri dalam hal penurunan daya beli. Penurunan daya beli tersebut menjadikan penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan BMT sangat sulit bermotifkan sosial. Untuk itu diperlukan sebuah standar baku untuk pengukur nilai barang dan jasa, dalam kajian ini akan dibahas

mengenai *Qard Hasan* dengan menggunakan konsep pembiayaan modal kerja berbasis Dinar Emas.

METODA

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deduktif. Kajiannya bersifat deskriptif. Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka dari beberapa literatur yang kutipannya sudah disebutkan dalam tulisan ini. Menurut Sugiyono (2008) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Studi kepustakaan dilakukan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait operasional BMT serta tentang konsep *Qard Hasan*.

PEMBAHASAN

Menurut definisi yang dikeluarkan *Micro Credit Summit* (1997), Keuangan Mikro adalah "*Program pinjaman uang terhadap keluarga miskin untuk digunakan sebagai usaha yang memberikan hasil dan income dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya*". Definisi ini jelas menyatakan yang berhak untuk mendapatkan pinjaman tersebut adalah keluarga miskin dengan prinsip pinjaman, tanpa pengecualian apakah si miskin nanti dapat memenuhi dan melunasi hutang atau tidak. Dalam sumber lain yang menjelaskan tentang microfinance disebutkan bahwa "*keuangan mikro (microfinance) meliputi pinjaman, tabungan-tabungan, asuransi, layanan transfer, dan berbagai produk keuangan yang ditujukan kepada masyarakat (low-income clients) berpenghasilan rendah*" (Wibowo, 2011).

Khusus mengenai BMT, Keputusan Menteri Negara Koperasi & UMKM RI No.91 Tahun 2004 mendefinisikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah dan berbadan hukum koperasi jasa keuangan syari'ah, maka petunjuk pelaksanaannya juga seharusnya mengikuti aturan jasa keuangan syari'ah, yaitu kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. PINBUK (Pusat Inkubator Bisnis Usaha Kecil), mendefinisikan BMT terdiri dari dua sisi kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baituttamwil*. Kegiatan *Baituttamwil* mengutamakan pengembangan kegiatan-kegiatan investasi dan produktif dengan sasaran/usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk pembangunan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. Sedangkan *Baitul Maal* mengutamakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan, bersifat nirlaba diharapkan mampu mengakumulasikan dana ZIS yang pada gilirannya berfungsi mendukung kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah itu (Wibowo, 2011).

Dari seluruh definisi yang disebutkan diatas, sudah sangat jelas terlihat bahwa BMT yang juga merupakan lembaga keuangan mikro harus memfokuskan kegiatan penyaluran dananya bagi masyarakat menengah ke bawah tanpa ada pengecualian. Dalam Ekonomi Islam ini dapat dilakukan dengan menerapkan *Qard Hasan*.

Qard Hasan adalah salah satu produk yang termasuk dalam kategori non bank dan perbankan, dimana *Qard Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman (Muhammad, 2005). Pinjaman *Qard Hasan* juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank. Pinjaman ini juga sering diberikan kepada lembaga-lembaga

amal untuk mendanai aktifitas-aktifitas mereka. Pembayaran kembali dilakukan selama periode yang disepakati oleh kedua belah pihak (Latifa, 2005).

Sebagai lembaga *Baituttamwil*, sudah selayaknya BMT hanya meminta pengembalian modal pinjaman saja kepada masyarakat tanpa mengenai beban apapun. Namun akan muncul masalah jika nilai pembiayaan tersebut berbentuk *fiat money*. Masalah tersebut terdapat pada daya beli dari *fiat money* tersebut yang selalu turun. Hal ini apa yang kita kenal dengan inflasi. Untuk itu perlu sebuah inovasi bagi BMT, bahwa untuk menyalurkan dana ke masyarakat dengan menggunakan Dinar Emas. Penggunaan alat tersebut akan lebih memudahkan pinjaman *Qard Hasan* untuk dilakukan, karena si peminjam hanya mengembalikan modal pinjaman saja dalam hal ini Dinar kepada BMT yang kecenderungan nilainya tetap stabil.

Inflasi dan Fluktuasi Harga

Masalah yang senantiasa ditimbulkan uang kertas (*fiat money*) adalah inflasi. Makna umum dari inflasi ialah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode waktu tertentu. Inflasi merupakan fenomena moneter, karena telah terjadi penurunan unit perhitungan moneter dalam suatu komoditas. Dengan kata lain, dalam inflasi jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai nilai dari unit perhitungan moneter terhadap barang dan jasa mengalami kenaikan. Terjadinya inflasi tersebut senantiasa dikaitkan dengan terdapatnya jumlah mata uang yang berlebih-lebihan di dalam peredarannya. Milton Friedman, ketika memberi komentar terhadap keberadaan mata uang kertas mengatakan: “*inflation is always and everywhere a monetary phenomenon*” (Hifzur-Rab, 2002; Karim, 2002).

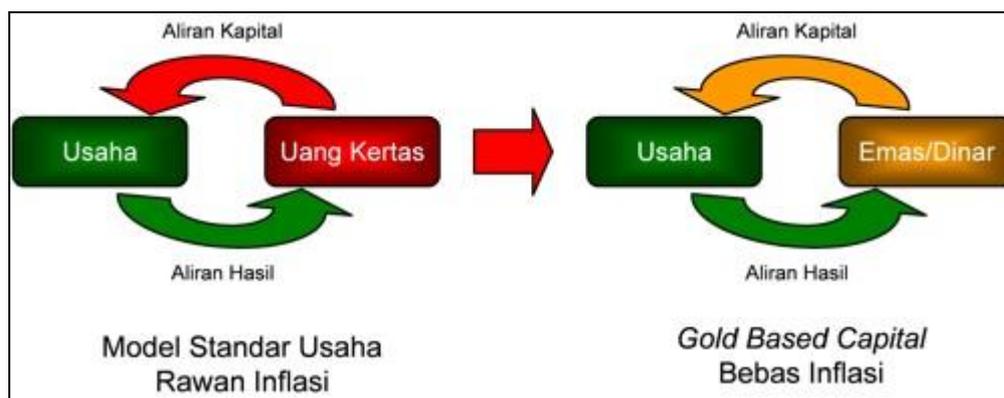
Berbicara mengenai inflasi, perlu penyamaan persepsi mengenai definisinya. Inflasi secara umum mempunyai pengertian bahwa terjadinya kenaikan harga secara umum dan terus menerus yang disebabkan oleh menurunnya atau melemahnya daya beli uang. Kalau persepsi mengenai inflasi adalah yang dimaksud, maka kedua dalil diatas sudah sangat jelas dan terang untuk menjawabnya. Bahwa daya beli dinar-dirham tidak pernah mengalami kenaikan maupun penurunan, selalu stabil dan menuju keseimbangan. Hal ini yang menyebabkan bahwa satu dinar setara dengan satu kambing dan nilai dirham setara dengan makanan untuk beberapa orang. Ayat Al Qur'an dan Hadits sudah sangat jelas dan terang, bahwa daya beli Dinar-Dirham tidak pernah mengalami perubahan baik kekuatan maupun kelemahannya terhadap suatu barang. Ini dikarenakan nilai instrinsiknya benar-benar penuh 100%. (Yunan, 2012).

Yunan (2012) mengatakan ada pandangan yang menyatakan bahwa penurunan harga emas beberapa bulan yang lalu juga merupakan inflasi. Pandangan ini bisa menjadi keliru, karena dalam ilmu ekonomi sendiri kita mengenal adanya mekanisme permintaan dan penawaran. Mekanisme ini akan selalu mencapai titik keseimbangan. Kondisi seperti ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah bahwa ketika Dinar-Dirham digunakan, pernah terjadi kenaikan harga barang-barang. Kenaikan ini tidak disebut inflasi karena harga yang terbentuk di pasar terjadi secara fitrah dan tidak ada campur tangan dari Rasulullah sendiri. Diriwayatkan oleh Anas RA: “*Orang-orang berkata kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, 'Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk kami. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam lalu menjawab, 'Allah-lah Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rizki. Aku*

berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorang-pun yang meminta padaku tentang adanya kedzaliman dalam urusan darah dan harta””.

Hadits diatas juga sudah sangat jelas dan terang, bahwa yang menjadi penentu harga adalah Allah SWT. Harga-harga yang terjadi secara fitrah di pasar akan selalu mencapai keseimbangannya sendiri, dan ini bukan merupakan inflasi. Uraian diatas menunjukkan bahwa pertukaran yang terjadi sangat alamiah. Kalaupun ada fluktuasi harga, itu disebabkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Mekanisme ini sebenarnya akan selalu menuju ketitikseimbangannya (*equilibrium*). Tidak terjadi penurunan maupun kenaikan nilai uang, karena titik keseimbangan selalu dipenuhi. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah telah menciptakan emas dan perak sebagai hakim yang adil. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menulis bahwa Allah menciptakan dua logam mulia itu untuk menjadi alat pengukur harga atau nilai bagi segala sesuatu. Al Maqrizi dalam *Ighatsah* menambahkan bahwa Allah menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar alat pengukur nilai dan penyimpan kekayaan, melainkan juga sebagai alat tukar (Yunan, 2012). Sarkhasi (1993) menyebutkan bahwa emas dan perak seperti apapun bentuknya diciptakan Allah SWT sebagai substansi harga.

Ilustrasi pada gambar 1 dibawah ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam aliran modal dalam pembiayaan modal kerja. Perbedaan terletak pada penggunaan alat tukarnya. Penggunaan *Qard Hasan* dengan menggunakan *fiat money* akan terbentur dengan inflasi. Dalam hal ini BMT akan mengalami kesulitan untuk mempunyai daya saing bagi pengembangannya sebagai *Baituttamwil*. Sedangkan penggunaan *Qard Hasan* dengan menggunakan Dinar Emas akan bebas inflasi. Dalam hal ini BMT dapat menerapkan *Qard Hasan* tanpa khawatir nilainya akan tergerus inflasi. Fokus BMT selanjutnya lebih kepada membantu dan membina masyarakat untuk mengembakan usaha yang ada. Semakin banyak usaha di masyarakat yang berkembang, sektor riil secara otomatis menjadi tumbuh, perekonomian masyarakat khususnya menengah ke bawah akan lebih meingkat.



Gambar 1. *Business Cycle Change From Fiat To Gold*
Sumber: Iqbal (2011)

KESIMPULAN

Dengan menerapkan *Qard Hasan*, maka masyarakat dalam hal ini yang membutuhkan pembiayaan modal kerja dari BMT akan mampu membuat rencana kerja yang lebih matang dan menjalankannya dengan prinsip kehati-hatian. Sehingga akan membuka jalan bagi terwujudnya *entrepreneurship* di masyarakat. Dari sisi BMT juga akan lebih mempunyai daya saing, karena modal kerja yang disalurkan kepada masyarakat nilainya tetap stabil atau tidak tergerus oleh inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hinayati, Fiqi. 2008. *Aplikasi Al-Qardu Hasan Pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah BEN IMAN Lamongan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Hizbur-Rab. 2002. *Problems Created by the Fiat Money, Islamic Dinar and Other Available Alternatives*. Dalam: Proceedings 2002 International Conference on Stable and Just Global Monetary System – Viability of The Islamic Dinar. International Islamic University Malaysia. Kuala Lumpur. Malaysia
- Iqbal, Muhaimin. 2011. *Gold Based Capital: Menumbuhkan Sektor Riil Untuk Melawan Inflasi*. <http://geraidinar.com>.
- Karim, Adiwarmanto. 2002. *Ekonomi Islam – Suatu Kajian Ekonomi Makro*. The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, Indonesia.
- Latifa, M. Al-Qoudh. 2005. *Perbankan Syari'ah Dalam Teori Dan Praktek*, Serambi, Jakarta.
- Mankiew, N, Gregory. 2006. *Teori Makro Ekonomi*
- Muhammad. 2005. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. UII Press, Yogyakarta.
- Sarkhasi. 1993. *al-Mabsuth*, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhrawardi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibowo, Hendro. 2011. *BMT Sebagai Corporate Social Entrepreneurship*. Forum Riset Perbankan Syariah, Medan 2011.
- Yunan, Zuhairan Yunmi. 2012. *Purchasing Power of Gold Dinar (Review on Islamic Monetary System)*. Proceeding: International Conference on Islamic Economics and Business (ICIEB 2012) A' Famosa Resort Hotel, Melaka, Malaysia.

